

Penanggung Jawab:

Dr. Muhammad Hikam, M.Sc.

Dewan Editor:

Drs. Muhammad Riduansyah, M.Si.

dr. Resna A. Soerawidjaja, M. Sc.

dr. Elida Ilyas, Sp.RM.

Meily Badriati, S.Sos., M.Si.

Dr. Jajang Gunawijaya, M.A.

Drs. Adang Hendrawan, M.Si.

Dr. Retno Kusumastuti, M.Si.

dr. Yuli Prapancha Satar, MARS

dr. Amendi Nasution, Sp.RM.

Dini Marina, S.E. M.Comm.

Ike Iswary Lawanda, S.S., M.S.

Drs. Kusnar Budi, M.Bus.

Dra. Sri Susilih, M.Si.

Redaktur Pelaksana:

Erwin Harinurdin, S.Sos, M.S. Ak.

Sandra Aulia Z, SE, Ak, M.S. Ak., CA

Elsa Roselina, SK.P, M.K.M.

Admin Jurnal Online:

Rudy Wahjudi, S.Si

Pitoyo

Penyunting

Devie Rahmawati, S.Sos., Msi

Deni Danial Kesa, MBA

Kesekretariatan

Rizky Anggun, A.Md

Puput Leni, A.Md

Alamat Redaksi

Gedung Administrasi Dan Laboratorium Program Vokasi,

Universitas Indonesia, Depok 16424.

Telp: 021-29027481 ; Fax: 021-29027480

Email: jurnal@vokasi.ui.ac.id

<http://jurnal.vokasi.ui.ac.id>

Jurnal Vokasi merupakan jurnal ilmiah yang menyajikan artikel tentang pengetahuan dan informasi riset dalam bidang sosial dan kesehatan. Jurnal ini merupakan sarana publikasi dan ajang berbagi karya riset dan pengembangannya dibidang sosial dan kesehatan terutama di lingkungan Program Vokasi Universitas Indonesia.

Jurnal ini terbit secara berkala sebanyak dua kali dalam setahun (Januari, Juli).

Dalam edisi kedua kali ini, kami berharap dapat menginspirasi seluruh staf pengajar dan civitas akademika khususnya di lingkungan Program Vokasi UI, untuk berperan menjadi penulis artikel pada Jurnal Vokasi edisi berikutnya.

Daftar Isi

1

Erwin Harinurdin, Asti Setiawati, Wahyu Nofiantoro

Praktik *Governance* Perbankan Indonesia Ditinjau Dari Aspek Risiko

15

Sancoko

Industri Perbankan yang terkonsentrasi apakah tetap dapat berkompetisi? Kasus Perbankan Syariah

29

Titis Wahyuni

Analisis Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) di Kantor Akuntansi Regional Jakarta

61

Marsdenia

Analisis Rasio Lancar Rumah Sakit X

84

Nia Murniati, Supriadi, Tri Gunadi

Peningkatan Keterlibatan Mahasiswa dalam Pembelajaran Biostatistik dengan Metode Kooperatif Melalui Media Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) di Program Studi Perumahsakitan

97

Dyah Safitri

Berbagi Pengetahuan Sebagai Alternatif Penciptaan Pengetahuan untuk Staf Pengajar Vokasi UI

PRAKTIK *GOVERNANCE* PERBANKAN INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK RISIKO

Erwin Harinurdin^{1*}, Asti Setiawati^{1*}, Wahyu Nofiantoro^{1*}

¹Program Studi Administrasi Keuangan dan Perbankan Program Vokasi Universitas Indonesia

ABSTRAK - Kinerja berbasis struktur perbankan Indonesia belum memiliki karakter hidup normal perbankan dan masih sangat ditentukan oleh kebijakan ideologis dan politis dari pemerintah. Pemulihan perbankan dengan menggunakan cara yang sangat protektif, seperti dari pembelian obligasi pemerintah dengan margin terbatas atau penyaluran kredit dan penarikan dana dijamin. Berbagai indikator perbankan seperti rasio *Loan to Deposit* (LDR) dan struktur dana pihak ketiga yang masih didominasi oleh dana jangka pendek seperti giro dan tabungan menunjukkan bahwa bank belum mampu melaksanakan fungsi utamanya dalam sistem ekonomi, fungsi intermediasi.

Dalam rangka restrukturisasi dan pemulihan industri perbankan nasional, Bank Indonesia telah mengambil beberapa kebijakan yang dianggap perlu. Beberapa kebijakan tersebut meliputi implementasi prinsip-prinsip manajemen risiko (sesuai dengan *Bassel Accord*) dan prinsip mengenal nasabah. Secara keseluruhan, kebijakan ini disusun dalam program orang tua yang sering dikenal sebagai Arsitektur Perbankan Indonesia (API). API diharapkan menjadi blue print serta acuan bagi struktur industri perbankan Indonesia yang dianggap ideal untuk BI.

Sejumlah pelaku tata perbankan menentukan kinerjanya, seperti regulator, supervisor, pemegang saham, direksi, manajemen, audit internal, auditor eksternal, lembaga pemeringkat dan pemilik dana nasabah. Peran masing-masing berbeda sesuai kedudukan, mekanisme akuntabilitas dan harapan sosial. Tapi artikulasi *good governance* sebagai penonjolan misi, kapasitas dan hubungan menjadi prasyarat untuk pertumbuhan dan stabilitas.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Didasarkan pada hasil penelitian disimpulkan bahwa Praktik *governance* pada perbankan Indonesia belum dilaksanakan secara optimal.

Kata kunci: Bank, Resiko, *Governance*.

ABSTRACT - *Performance -based banking structures Indonesia does not have a normal life characters banking and still largely determined by the ideological and political policies of the government. Banking recovery by using a very protective manner, such as from the purchase of government bonds with limited or margin lending and guaranteed withdrawal. Various indicators such as bank loan-deposit ratio (LDR) and the structure of third-party funds that are still dominated by short-term funds such as checking and savings shows that the bank has not been able to carry out its primary function in the economic system, intermediation.*

In the framework of the restructuring and recovery of the national banking industry, Bank Indonesia has taken some of the policies that are considered necessary. Some of these policies include the implementation of the principles of risk management (according to Bassel Accor) and Know Your Customer principles. Overall, the policy is structured in parent programs are often known as the Indonesian Banking Architecture (API). API is expected to be the blue print as well as a reference for the Indonesian banking industry structure that is considered ideal for BI.

Determine the number of actors performing the banking system, such as regulators, supervisors, shareholders, directors, management, internal audit, external auditors, rating agencies and owners of customer funds. The role of each differ according to the position, accountability mechanisms and social expectations. But

the articulation of good governance as a protrusion of the mission, capacity and relationships to be a prerequisite for growth and stability.

The method used is descriptive qualitative approach. Based on the results of the study concluded that the practice of governance in the Indonesian banking system has not been implemented optimally.

Keywords: Keywords: Banks, Risk, Governance.

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan vital dan strategis dalam pembangunan nasional. Lembaga perbankan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian suatu negara, karena memiliki fungsi intermediasi atau sebagai perantara antara pemilik modal (*fund supplier*) dengan pengguna dana (*fund user*). Di Indonesia jumlah bank cukup banyak yaitu 240 buah bank sebelum dilikuidasi tahap pertama pada tahun 1999. Sejak digulirkan Paket Oktober 1988 yang lebih dikenal dengan Pakto 88 mengenai deregulasi bidang perbankan menjamurlah bank-bank, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Pakto 88 memberikan kemudahan dalam persyaratan pendirian bank. Perkembangan bank sangat fantastis. Pada tahun 1988 s.d 1994 terdapat 134 bank umum, tahun 1996 s.d. maret 2001 dari 239 bank umum menjadi 162 bank, disusul kemudian bulan Desember 2005 menjadi 131 bank umum.¹

Pasca Pakto 88 kemudahan pendirian itu antara lain adalah rendahnya modal disetor hanya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) untuk bank umum dan Rp. 50.000.000,- (lima

puluh juta) untuk BPR. Apabila dinilai dari besarnya modal disetor maka sangat sulit bagi bank dengan modal disetor minimum tersebut mampu beroperasi karena harus menanggung biaya operasional yang tinggi dibandingkan dengan pendapatan operasional yang relatif rendah.

Adanya kemudahan pendirian bank bukan berarti peluang untuk mencapai laba tinggi dapat tercapai karena banyak berdiri bank-bank baru. Tetapi pendirian bank dimaksudkan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi khususnya usaha mikro dan menengah, namun justru sebaliknya merupakan bumerang yang menghancurkan perekonomian nasional pada sepuluh tahun kemudian (1998) karena pengelolaan bank-bank yang tidak profesional sehingga pemerintah harus menanggung ratusan milyar rupiah dalam bentuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk nasabah.

Berbagai tindakan telah dilakukan oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia, seperti membantu likuiditas, merekapitulasi, menjamin deposit dan kreditur, memperpanjang operasi kondisi minimal, mengelola aset dan menalangi hutang dalam dan luar negeri. Namun kinerja bank-bank tersebut belum kunjung bersandar pada aktivitas perbankan normal. Bahkan sebagian

¹ Bank Indonesia.

bank mengalami kesulitan mencapai norma kesehatan.² Sementara kebocoran-kebocoran masih terus berlangsung.³

Kebijakan dan program yang tidak berkesinambungan secara fungsional atau pengulangan-pengulangan yang sebenarnya tidak memperbaiki keadaan sangat mungkin menyebabkan pemulihan semakin sulit.⁴ Menurut Stiglitz, baik negara maju maupun negara yang sedang bertransisi sering mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan ideologis dan politis. Akibatnya, banyak tindakan tidak menyelesaikan masalah kecuali memenuhi kepentingan dan keyakinan penguasa.⁵

Kinerja perbankan Indonesia hingga kini belum berdasarkan struktur kehidupan perbankan yang normal dan masih sangat ditentukan oleh kebijakan ideologis dan politis pemerintah. Perbankan hidup dari rente program pemulihan yang sangat protektif, seperti dari pembelian surat berharga pemerintah dengan margin yang terbatas atau dari kucuran kredit dan penarikan dana yang dijamin.⁶ Berbagai indikator perbankan seperti *Loan to Deposit ration* (LDR) mencapai 70%-80% per juni 2012 dan struktur dana pihak ketiga yang masih didominasi oleh dana jangka pendek

seperti giro dan tabungan menunjukkan bahwa perbankan belum dapat menjalankan fungsi utamanya dalam sistem perekonomian, yaitu fungsi intermediasi. Namun demikian, seiring dengan program penyehatan perbankan, secara lambat, industri perbankan mulai menunjukkan kinerja yang meningkat dari posisi keterpurukan selama krisis ekonomi, walaupun belum mencapai tingkat kinerja sebelum krisis.

Ada dua pandangan utama terkait kinerja perbankan di Indonesia; Pertama, kondisi buruk perbankan Indonesia diikuti oleh kinerja yang rendah adalah dampak kemerosotan kondisi ekonomi. Faktor ekonomi makro seperti; inflasi, nilai tukar, suku bunga. Kedua, kondisi buruk perbankan Indonesia adalah semata-mata efek menular dari penurunan kondisi kawasan regional.⁷

Namun pengamatan indikator kehati-hatian seperti pinjaman terhadap simpanan (LDR), posisi devisa (PDN), GWM dan BMPK dan rasio kecukupan modal (CAR) jauh sebelum krisis menunjukkan, baik penurunan kondisi ekonomi mikro maupun dampak penularan hanya sebagai pemicu hancurnya kinerja perbankan Indonesia yang selama ini dikelola secara buruk dan diikuti oleh kinerja yang rendah.⁸ Data empiris tersebut menegaskan bahwa penurunan ekonomi mikro dan dampak penularan sekedar menyingkap betapa buruknya *governance* perbankan Indonesia selama ini.⁹

²Bank Indonesia, bank umum yang layak operasi harus memiliki CAR, LDR dan NPL masing-masing 8%, 85% dan 5% (PBI No. 31/UPPB/1988).

³ Eko B Supriyanto, *Budaya Kerja Perbankan ; Jalan Lurus Menuju Integritas* (Jakarta : Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, 2006) hal 114-115.

⁴ Toni A Prasentiantono et al., *Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, Jakarta : PT Elexmedia Komputindo, 2000 hal 8

⁵ Joseph E Stiglitz, *Globalization and Its Discontent* (New York : W W Norton & Company, 2003 hal 10.

⁶ Kredit Sektor UMKM dan LPS

⁷ George G Kaufman, *Bank Problems : A Global Perspective* (Connecticut : jai Press Inc., 199) hal 171.

⁸ Sebelum tahun 1995 LDR>110%; PDN>20%; GWM<4%; BMPK>60% dan CAR<7%.

⁹ Eko B Supriyanto, op.cit., hal 9

Kajian penelitian ini merujuk temuan Greuning dan Bratanovic, bahwa sejumlah pelaku *governance* perbankan menentukan kinerjanya, seperti regulator, pengawas, pemegang saham, direksi, manajemen, pemeriksaan internal, auditor eksternal, pemeringkat dan nasabah pemilik dana. Peranan masing-masing berbeda sesuai kedudukan, mekanisme pertanggungjawaban dan ekspektasi sosialnya. Namun artikulasi *good governance* sebagai penonjolan misi, kapasitas dan relasi menjadi prasyarat bagi pertumbuhan dan stabilitas.

Dalam rangka penyehatan serta pemulihan industri perbankan nasional, Bank Indonesia telah mengambil beberapa kebijakan yang dianggap perlu. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya adalah implementasi prinsip manajemen resiko (sesuai dengan *Bassel Accord*) dan *know your customer principles*. Secara keseluruhan, berbagai kebijakan tersebut dirangkai dalam satu program induk yang sering dikenal dengan istilah Arsitektur Perbankan Indonesia (API). API diharapkan menjadi *blue print* sekaligus acuan bagi struktur industri perbankan Indonesia yang dianggap ideal bagi BI.

Dari kacamata persaingan usaha, implementasi berbagai kebijakan BI dalam *grand design* Arsitektur Perbankan Indonesia (API) cenderung menimbulkan polemik. Upaya untuk menyehatkan atau memulihkan kondisi industri perbankan versi API, nampaknya sama dengan mendorong bank (terutama bank menengah dan kecil) untuk melakukan merger/akuissi. Gelombang

merger/akuissi tersebut disatu sisi dapat meningkatkan efisiensi sekaligus penguatan konsolidasi perbankan, namun di sisi lain dapat mengakibatkan terjadinya pemusatan konsentrasi pangsa pasar pada sekelompok bank tertentu. Disini akan muncul polemik dengan kebijakan dan atau hukum persaingan usaha (UU No. 5 Tahun 1999) yang sangat mewaspadaai pemusatan konsentrasi tersebut karena berpotensi menimbulkan berbagai pelanggaran seperti diantaranya penyalahgunaan posisi dominan.¹⁰

Selanjutnya isu yang terkait dengan struktur pasar, juga terdapat isu persaingan usaha lain dalam industri perbankan yang teridentifikasi. Beberapa isu tersebut antara lain interkasi dan koordinasi yang sangat kuat antar bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya seperti standarisasi penetapan suku bunga, *risk based pricing* dan struktur biaya.¹¹

Menurut Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution (pada saat itu) bahwa suku bunga deposito perbankan nasional masih diatas angka inflasi. Di Asia Tenggara semua bunga deposito selalu lebih rendah dari pada inflasi. Tetapi di Indonesia bunga deposito justru di atas indeks harga konsumen. Indonesia ini pengecualian di Asia Tenggara bahkan di Dunia.¹²

Tingkat inflasi di Filipina 5,5 persen, suku bunga deposito berada dikisaran 3 – 4 persen, Sementara di Malaysia dan Thailand,

¹⁰ Ariyanto, Taufik., *Profil Persiangan Usaha Dalam Industri Perbankan Indonesia*, Perbanas Finance & Banking Journal, Vol. 6 No. 2 Desember 2004; 95-108.

¹¹ Ibid, hal 96.

¹² Nasution, Darmin., Bunga Kredit Tetap Tinggi, *Majalah Tempo* Edisi 5 – 11 Maret 2012.

dengan inflasi 4 – 5 persen, suku bunga deposito 2 – 3 persen. Tetapi sebaliknya di Indonesia dengan inflasi 5 – 6 persen, bunga deposito masih di atas 6 persen. Tingginya suku bunga deposito itu menjadi salah satu penyebab suku bunga dasar kredit masih tinggi. Sampai saat ini bunga kredit belum turun signifikan meskipun bunga acuan Bank Indonesia sudah turun menjadi 5,75 persen dan bunga Sertifikat Bank Indonesia sekitar 6 persen. Bunga kredit di Indonesia masih 9 – 13 persen pertahun. Penyebab lain masih tingginya bunga kredit adalah karena “rakusnya” perbankan meraup laba. Laba bank yang meningkat menunjukkan upaya menurunkan biaya dana (seperti deposito) masih belum ditranmisikan pada penurunan bunga kredit.¹³

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana praktik *governance* pada perbankan Indonesia?
- b. Apa fokus perbaikan kinerja perbankan Indonesia jika dilihat dari aspek risiko?

II. Metode Penelitian

Guna mengetahui praktik *governance* pada perbankan Indonesia jika ditinjau dari aspek risiko sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan, maka digunakan pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Irawan dalam penelitian kualitatif, metodologi yang digunakan memiliki ciri yang unik. Ciri tersebut bermula dari permasalahan penelitian

yang dimulai dari pertanyaan luas dan umum, pengumpulan data yang fleksibel, terbuka dan kualitatif, serta penyimpulan temuan yang bersifat induktif dan tidak digeneralisasikan.¹⁴

Metode kualitatif juga dipilih karena metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.¹⁵ Selain itu metode ini juga dipilih karena memiliki karakteristik yang sama dengan ciri-ciri penelitian kualitatif.

Pendekatan kualitatif tersebut diharapkan dapat memahami fenomena sosial yang diteliti dengan gambaran yang bersifat holistic dengan melaporkan pandangan-pandangan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar belakang ilmiah.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena sosial yang ada melalui gambaran yang bersifat mendalam dan menyeluruh (*holistic*). Dengan kata lain penelitian ini dilakukan untuk memahami tindakan sosial yang bermakna. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman yang mendalam mengenai kinerja

¹³ Ibid, 2012.

¹⁴ Irawan, Prasetya, “*Logika dan Prosedur Penelitian, pengantar Teori dan Panduan Praktik Penelitian Sosial Bagi mahasiswa dan Peneliti Pemula*”, Jakarta : STIA LAN Press, 2004 hal 61.

¹⁵ Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, terjemahan Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal 5

perbankan Indonesia, praktik *governance* serta pemenuhan aspek-aspek risiko dalam perbankan Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu deskripsi atau gambaran tentang suatu keadaan. Sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah metode dekriptif kualitatif yang dilakukan pada sistem perbankan Indonesia. Dalam melakukan penelitian ini, pengumpulan data dari dua sumber, yaitu ; studi kepustakaan dan studi dokumenter.

Analisis data kualitatif adalah analisis yang dilakukan terhadap data-data non-angka seperti hasil wawancara atau catatan laporan bacaan dari buku-buku, artikel, dan termasuk non tulisan seperti foto, gambar atau film, dengan tujuan mencari suatu pola umum dalam bentuk diskripsi kata-kata.¹⁶ Mengacu kepada analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Neuman¹⁷, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan metode *narrative*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian adalah bank umum yang berada di bawah otoritas perbankan Indonesia (nasional), baik sebagai bank Persero, Bank Umum Swasta Nasional (Devisa dan Non Devisa), Bank Pembangunan Daerah, Bank

Campuran maupun Bank Asing. Adapun komposisi Bank Umum di Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

¹⁶ Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dan Panduan Praktika Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, STIA Lan Press, Jakarta, 2004 hal. 99

¹⁷ W. Lawrence Nauman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitatives approach*, Fifth Edition, Allyn and Bacon, Boston, 2003, hal 448-449

Tabel 1.1
 Komposisi Bank Umum

Kelompok Bank	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
							Jun
Bank Persero	5	5	5	4	4	4	4
Jumlah Kantor	2.548	2.765	3.134	3.854	4.189	4.362	4.781
BUSN Devisa	35	35	32	34	36	36	36
Jumlah Kantor	4.395	4.694	5.196	6.181	6.608	7.209	7.305
BUSN Non Devisa	36	36	36	31	31	30	30
Jumlah Kantor	759	778	875	976	1.131	1.288	1.316
BPD	26	26	26	26	26	26	26
Jumlah Kantor	1.217	1.205	1.310	1.358	1.413	1.472	1.518
Bank Campuran	17	17	15	16	15	14	14
Jumlah Kantor	77	96	168	238	263	260	261
Bank Asing	11	11	10	10	10	10	10
Jumlah Kantor	114	142	185	230	233	206	191
Total Jumlah Bank	130	130	124	121	122	120	120
Total Jumlah Kantor	9.110	9.680	10.868	12.837	13.837	14.797	15.372

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia 2012.

Informasi kinerja dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba-rugi). Neraca berisi informasi aset, kewajiban dan modal pada suatu waktu. Laporan laba-rugi berisi informasi mengenai hasil aktivitas bisnis dalam kurun waktu tertentu. Aset bank berupa cadangan (*reserves*), surat berharga dan kredit (*loans*). Kewajiban berupa simpanan

masyarakat (dana pihak ketiga) dan kewajiban lainnya (*non deposits*). Selisih nilai aset dan kewajiban adalah kekayaan bersih (*net worth*) atau modal (*capital*). Adapun laporan keuangan perbankan Indonesia selama 7 (tujuh) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
 Laporan Keuangan Bank Umum Nasional
 (dalam miliar rupiah)

Indikator	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
							Feb
A. Pendapatan operasional	212.499	219.653	262.061	298.180	350.873	390.779	73.662
B. Beban operasional	184.826	184.617	232.170	258.311	302.549	334.322	63.273
C. Laba Operasional	27.719	35.035	29.891	39.869	48.325	56.457	10.389
D. Pendapatan non-operasional	77.669	72.003	83.797	104.504	100.948	130.071	24.700
E. Beban non operasional	64.832	57.180	65.531	82.589	73.218	89.392	15.452
F. Laba non operasional	12.837	14.823	18.267	21.915	27.730	40.679	9.248

Indikator		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
								Feb
G.	Laba tahun berjalan	40.555	49.859	48.158	61.784	76.140	97.068	19.637
H.	Laba (setelah taksiran pph)	28.334	35.015	30.606	45.215	57.309	75.077	15.513

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2012

Pengukuran kinerja Perbankan Indonesia akan menggunakan rasio keuangan untuk mengukur baik buruknya kinerja sebuah bank. Rasio-rasio keuangan bank yang bersangkutan, yang berisi sebelas macam rasio, mulai dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR), hingga *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Net Interest Margin* (NIM), *Non Performing Loan Net* (NPL Net), *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Cost to Income*.

CAR menunjukkan kuat lemahnya struktur permodalan sebuah bank, dimana semakin besar angkanya, maka modal bank yang bersangkutan semakin kuat. NIM menunjukkan besarnya pendapatan bunga bersih (yang sudah dikurangi beban pokok) dibandingkan nilai aset yang menghasilkan

bunga tersebut. Semakin besar NIM ini, maka itu berarti bank-nya semakin menguntungkan. ROA dan ROE menunjukkan seberapa besar laba bersih yang dihasilkan bank yang bersangkutan, terhadap nilai aset dan ekuitasnya. *Net Profit Growth* menunjukkan pertumbuhan laba bersih pada tahun ini dibandingkan tahun lalu. Semakin besar angkanya maka semakin pesat pertumbuhannya. *NPL Net* menunjukkan rasio kredit macet dibanding total kredit yang disalurkan, dimana semakin kecil tentunya semakin bagus.

Adapun hasil kinerja dan rasio-rasio keuangan perbankan Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.3
 Rasio Kinerja Perbankan Indonesia

Indikator		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
								Feb
CAR (%) - Termasuk Risiko Operasional		21,27	19,30	16,76	17,42	17,18	16,05	18,41
•	Modal	183.391	211.176	238.270	268.601	323.246	404.698	456.022
•	ATMR	862.145	1.094.196	1.421.448	1.541.598	1.881.533	2.520.964	2.477.670
KAP								
•	APYD terhadap Aktiva Produktif (%)	3,91	3,03	2,95	2,83	2,36	2,00	2,21
-	APYD	61.192	56.026	66.144	69.856	65.071	66.472	72.162
-	Total Aktiva Produktif	1.565.103	1.851.990	2.242.282	2.464.256	2.762.578	3.326.566	3.283.014

Indikator		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
								Feb
•	PPAPYD terhadap PPAPWD (%)	126,88	193,95	168,12	157,55	130,69	114,28	104,55
-	PPAPYD	47.918	49.137	64.068	77.526	76.924	69.915	69.549
-	PPAPWD	37.767	25.335	38.108	49.208	58.860	61.179	66.520
Rentabilitas								
•	ROA (%)	2,64	2,78	2,33	2,60	2,86	3,03	3,62
-	Laba	40.555	49.859	48.158	61.784	75.157	95.555	117.457
-	Rata-rata total aset	1.538.821	1.792.481	2.067.044	2.372.152	2.625.033	3.150.826	3.247.910
•	BOPO (%)	86,98	84,05	88,59	86,63	86,14	85,42	85,96
-	Biaya Operasional	184.826	184.617	232.170	258.311	295.422	323.825	62.036
-	Pendapatan Operasional	212.499	219.653	262.061	298.180	342.937	379.120	72.167
Likuiditas								
•	Aktiva terhadap Pasiva-Likuid (%)	3,06	3,55	4,49	4,03	3,99	3,80	3,20
•	LDR (%)	61,56	66,32	74,58	72,88	75,21	78,77	79,43
-	Kredit	792.297	1.002.012	1.307.688	1.437.930	1.710.677	2.117.608	2.120.633
-	Dana Pihak Ketiga	1.287.102	1.510.834	1.753.292	1.973.042	2.274.489	2.688.364	2.669.949

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2012

Analisis kuantitatif akan memberikan gambaran untuk menganalisis kualitatif fungsi *governance* dan menjelaskan rasionalitas dan gagasan yang mendasarinya.

Regulasi tampak sangat didominasi pendekatan kuantitatif dan ukuran kehati-hatian. Perlakuan homogen terhadap semua bank tanpa mempertimbangkan aspek kualitatif (profil risiko, kompetensi dan reputasi). Norma regulasi belum mengadopsi secara penuh prinsip kesepakatan internasional. Sebagian besar ketentuan, seperti BMPK (sektor usaha, debitur dan geografik), LDR, belum mengacu pada norma internasional.

Praktik tradisional memiliki pandangan yang tidak simetris terhadap risiko-hasil. Risiko dipandang sebagai *the invisible and intangible uncertainty* yang dapat merugikan, sementara hasil merupakan produk sistem pelaporan dengan prinsip yang baku. Praktik tradisional hanya menetapkan eksposur risiko dan memastikan aktivitas menguntungkan.

Praktik modern dilakukan secara terpadu sehingga risiko dapat dieliminasi, dikendalikan dan dialihkan untuk mengurangi dampak buruk bagi kinerja mengingat keputusan menyangkut berbagai aspek risiko yang saling terkait. Praktik modern memandang imbalan sisi lain dari risiko.

Konsepnya adalah meminimalkan risiko untuk hasil yang maksimal.

Disharmonisasi regulasi menyebabkan ketidakstabilan dan daya saing yang rendah (membuka peluang *moral hazard* dan memperlemah sistem perbankan domestik). Perbankan yang sehat ternyata memiliki konsep yang luas dan tidak menyangkut permodalan semata. Bank-bank membutuhkan norma yang berlaku umum dan praktik terbaik melalui penerapan disiplin eksternal dan regulasi universal.

Pengawasan sangat fokus pada pemenuhan norma indikatif. Sejumlah rasio kehati-hatian, seperti KPMM, NPL, LDR, BMPK, GWM dan PDN merupakan alat pengawasan yang utama atau kriteria kesehatan dikaitkan dengan penegakan aturan berorientasi kepatuhan. Implikasinya proses pengawasan ditekankan pada pengawasan tidak langsung.

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa pengawasan yang berfokus pada pencapaian norma indikatif gagal mempertahankan viabilitas keuangan bank-bank dan justru mendorong perilaku yang kurang hati-hati. Risiko tidak sepenuhnya tampak pada rasio sehingga bank bertindak melampaui garis. Artikulasinya, pengawasan menuntut pendekatan yang lebih kualitatif dan proses yang sensitif risiko.

Pemilikan bank domestik di Indonesia masih didominasi kelompok keluarga dan negara. Perilaku bank semacam ini cenderung boros karena tujuan utamanya hanya mendukung kepentingan usaha kelompok atau pembangunan ekonomi.

Kepemilikan kelompok keluarga atau negara pada perbankan di Indonesia menghasilkan inefisiensi. Kinerja bank swasta (besar) yang dimiliki dan dikendalikan kelompok keluarga tersubordinasi di bawah kepentingan pemilik. Superioritas manajemen pemilik telah mendorong praktik rente. Sementara, bank pemerintah rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh kelompok berkuasa untuk kepentingan politik. Regulasi sedianya mampu mencegah konsentrasi kekuasaan.

Bankir-bankir sering mengambil risiko yang tidak patut. Bank seharusnya terlibat dalam risiko yang dapat dikelola lebih efisien atau risiko yang sangat khusus terkait dengan keberadaan bank. Penerapan *governance* di Indonesia menunjukkan bahwa *governance* internal dan pengelolaan yang lemah menambah postur risiko. Pengambilan risiko lebih berdasarkan selera pasar dan mengabaikan konsep kehati-hatian.

Pengelolaan risiko sedianya merupakan hasil proses bisnis normal yang melekat pada kegiatan sehari-hari pada level operasional, bukan sesuatu yang terpisah dan dikerjakan paruh waktu (tidak komprehensif). Opini eksternal audit terhadap laporan manajemen belum sepenuhnya menggambarkan profil risiko sesungguhnya dan menimbulkan kesenjangan atau klesahan persepsi.

Pemeringkatan masih sebatas pengelolaan data publik. Produknya belum dapat dijadikan basis kalkulasi risiko. Perbankan Indonesia belum mengenal fungsi lembaga pemeringkat sebagaimana di negara-

negara yang sudah memiliki tradisi pemerinkatan.

Para analisis keuangan gagal memberi pencerahan. Lembaga birokratis sulit diharapkan menghasilkan evaluasi yang memadai. Peranan lembaga pemerinkat, baik lokal maupun global dapat memainkan peranan penting dalam mencermati trend keuangan dan prospek bank-bank individual dan memberikan sinyal (kekuatan-kelemahan) sebelum informasi resmi hasil pengujian otoritas atau tindakan pengawasan.

Nasabah perbankan Indonesia masih mengutamakan keamanan dananya dan cenderung tidak membedakan lembaga keuangan bank dan non bank. Mencari pengetahuan semua faktor risiko dirasakan terlalu mahal dan kompleks bagi nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang potensial dirugikan tidak memiliki posisi tawar yang memadai.

Masyarakat pemilik dana tampak belum berfungsi sebagai komponen strategis perbaikan. Aspirasi masyarakat dalam bentuk kehati-hatian memilih bank dan tuntutan kualitas layanan yang lebih tinggi sesungguhnya menjadi salah satu sumber tekanan eksternal untuk memperbaiki *corporate governance* dan mendorong praktik yang sehat.

Dari elemen-elemen *governance* diatas dapat dilihat bahwa bank-bank belum sepenuhnya melaksanakan *governance* dalam kerangka risiko-risiko yang universal. Meminimalisir risiko bukan menjadi tujuan utama bank-bank, melainkan menetapkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini

dapat dilihat dari suku bunga kredit yang masih tinggi meskipun bank Indonesia sudah beberapa kali menurunkan suku bunga. Besarnya porsi deviden yang harus disetor kepada pemerintah membuktikan bahwa pemilik terlalu rakus dalam mengambil keuntungan. Jika porsi deviden tersebut dikurangi akan dapat meningkatkan ekspansi kredit dan memacu pertumbuhan ekonomi karena akan dijadikan tambahan laba ditahan dan dapat digunakan untuk penyaluran kredit infrastruktur bersuku bunga rendah.

Deviden yang disetorkan pemerintah akan menjadi salah satu unsur penerimaan di APBN. Namun penggunaan APBN Indonesia sering digunakan secara boros, digerogoti mafia anggaran dan dapat digunakan sebagai dana politik terselubung. Sebagai BUMN, Bank-bank tersebut termasuk bank-bank besar yang bisa menjadi penentu atau acuan bagi bank yang lain.

Bankir nasional disebut sebagai pelaku industri paling *boros* dalam pengeluaran operasional. Indikatornya adalah rasio BOPO yang masih besar. Selain faktor gaji karyawan, biaya promosi juga menjadi salah satu penyebabnya. Menurut Deputy Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah, di kawasan Asia hanya perbankan Indonesia yang menyediakan hadiah bagi nasabahnya. Hingga saat ini, program-program promosi yang menawarkan hadiah berupa peralatan elektronik, sepeda motor, dan mobil masih gencar dilakukan. Sementara perbankan luar negeri lebih memilih alat promosi seperti *sponsorship* untuk *social events* atau turnamen olah raga.

Lebih jauh, dalam komponen biaya tenaga kerja, remunerasi pejabat eksekutif terutama Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) dan Dewan Direksi (*Board of Directors*) mengambil porsi yang signifikan. Remunerasi tersebut mencakup gaji, tunjangan, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk natura seperti rumah dan kendaraan. Tantiem (bonus) merupakan pembagian keuntungan untuk direksi dan komisaris yang diberikan berdasarkan persentase atau jumlah tertentu dari laba bersih. Selain tantiem, beberapa bank juga masih memberikan opsi saham.

Hasil riset terhadap beberapa bank menunjukkan makin kecil aset bank, proporsi pengeluaran untuk BOC dan BOD terhadap total beban tenaga kerja justru makin besar. Hasil tersebut memang belum dapat menggambarkan secara jelas struktur remunerasi di industri perbankan Indonesia. Beberapa bank telah menerapkan sistem remunerasi berbasis kinerja, sementara beberapa bank lainnya tetap menaikan remunerasi meski kinerja bank sedang turun.¹⁸

Di Indonesia sendiri, hingga saat ini dapat dikatakan belum ada standar kebijakan remunerasi pejabat eksekutif bank yang jelas. Tidak ada ukuran standar batas atas dan batas bawah. Dalam beberapa Laporan Tata Kelola Perusahaan, kebijakan remunerasi bank masih mengacu pada kesepakatan pemegang saham dalam RUPS. Artinya, parameter yang digunakan tiap bank dapat berbeda setiap

tahunnya. Tidak adanya batasan standar membuat bank *boros* menawarkan tingkat remunerasi yang tinggi. Salah satu alasan yang sering mengemuka adalah kelangkaan bankir yang memiliki kapasitas sebagai eksekutif.

Besarnya pos pengeluaran untuk tenaga kerja tersebut mendorong terciptanya rasio BOPO (biaya operasional dan pendapatan operasional) yang tinggi. Mengacu pada statistik, dalam lima tahun terakhir rasio BOPO industri perbankan Indonesia berada pada kisaran 73 persen hingga 97 persen. Rata-rata BOPO dalam kurun waktu tersebut adalah 86,44 persen. Artinya pendapatan Rp1 mesti ditebus dengan pengeluaran Rp0,86.¹⁹ Besarnya rasio BOPO tersebut menunjukkan masih belum efisiennya industri perbankan nasional.

Industri perbankan yang merupakan “urat nadi” perekonomian masih belum berperan maksimal dalam menggerakkan sektor riil. Beberapa kalangan menuding bank di Indonesia sebenarnya belum sepenuh hati dalam mengucurkan kreditnya. Bank masih suka menanamkan dananya pada instrumen-instrumen investasi berisiko rendah seperti SBI dan Obligasi.

Masih tingginya suku bunga disinyalir menjadi salah satu sebab kecilnya penyaluran kredit. Meski suku bunga acuan BI *Rate* sudah terpangkas signifikan, bank masih bertahan pada level yang cukup tinggi. Dalam lima tahun terakhir rata-rata spread suku bunga rupiah perbankan nasional berada dalam

¹⁸ Stabilitas Perbankan edisi April 2011

¹⁹ (Lihat Tabel 5.2. Rasio BOPO Bank Umum Indonesia)

kisaran 4,63 persen-6,88 persen, sementara rata-rata *spread* suku bungadollar AS sebesar 2,41 persen-7,33 persen. Sebagai perbandingan, *Net Interest Spread* Singapura, Malaysia, dan Vietnam masing-masing pada kisaran 4,90 persen, 3,30 persen, dan 2,83 persen. Per Oktober 2011, Net Interest Margin bank umum di Indonesia mencapai 5,95 persen. Dengan *spread* yang lebar tersebut, perbankan nasional berhasil membukukan laba tinggi. *Return on Assets Ratio* dari 80 bank mencapai lebih dari 1,5 persen, dengan rata-rata bank umum mencapai 3,11 persen. Mungkin ini prestasi yang membanggakan, mengeruk untung di negeri sendiri.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Praktik *governance* pada perbankan Indonesia belum dilaksanakan dalam kerangka secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari regulasi belum mendorong konsistensi tetapi justru

menciptakan kesenjangan. Pengawasan yang masih lemah dan bersifat tidak langsung. Kepemilikan masih didominasi oleh kelompok keluarga dan negara. Manajemen belum optimal dalam pengelolaan risiko. Fungsi pemeringkatan yang belum digunakan secara optimal. Fungsi lembaga yang belum berhati-hati dengan risiko, khususnya menyangkut reputasi.

Komunitas perbankan Indonesia menggunakan kekuasaan secara boros dan terlibat rente yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok. Perbankan belum menggunakan penetapan risiko minimal sebagai tujuan utama, melainkan keuntungan yang menjadi tujuan utama. Hal ini mengakibatkan sulitnya penurunan suku bunga kredit dan perkembangan kredit perbankan. Masyarakat perbankan yang terpaku terhadap doktrin, jika Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan maka yang harus segera disesuaikan terlebih dahulu adalah *cost* bukan *revenue*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, terjemahan Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal 5
- Ariyanto, taufik., *Profil Persiapan Usaha Dalam Industri Perbankan Indonesia*, Perbanas Finance & Banking Journal, Vol. 6 No. 2 Desember 2004; 95-108.
- Bank Indonesia, Bank umum yang layak oprasi harus memiliki CAR, LDR dan NPL masing-masing 8%, 85% dan 5% (PBI No. 31/UPPB/1988).
- Eko B Supriyanto, *Budaya Kerja Perbankan ; Jalan Lurus Menuju Intregitas* (Jakarta : Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, 2006) hal 114-115.

- George G Kaufman, *Bank Problems : A Global Perspective* (Connecticut : jai Press Inc., 199) hal 171.
- Irawan, Prasetya, *Logika dan Prosedur Penelitian, pengantar Teori dan Panduan Praktik Penelitian Sosial Bagi mahasiswa dan Peneliti Pemula*, Jakarta : STIA LAN Press, 2004 hal 61.
- Joseph E Stiglitz, *Globalization and Its Discontent* (New York : W W Norton & Company, 2003 hal 10.
- Nasution, Darmin., Bunga Kredit Tetap Tinggi, *Majalah Tempo* Edisi 5 – 11 Maret 2012. Ibid, 2012.
- Toni A Prasetiantono et al., *Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, Jakarta : PT Elexmedia Komputindo, 2000 hal 8
- W Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*, Fifth Edition, Allyn and Bacon, 2003, hal 448-449.

INDUSTRI PERBANKAN YANG TERKONSENTRASI APAKAH TETAP DAPAT BERKOMPETISI? KASUS PERBANKAN SYARIAH

Sancoko^{1*}

¹Program Studi Administrasi Perkantoran dan Sekretari Program Vokasi Universitas Indonesia

ABSTRAK - Tulisan ini membahas tentang kondisi kompetisi pada industri perbankan di Indonesia, khususnya entitas Bank Syariah. Pemilihan Bank syariah menjadi objek penelitian karena secara kuantitatif mengalami pertumbuhan yang signifikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Sumber data yang digunakan berasal dari laporan tahunan individual Bank di situs Bank Indonesia sejak periode 2008-2011. Untuk mengukur aspek kompetisi antar Perbankan Syariah menggunakan metode *Panzar & Rosestatistic*. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa perbankan syariah masuk ke dalam struktur pasar *monopolistic competition*.

Kata kunci:

ABSTRACT - This paper discusses the conditions of competition banking industry in Indonesia, especially Islamic Banking entity. Islamic Bank became the object of research because significant growth in industrial banking. This study uses a quantitative approach with a descriptive design. Source of data used from individual bank's annual report on the website of Bank Indonesia from the period 2008-2011. To measure aspects of competition Islamic Banking using *Panzar & Rosestatistic* methods. Results of study showed that Islamic banking came into condition of *monopolistic competition* structure.

Keywords:

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Bank Syariah adalah Bank yang prinsip dasar operasional tidak mengenal konsep bunga. Transaksi keuangan syariah menggunakan konsep kemitraan/kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Ekonomi Islam

berbeda dari kapitalisme dan sosialisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan walaupun disatu sisi kepemilikan atas harta individu tetap diizinkan yang dikedepankan ialah nilai-nilai keadilan.

Dalam literature ekonomi dapat kita ketahui terdapat 4 jenis struktur pasar yaitu: Pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, pasar oligopoli dan pasar monopoli. Dari keempat struktur pasar itu yang paling terbaik ialah struktur pasar

persaingan sempurna. Salah satu kelebihan pasar persaingan sempurna ialah kebebasan ***bertindak dan memilih***. Di dalam pasar yang bebas tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis-jenis barang yang diproduksi. Begitu pula dalam menentukan bagaimana faktor-faktor produksi digunakan dalam masyarakat, efisiensi lah yang menjadi faktor yang menentukan pengalokasiannya. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang mendekati keadilan.

Dengan adanya kebebasan untuk memproduksi berbagai jenis barang maka masyarakat dapat mempunyai pilihan yang lebih banyak terhadap barang-barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Lawan dari pasar persaingan sempurna ialah pasar monopoli dimana suatu industri hanya dikuasai oleh satu perusahaan saja. Persaingan di dalam struktur pasar monopoli boleh dikatakan hampir tidak ada. Dalam kegiatan usaha di Indonesia terdapat larangan melakukan monopoli, Hal ini didukung dengan dikeluarkannya UU no 5 tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu di Indonesia terdapatnya lembaga anti monopoli yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU).

Pada penelitian saya terdahulu (sancoko,2012) diketahui bahwa kondisi industri perbankan syariah dalam kondisi struktur pasar oligopoli yang *high concentrated*. Dengan metode pendekatan *Concentration Ratio(CR4)* penguasaan empat

perusahaan utama dalam hal 3 aspek perbankan yaitu asset, kredit dan dana pihak ketiga rata-rata diatas 89 persen. Sedangkan dengan pendekatan *Herfindahl Hirschman Indeks(HHI)* untuk tiga aspek perbankan yang sama memiliki nilai rata-rata diatas 2900 point, hal ini menunjukkan industri perbankan syariah dalam kondisi *high concentration*.

Permasalahan

Apakah struktur pasar perbankan syariah yang terkonsentrasi memungkinkan terjadinya persaingan (kompetisi) dalam industri tersebut?

II. Tinjauan Pustaka

a. *Contestable Market*

Pandangan ini dikembangkan oleh William J. Baumol (1982), dalam pendekatan ini dijelaskan bahwa laba yang berlebihan akan menarik perusahaan-perusahaan baru untuk masuk pasar, hal ini disebabkan biaya masuk(*Entry*) yang rendah. Bentuk pasar ini dapat diistilahkan dengan pasar yang diperebutkan (*Contestable Market*) atau dapat digambarkan kondisi pasar dikuasai oleh satu pemain saja (dalam kondisi monopoli) namun tidak menutup terjadinya persaingan usaha. Syarat sebuah pasar dikondisikan dalam *Contestable Market* adalah:

1. Adanya Kebebasan untuk masuk atau keluar pasar (*no entry or exit barriers*)
2. Biaya *sunk cost* minimum

Keputusan memasuki pasar oleh sebuah produsen tidak berhubungan dengan kondisi struktur internal pasar baik pasar itu dalam

kondisi *monopoly* ataupun *oligopoly*. Pandangan ini mengatakan bahwa kondisi "*free entry*" mempengaruhi langsung kinerja pasar, sebuah industri dapat saja dikuasai oleh satu atau sedikit perusahaan namun perusahaan baru yang potensial dapat masuk atau keluar dari sebuah pasar dengan cepat tanpa kehilangan modalnya atau tidak ada *sunk cost*. Dengan tiadanya *sunk cost* hal ini menyebabkan perusahaan lama (*incumbent*) menghadapi kondisi *hit and run* dalam menghadapi kondisi persaingan pasar yang ada.

Hal ini menyebabkan perusahaan baru yang potensial dapat masuk dan keluar industri dengan mudah (*free entry*) dan tidak harus menunggu sampai mendapat tingkat penerimaan tertentu untuk menutup *sunk cost*. Dalam industri yang *contestable* perusahaan baru yang potensial memiliki fungsi biaya yang sama dengan perusahaan lama. Untuk mengetahui perilaku persaingan yang bersifat *contestable* atau *non contestable* ini berkembanglah metode pengukuran non-struktural seperti yang dilakukan oleh Bresnahan-Lau(1981) dan Panzar-Rose(1987). Metode non-struktural tersebut mengukur perilaku persaingan perbankan tanpa menggunakan informasi struktur pasar secara eksplisit. Pengukuran perilaku persaingan dilakukan dengan melihat perbedaan struktur biaya dari harga persaingan.

III. Metode Penelitian

a. Jenis dan Sumber Data

i. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data Panel yang bersumber dari data laporan keuangan publikasi *individual* bank (data *unaudited*) yang berada pada situs Bank Indonesia serta situs masing-masing perusahaan bank. Data yang digunakan ialah data setiap bulan desember yang dianggap sebagai data laporan tahunan, data ini diambil sejak tahun 2008 hingga tahun 2011.

ii. Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang lain yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2000).

b. Metode Analisis

i. Panzar Rosse-H Statistik atau PR-H statistic

Salah satu teknik pengukuran yang digunakan untuk mempelajari kondisi persaingan dalam industri perbankan adalah kerangka Panzar dan Rosse (1987) atau disebut PR-H statistik. Kerangka PR-H statistik mempelajari dampak dari perubahan harga input (biaya) terhadap keseimbangan (*ekuilibrium*) pendapatan yang tergantung pada struktur pasar dimana bank tersebut beroperasi dalam sistem industri perbankan. Persamaan ini diturunkan dari model umum keseimbangan pasar perbankan. Dimana penentuan *output* keseimbangan dan keseimbangan jumlah

bank dengan memaksimalkan keuntungan pada level bank secara individu maupun pada tingkatan industri.

Panzar & Rose menjelaskan bahwa dalam kondisi monopoli, kenaikan harga input akan meningkatkan *marginal cost* mengurangi *output* ekuilibrium dan kemudian mengurangi pendapatan; maka H akan menjadi nol atau negatif (Bikker dan Haaf, 2002). Dengan kata lain, pasar di mana terdapat kekuatan monopoli akan menghasilkan hubungan negatif antara kedua *variabel*, karena pendapatan kotor akan bergerak berlawanan arah dari perubahan unit *cost*. Logika ekonominya adalah bahwa penetapan harga *output* monopoli tidak tergantung pada perubahan harga input.

Dalam menganalisis kondisi *monopolistic competition*, pendekatan Panzar & Rose mendasarkan pada analisis statika komparatif dari model keseimbangan persaingan monopolistik Chamberlinian (Bikker dan Haaf, 2002). Dalam kasus persaingan monopolistik produk bank dianggap sebagai substitusi yang sempurna satu sama lain model Chamberlinian menghasilkan solusi kompetisi yang sempurna, karena elastisitas permintaan mendekati tak terhingga (Bikker dan Haaf, 2002). Dalam pasar persaingan sempurna, peningkatan harga input akan meningkatkan rata-rata biaya secara proporsional. Keluarnya beberapa bank akan meningkatkan permintaan yang dihadapi oleh bank-bank yang tersisa,

yang menyebabkan kenaikan harga dan pendapatan yang setara dengan kenaikan biaya (Bikker dan Haaf: 2002). Akhirnya, nilai H di pasar persaingan sempurna adalah sama dengan satu.

Pada kasus *monopolistic competition* nilai H *statistics* akan bernilai antara 0 dan 1, $0 < H < 1$. Nilai H yang positif menunjukkan bahwa datanya konsisten dengan persaingan monopolistik. Meskipun bank berperilaku seperti monopolis, kondisi *entry* dan *exit* bank lain yang menawarkan persaingan produk yang tidak sempurna menjadikan mereka mendapatkan keuntungan normal. Dalam kasus *monopolistic competition*, bank menghasilkan *output* yang lebih banyak dan menerapkan harga yang lebih rendah dibandingkan kondisi monopoli murni.

Dalam merespon kenaikan harga input, bank akan menaikkan harga (baik untuk tingkat bunga pinjaman) sampai mereka bisa menutup naiknya biaya untuk tetap bertahan dalam persaingan. Selama proses ini, bank yang tidak efisien mungkin akan diakuisisi oleh bank lain atau harus keluar dari pasar. Keluarnya beberapa perusahaan meningkatkan permintaan yang dihadapi oleh bank yang masih ada, yang mengakibatkan naiknya harga dan penerimaan yang sepadan dengan naiknya biaya. Sedangkan di pasar oligopoli, nilai H dapat juga bernilai positif, yakni ketika terdapat interaksi strategis antara

sejumlah bank dengan jumlah yang tetap (Bikker dan Haaf, 2002).

Tabel 1.1
 Klasifikasi H-Stat

Ringkasan Kekuatan Diskriminasi	
Nilai H	Lingkungan yang kompetitif
$H \leq 0$	Keseimbangan Monopoli: masing-masing bank beroperasi secara independen dan maksimisasi keuntungan layaknya di bawah kondisi monopoli (H adalah fungsi menurun dari elastisitas permintaan) atau kartel sempurna.
$0 < H < 1$	Keseimbangan persaingan monopolistik dengan kondisi free entry (H merupakan fungsi menaik dari elastisitas permintaan).
$H = 1$	Persaingan sempurna. Ekuilibrium free entry dengan utilisasi kapasitas penuh yang efisien.

Sumber: Bikker & Haaf (2002)

ii. Model yang digunakan

Penerapan kerangka PR dalam penelitian ini memerlukan dua asumsi yang perlu diterapkan dalam. **Pertama**, bank diperlakukan sebagai perusahaan dengan produk tunggal yang bertindak sebagai *perantara keuangan* (peran intermediasi). Oleh karena itu bank menghasilkan pendapatan bunga dengan menggunakan dana, tenaga kerja dan modal fisik sebagai input (De Bandt dan Davis, 2000). Dalam penelitian ini penulis mempertimbangkan *total revenue* sebagai proksi dari pendapatan total (*total income*), hal ini didasarkan fakta

bahwa Perbankan Syariah tidak menghasilkan pendapatan dari bunga. *Variabel* dependen dibagi oleh total aset untuk memperhitungkan perbedaan dari *size* bank. **Kedua** diasumsikan bahwa biaya input yang tinggi tidak berhubungan dengan kualitas layanan yang lebih tinggi yang menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi (Gelos dan Roldos; 2001). Jika terdapat korelasi, mungkin ada bias dalam menafsirkan nilai H statistic, model operasional dari bentuk susut penerimaan yang akan diuji adalah sebagai berikut:

$$\ln(T_{Pend}) = C + \alpha_1 \ln(B_{personil}) + \alpha_2 \ln(B_{bunga}) + \alpha_3 \ln(\ln B_{Fisik}) + \alpha_4 \ln(Y_{ekuitas}) + \alpha_5 \ln(Y_{Kredit}) + \epsilon_{it} \tag{3.10}$$

Sumber: Ariss (2009)

Model ekonometrika ini penulis adaptasikan dari penelitian rima turk

ariss (2009), dimana *variabel* ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu *variabel* terikat

(dependen) dan *variabel* independen. Semua *variabel* terikat dan *variabel* bebas dibagi dengan asset, penggunaan asset sebagai *variabel* pembagi berfungsi untuk mengatasi perbedaan *size* bank yang menjadi sampel penelitian. *Variabel* ini berbentuk *logaritma natural* (*ln*), *variabel* terikat berasal dari rasio total pendapatan terhadap *total asset*, keputusan untuk memasukkan *total revenue* sebagai *proxy* total pendapatan didasarkan kepada prinsip bank syariah yang tidak mengenal bunga sebagai pendapatan.

Sementara untuk *variabel* bebas terdiri dari dua kelompok yaitu, ***variabel* input utama** serta ***variabel* Bank Spesific**

***Factor* (BSF)** dari suatu bank. Untuk *variabel* input utama terdiri dari rasio beban personalia terhadap total asset, kedua adalah rasio biaya pendanaan yang diwakili oleh rasio beban bunga dibanding total deposito, yang ketiga adalah rasio beban operasional lainnya terhadap total asset. Untuk *variabel* bank spesifik *factor* terdiri dari dua bagian yaitu; Pertama, rasio dari ekuitas terhadap total asset yang berfungsi mengontrol perbedaan modal. Kedua adalah rasio kredit bersih terhadap total asset berfungsi sebagai *proxy* derajat tingkat intermediasi bank. Definisi operasional dari model di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.2
 Model Operasionalisasi Untuk Bank Syariah

Variabel	Proksi	Indikator (cara perhitungan)
$\ln T_{pend}$	Total pendapatan	$\frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Total Aset}}$
$\ln B_{personil}$	Biaya tenaga kerja	$\frac{\text{Beban personalia}}{\text{Total Aset}}$
$\ln B_{bunga}$	Biaya finansial	$\frac{\text{Bagi hasil untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat}}{\text{Dana Pihak ketiga}}$
$\ln B_{Fisik}$	Biaya modal fisik	$\frac{\text{Beban Operasional lainnya- beban personalia}}{\text{Total Aset}}$
$\ln Y_{ekuitas}$	Perbedaan modal	$\frac{\text{Ekuitas}}{\text{Total Aset}}$
$\ln Y_{Kredit}$	Intermediasi	$\frac{\text{Kredit}}{\text{Total Aset}}$

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Variabel Utama Bank Syariah

Untuk menentukan kondisi kompetisi pasar industri Perbankan Syariah pada periode 2008- 2011 berdasarkan nilai *H-stat*,

dimana nilai *H-stat* merupakan penjumlahan dari nilai koefisien $\alpha_1 (B_{personil}) + \alpha_2(B_{bunga}) + \alpha_3 (B_{Fisik})$. Berdasarkan pengolahan e-views didapatkan nilai *H stat* bank syariah pada tabel berikut:

Tabel 1.3
 Nilai H-Stat Bank Syariah

Variabel	Nilai	Prob	Sig
ln B _{personil}	0.480579	0.0000	***
ln B _{bunga}	0.256467	0.0042	***
ln B _{Fisik}	-0.025947	0.6298	
ln Y _{ekuitas}	-0.103688	0.0059	***
ln Y _{Kredit}	-0.040934	0.2570	
R-squared	0.921608		
H-stat	0.737046		

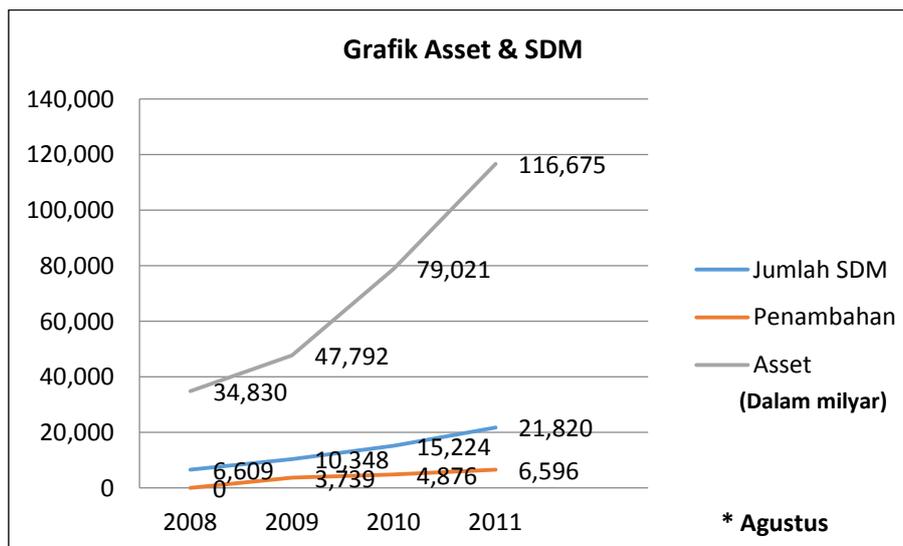
Sumber: data diolah

***Nilai sig ditingkat 1%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai H-stat yang berasal dari penjumlahan α_1 (B_{personil}) + α_2 (B_{bunga}) + α_3 (B_{Fisik}) sebagai input utama Perbankan Syariah senilai 0.737046. Untuk nilai beban fisik tidak dimasukkan kedalam perhitungan karena secara nilai tidak signifikan secara statistik. Dari ketiga *variabel* input tersebut nilai terbesar berasal dari *variabel* beban personil. Nilai koefisien beban personil sebesar 0.480579. Hal ini berarti bahwa peningkatan

sebesar 10% pada *variabel* beban personil maka akan meningkatkan pendapatan bank syariah sebesar 4.80 persen. Peningkatan koefisien biaya personalia sejalan dan sebagai konsekuensi logis meningkatnya jumlah bank syariah yang baru.

Pada Cetak Biru Perbankan Syariah Nasional 2010-2015 dijelaskan bahwa pengembangan human capital merupakan salah satu pilar penting dari enam pilar strategis pengembangan perbankan syariah nasional. Di samping itu tumbuh pesatnya industri perbankan syariah dari sisi jumlah bank, jaringan kantor maupun meningkatnya volume usaha dan ragam produk perbankan syariah menuntut tersedianya sumberdaya manusia dalam kuantitas dan kualitas yang semakin meningkat. Perbandingan jumlah perkembangan asset dan perkembangan sumber daya manusia (SDM) dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2012 diolah

Gambar 1.1
 Perbandingan Asset dengan SDM Bank Syariah

Berdasarkan gambar diatas terlihat pada tahun 2008 berjumlah jumlah SDM yang bekerja di perbankan syariah 6.609 orang, kemudian pada akhir desember 2011 berjumlah 21.820 orang. Hal ini menunjukkan terjadinya kenaikan jumlah sumber daya manusia sebesar 246 persen. Jumlah bank umum syariah dalam 5 tahun terakhir meningkat dari 5 bank menjadi 11 bank, dan kantor bank syariah dalam 5 tahun terakhir meningkat rata-rata 24,5% pertahun. Secara kuantitas tentu saja bank membutuhkan sumberdaya insani untuk memenuhi kebutuhan diberbagai posisi dan jabatan. Berdasarkan data diatas secara rata-rata perorang SDM bank syariah pada akhir tahun 2011 di perbankan syariah mengelola asset sebesar Rp 5.35 milyar.

Peningkatan kompleksitas dan persaingan usaha ini menuntut semakin tingginya kualifikasi dan keahlian pada bidang-bidang yang masuk dalam “pekerjaan strategis” seperti untuk fungsi manajemen risiko, *treasury*, pengembangan produk, marketing, IT dan sebagainya. SDM yang dicari dan dibutuhkan oleh bank syariah adalah SDM yang lebih dari sekedar bankir, SDM yang multi dimensi, yang memiliki kompetensi lintas keilmuan. Ia harus memiliki kompetensi sebagai seorang ahli investasi, sekaligus ahli keuangan dan perbankan, beretika serta memahami *sharia compliance*.

Sumbangan terbesar kedua berasal dari rasio beban bagi hasil (bunga=konvensional) dibanding dana pihak ketiga (DPK) yang memiliki nilai koefisien sebesar 0.256467. Hal

ini dapat diartikan bahwa peningkatan sebesar 10 persen pada beban bagi hasil akan meningkatkan pendapatan bank syariah sebesar 2.56 persen. Dengan memiliki dana pihak ketiga yang besar, maka kapasitas pembiayaan dari perbankan syariah menjadi lebih tinggi. Sehingga perbankan dapat memberikan pembiayaan (tidak hanya kredit) lebih besar kepada pihak yang membutuhkan. Dengan melakukan pembiayaan yang lebih besar akan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi bank syariah.

Sedangkan untuk nilai *variabel* beban fisik bernilai negative sebesar -0.032861 dan tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan penggunaan beban fisik belum dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi perbankan syariah. Pengeluaran perbankan syariah untuk peningkatan infrastruktur perbankan dan pengeluaran dalam bentuk promosi iklan belum diperlukan dalam meningkatkan *variabel* pendapatan. Berbeda dengan bank konvensional yang lebih besar secara kuantitas karena perbankan konvensional memiliki cakupan wilayah operasional dan layanan yang diberikan kepada konsumen lebih luas. Hal ini berimplikasi semakin besarnya beban fisik yang diperlukan oleh perbankan konvensional.

II. Variabel *Bank Specific Factor* Perbankan Syariah

Dari tabel diatas dua *variabel* bank spesifik faktor yang terdiri dari ekuitas serta kredit memiliki nilai koefisien yang negatif.

Dimana nilai *variabel* ekuitas signifikan secara statistik namun mempunyai nilai yang berbanding terbalik (nilai yang negatif) yaitu sebesar -0.103688. Hal ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekuitas yang besar tidak dapat digunakan secara maksimal oleh perbankan syariah untuk mendapatkan

keuntungan. Pertumbuhan modal yang besar di perbankan syariah tidak secara mutlak akan mendapatkan pendapatan yang besar pula. Data perubahan tingkat pendapatan, ekuitas dan kredit untuk perbankan syariah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4
 Data Perubahan pendapatan, ekuitas & kredit

(Rp. Juta)

Tahun	Pendapatan	%	Ekuitas	%	Kredit	%
Tahun 2008	634,337.00	0.00%	2,994,238.00	0.00%	10,515,311.00	0.00%
Tahun 2009	578,336.00	-8.83%	3,418,259.00	14.16%	12,742,186.00	21.18%
Tahun 2010	966,570.00	67.13%	8,287,653.00	142.45%	19,484,009.00	52.91%
Tahun 2011	1,484,610.00	53.60%	10,251,203.00	23.69%	24,318,551.00	24.81%

Sumber: diolah

Berdasarkan data tabel perubahan terhadap pendapatan sebelum pajak, ekuitas dan kredit menunjukkan bahwa secara kuantitas jumlah ekuitas serta jumlah pembiayaan selalu bertambah dari tahun ketahun. Pertumbuhan ini tidak diiringi dengan pendapatan yang selalu meningkat. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2009 dimana ekuitas, net loan bertambah sebesar 14,16 persen dan 21.18 persen justru pendapatan perbankan syariah mengalami penurunan pendapatan bersih sebesar - 8.83 persen. Penulis melihat

turunnya jumlah pendapatan industri perbankan syariah ini disebabkan masuknya bank-bank baru ke industri perbankan syariah bukanlah bank yang mempunyai tingkat pendapatan bersih yang baik seperti bank panin syariah. Untuk nilai *variabel* pembiayaan (kredit) memiliki nilai yang negative yaitu sebesar -0.040934 dan tidak signifikan secara statistik. Komposisi pembiayaan (kredit) dalam perbankan syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5
 Komposisi Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia

(Rp juta)

Pembiayaan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Mudharabah	3,124	4,062	5,578	6,205	6,597	8,631	10,229
Kontribusi (%)	20.51%	19.87%	19.96%	16.25%	14.07%	12.66%	9.96%
Musyarakah	1,898	2,335	4,406	7,411	10,412	14,624	18,960

Pembiayaan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kontribusi (%)	12.46%	11.42%	15.77%	19.40%	22.21%	21.45%	18.47%
Murabahah	9,487	12,624	16,553	22,486	26,321	37,508	56,365
Kontribusi (%)	62.28%	61.75%	59.24%	58.87%	56.14%	55.01%	54.91%
Salam	0	0	0	0	0	0	0
Kontribusi (%)	0	0	0	0	0	0	
Istishna	282	337	351	369	423	347	326
Kontribusi (%)	1.85%	1.65%	1.26%	0.97%	0.90%	0.51%	0.32%
Ijarah	316	836	516	765	1,305	2,341	3,839
Kontribusi (%)	2.07%	4.09%	1.85%	2.00%	2.78%	3.43%	3.74%
Qardh	125	250	540	959	1,829	4,731	12,937
Kontribusi (%)	0.82%	1.22%	1.93%	2.51%	3.90%	6.94%	12.60%
Total	15,232	20,444	27,944	38,195	46,887	68,182	102,656

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2013 diolah

Berdasarkan hasil tabel diatas diketahui bahwa komposisi pembiayaan masih didominasi pembiayaan yang mempunyai akad murabahah. Akad murabahah merupakan pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Dimana secara rata-rata nilai untuk transaksi ini mencapai 58.31 persen, lebih dari separuh kegiatan pembiayaan menggunakan transaksi ini. Padahal sejatinya kegiatan akad mudarabah dan musyarakah dalam perbankan syariah merupakan cerminan dari ekonomi Islam yang menjunjung keadilan, dimana istilah untung dan rugi ditanggung bersama (*profit and loss sharing*) berlaku.

Dalam beberapa kajian keagamaan pembiayaan jual beli (akad murabahah) ini diperbincangkan kehalalannya. Andriansyah (2009) menjelaskan dimana sebagian ulama berpendapat bahwa akad ini bukanlah akad jual beli melainkan *hilah* untuk mengambil

riba. Selain itu ada pula anggapan bahwa akad ini merupakan contoh dari *bay'al-ma'dûm* atau jual beli yang tidak ada objeknya, atau akad ini dianggap sebagai *bay'atani al-bay'ah* atau dua kali akad jual beli padasatu barang. Dimana secara fikih hal ini merupakan suatu kegiatan yang haram dikerjakan. Berdasarkan nilai H-stat diatas didapatkan nilai H-stat perbankan syariah sebesar 0.737046. Berdasarkan hasil perhitungan itu bentuk pasar perbankan syariah masuk kedalam kategori *monopolistic competition*. Bahkan nilai H-stat perbankan syariah ini cenderung mengarah kepada kondisi persaingan sempurna.

III. Apakah kondisi perbankan syariah cukup Kompetitif?

Sedikit mengulangi pemahaman yang baik tentang definisi *contestable market*, yaitu bentuk pasar yang didalamnya terdapat dominasi/penguasaan oleh satu atau sedikit pelaku industri terhadap pasar namun tidak menutup pelaku industri baru yang potensial.

Hal ini dapat diistilahkan dengan tidak adanya *barrier to entry* bagi pemain baru yang dibentuk yang disebabkan oleh biaya, kebijakan maupun teknologi. Pasar yang ada walaupun didominasi oleh satu perusahaan saja tetap menjadi bentuk pasar yang kompetitif.

Tidak terdapatnya *barrier to entry* merupakan salah satu ciri dari persaingan sempurna. Selain itu ciri lain dari pasar persaingan sempurna ialah homogenitas produk (kesamaan produk). Homogenitas

produk ialah produk yang memberikan kepuasan yang sama kepada konsumen tanpa melihat siapa yang memproduksi. Salah satu input yang diperlukan oleh bank untuk mendapatkan keuntungan ialah dana pihak ketiga salah (co: deposito). Bank harus menciptakan produk yang diinginkan oleh konsumen. Preferensi konsumen dalam memilih bank syariah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.6
 Alasan Konsumen Memilih Bank Syariah

No	Alasan*	Total	Muamalat	Syariah Mandiri	BRI Syariah	BNI Syariah	Bukopin Syariah	Permata Syariah	Lainnya
1	Kesesuaian dengan syariat Islam	48.9	46.9	52.2	53.3	52.7	36.5	51.2	46.2
2	Terhindar dari sistem riba	37.9	42.5	41.3	24	41.9	21.2	27.9	61.5
3	Aman	16.3	15.5	22.5	12	16.2	9.6	11.6	23.1
4	Lokasi bank dekat dengan kantor	12.7	14.5	13	4	6.8	21.2	20.9	7.7
5	Bagi hasilnya tinggi	12.5	11.1	12.3	8	12.2	13.5	25.6	15.4
6	Pelayanannya memuaskan	10.9	6.3	12.3	10.7	24.3	7.7	16.3	0
7	Payroll	9.4	11.1	8	13.3	8.1	11.5	0	7.7
8	Ada fasilitas ATM	8.3	6.3	11.6	8	10.8	7.7	0	15.4
9	Transfer gaji	7.5	6.3	3.6	16	10.8	9.6	0	11.5
10	Dari kantor	6.3	12.1	4.3	6.7	0	5.8	0	0
11	Lokasi bank dekat dengan rumah	5.9	3.9	8	4	9.5	5.8	7	3.8
12	Customer servicenya ramah	3.9	3.9	5.8	1.3	2.7	1.9	9.3	0
13	Memiliki jaringan ATM bersama	3.3	3.9	3.6	1.3	5.4	0	0	7.7
14	Ada fasilitas umrah haji	1.3	0.5	2.9	1.3	0	1.9	2.3	0
15	Administrasinya lebih murah	1	1	0	1.3	2.7	0	2.3	0
16	Lainnya	3.2	2	5.6	2.6	1.4	3.8	2.3	3.8
	Total	189.1	187.4	207.2	168	205.4	157.7	176.7	203.8

Sumber : Survey Mars Indonesia(2008)

*Boleh memilih lebih dari satu alasan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 16 faktor yang menjadi preferensi(alasan) nasabah untuk menyimpan dana yang dimiliki pada Bank Syariah. Dari keenam belas faktor itu terdapat lima faktor peringkat atas yang mendasari nasabah menggunakan bank syariah antara lain: sesuai syariat, terhindar dari sistem riba, aman, lokasi dekat kantor, dan bagi hasilnya tinggi. Terlihat dari hasil survei yang menjadi 2 alasan utama (yang menduduki peringkat atas) nasabah memilih bank syariah adalah karena faktor emosional. Hal ini tercermin dari dua alasan terbesar nasabah (sebesar 86,8 persen) menyimpan dananya di bank syariah karena bank syariah sesuai dengan syariat Islam, dan dapat terhindar dari riba, sementara sisanya merupakan faktor yang bersifat fungsional. Sealey (1977) mengatakan:

“ The depository financial firm's output in a technical sense is thus a set of financial services to the firm's depositors (creditors) and borrowers”

Berdasarkan pernyataan itu dapat dipahami bahwa fungsi dari lembaga keuangan (bank) ialah memberikan sejumlah jasa pelayanan keuangan. Dalam pandangan *intermediation approach* ada tiga faktor input dalam industri keuangan yaitu; tenaga kerja, modal fisik dan deposito untuk menghasilkan *output*(keuntungan). Untuk mendapatkan deposito (dana pihak ketiga) maka perusahaan keuangan harus memenuhi keinginan konsumen berupa “ jasa layanan keuangan”.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nasabah perbankan syariah lebih merupakan nasabah yang mengedepankan nilai-nilai emosional yang berfokus pada keuntungan emosional. Dalam pendekatan struktur pasar hal ini menunjukkan bahwa produk layanan (“*nilai manfaat*”) antara satu bank syariah yang satu (misal: Bank Muamalat dengan Bank Syariah Mandiri) dengan bank syariah lainnya merupakan produk yang identik (*homogenous*) karena sama-sama mempunyai nilai sesuai dengan syariat, memberikan kepuasan yang sama. Ketika konsumen menganggap barang yang diproduksi (*jasalayanan*) mempunyai bentuk yang sama, maka terdapat bentuk substitusi langsung terhadap suatu produk. Hal ini mengakibatkan biaya untuk masuk pasar tidaklah besar, karena konsumen tidak mengutamakan tuntutan bentuk fisik dari layanan (kantor cabang, atm dll). cukup sebuah industri perbankan dapat membuktikan bahwa produknya sesuai syariat.

Persaingan di industri perbankan syariah diuntungkan dengan kondisi nasabah yang tidak mengedepankan aspek fungsional bank yang berupa tampilan fisik antara lain tersedianya ATM, faktor lokasi,banyaknya cabang atau pelayanan yang ramah. Ketika sebuah bank dapat membuktikan dirinya “sesuai syariat” maka pasar perbankan syariah dapat disebut sebagai pasar yang *contestable* karena tidak terdapatnya *barrier to entry* ke pasar berupa teknologi atau kebijakan. Dalam

kasus perbankan syariah derajat *contestability* lebih tinggi karena produk bank (“*layanan simpanan*”) menjadi komoditi yang homogen sehingga persaingan cenderung menjadi lebih sempurna. Sebuah pasar disebut *contestable market* jika biaya dari bank yang masuk industri sama dengan biaya dari bank yang dominan. Meskipun beberapa bank terbesar mendominasi pasar namun tetap memperoleh normal profit seperti bank yang lebih kecil.

KESIMPULAN DAN SARAN

I. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas diketahui terdapat kompetisi antar bank syariah di industrinya meskipun dengan metode penghitungan *concentration ratio* dan HHI kondisi industri perbankan syariah dalam kondisi *high concentration*. Diketahui nilai *H-stat* untuk perbankan syariah adalah 0.737046, hal ini menggambarkan pasar dalam kondisi *monopolistic competition*. Nilai *H-stat* ini memiliki kecenderungan mendekati kondisi pasar persaingan sempurna

(mendekati nilai 1). Jika dilihat secara spesifik sumbangan terbesar nilai *H-stat* berasal dari *variabel* beban personil yaitu sebesar 48,05 persen. Sedangkan sumbangan terbesar kedua berasal dari *variabel* beban bunga (bagi hasil) yaitu sebesar 25,64 persen.

II. Saran

- Untuk perbankan syariah kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang perlu dipenuhi dalam meningkatkan pendapatannya karena sifat SDM di industri Perbankan Syariah mempunyai sifat yang unik.
- Hendaknya perbankan syariah memfokuskan pembiayaan terhadap kegiatan yang berbasis pada akad *musyarakah* dan *mudharabah*, karena pada akad itulah tercermin keadilan dari ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim. Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam- Analisis Fiqih dan Keuangan*. Cet.4. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Andriansyah, Yuli. 2009. “*Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional*”, *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*.3.
- Ariss. Rima Turk. 2010. “*Competitive conditions in Islamic and conventional banking: A global perspective*”. *Review of Financial Economics*, 19:101-108.
- Ariyanto, T. 2004. “*Profil Persaingan Usaha Dalam Industri Perbankan Indonesia*”. *Perbanas Finance and Banking Journal*. 6: 95-108.

- Baltagi, B. H. 2001. *Econometric Analysis of Panel Data*. 2nd edition. Chichester: Wiley & Sons.
- Bank Indonesia. 2012. *Laporan Keuangan Publikasi Bank Indonesia-www.bi.go.id*. Jakarta.
- Bikker, Jacob A., dan Katharina Haaf. 2002. "Competition, concentration, dan their relationship: An empirical analysis of the banking industry". *Journal of Banking and Finance*. 26: 2191-2214.
- Chapra, M. Umar. 2000. "Is it necessary to have Islamic economics?". *Journal of Socio-Economics*. 29:21-37.
- De Bandt, O., dan Davis, E.P., 2000. "Competition, contestability and market structure in European banking sectors on the eve of EMU". *Journal of Banking and Finance*, 24:1045-1066
- Gilbert, Alton R. B. 1984. "Bank Market Structure and Competition: A Survey". *Journal of Money, Credit and Banking*. 16:617-660.
- Gujarati, Damodar. 1995. *Basic Econometrics*, 3rd Edition. New York: Mc Graw Hill. Inc.
- Hasan, M. Iqbal. 2000. *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensi)*. Cet. 2. Jakarta: Bumi Aksara
- Mars Indonesia. 2008. *Studi Pasar dan Perilaku Nasabah Bank Syariah*. Jakarta. h.109.
- Martin, Stephen. 1988. *Industrial Economic – Economic Analysis and Public Policy*. 2nd Edition, New York: Macmillan Publishing Company.
- Sancoko. 2009. "Analisa Perbandingan Konsentrasi antara Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional". *Jurnal Administrasi Terapan*, Vol. X(1)
- Sealey, Jr.C.W., and Lindley, J.T. 1977. "Input, output and a theory of production and cost at depository financial institution". *Journal of Finance* 4, 1251 – 1266.
- Syafii, Muhammad Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Cet.17. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Swastanto, Joni. 2007. *Analisis kemampuan perolehan laba Bank dan implikasinya terhadap konsolidasi perbankan Indonesia*. Disertasi. Universitas Indonesia.
- Weill, Laurent. 2009. "Do Islamic Banks Have Greater Market Power?". *Laboratoire de Recherche en Gestion & Economic Working Paper 2009-02*
- Wibisono, Yusuf. 2009. "Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang Dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah". *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*. 16: 105-115.

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP) DI KANTOR AKUNTANSI REGIONAL JAKARTA

Titis Wahyuni^{1*}

¹*Program Studi Akuntansi Program Vokasi Universitas Indonesia*

ABSTRAK - Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang dilaksanakan oleh Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) melalui Kantor Akuntansi Regional (KAR) yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia serta hasil-hasil yang diharapkan dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Dalam sistem akuntansi, laporan keuangan yang dihasilkan bergantung pada keakuratan dan validitas input data transaksi. Dengan demikian keakuratan dan validitas dari laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan akan bergantung pada kualitas kerja yang dilakukan oleh KAR dalam mengelola input data transaksi keuangan pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis masalah-masalah/kendala-kendala yang dihadapi oleh KAR Jakarta dan juga menganalisis proses yang dilaksanakan oleh KAR Jakarta pada tahun 2000–2001. Analisis dilakukan pada subsistem pengolahan data transaksi penerimaan (*Cash Receipt*) dan pengeluaran kas pemerintah (*Cash Disbursement*) serta subsistem buku besar (*General Ledger*) dengan menggunakan *Analysis Critical Success Factor (CSF)*, *Performance Grid*, *Proses Modeling*, *Data Modeling*, and *Network Modeling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah/kendala yang dihadapi oleh KAR dalam mengelola data transaksi keuangan pemerintah. Kemudian, dengan menggunakan hasil penelitian dilakukan usaha-usaha untuk memperbaiki sistem yang sedang berjalan.

Kata kunci: SAPP, KAR, *process modeling*, *data modeling*, *critical success factor*.

ABSTRACT - *This research is intended to describe Central Government Accounting System (SAPP) implemented by the State Financial Accounting Agency (BAKUN) through The Regional Accounting Office (KAR) and the expected outcomes of Central Government Accounting System. In an accounting system, financial statements generated rely on the accuracy and validity of data input transactions. The accuracy and validity of the Government's financial statements generated will depend on the quality of the work done by KARs in managing the Government's financial transaction data input.*

The method used in this research is by analyzing the problems/obstacles faced by KAR Jakarta and also analyzing the process performed by KAR Jakarta during 2000 – 20001. Analysis was performed on cash receipt transaction data processing subsystem (Cash Receipt) and government cash expenditures (Cash Disbursement), and general ledger subsystem (General Ledger) used and done by using Analysis Critical Success Factor (CSF), Performance Grid, Proses Modeling, Data Modeling, and Network Modeling. The result of this research shows that there are some problems/obstacles faced by KAR in managing data of financial transactions of the Government. By using these results are then made efforts to repair the running system.

Keywords: Central Government Accounting System, Regional Accounting Office, Central Accounting System, process modeling, data modeling, critical success factor.

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Kondisi perekonomian Indonesia yang semakin memburuk akibat gejolak politik yang tak kunjung selesai memaksa pemerintah untuk mencari dukungan dana dari luar negeri untuk membiayai negara ini. Dengan tingkat inflasi yang tinggi serta defisit anggaran yang dialami oleh pemerintah Indonesia dan masalah-masalah lain yang dialami oleh pemerintah, maka dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat memantau kinerja pemerintah (terutama yang berkaitan dengan bidang ekonomi) sehingga krisis ekonomi yang melanda Indonesia dapat diperbaiki sedikit demi sedikit atau setidaknya tidak semakin memburuk. Sistem informasi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi lengkap mengenai kondisi perekonomian Indonesia saat ini seperti berapa aset, hutang, pendapatan, dan biaya yang terjadi layaknya sebuah neraca serta informasi penting lainnya. Dengan menggunakan sistem informasi ini kinerja pemerintah dapat dipantau dan pemerintah juga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dan konkrit dalam memperbaiki kondisi perekonomian negara ini.

Sebenarnya pemerintah sudah memiliki Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) untuk menata administrasi negara. SAPP telah dikembangkan dan diimplementasikan secara bertahap. Tahap pertama dilaksanakan mulai tahun anggaran 1993/1994 dan pada tahun anggaran 1999/2000 telah mencakup seluruh Departemen/Lembaga diseluruh

propinsi. SAPP adalah suatu sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dan proses elektronik untuk mengambil data, membukukan, dan melaporkan semua transaksi keuangan, aset, hutang, dan ekuitas dari seluruh Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya. SAPP terdiri dari dua subsistem utama, yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Tanggung jawab SAI diserahkan kepada Kepala Departemen/Lembaga dalam hal ini Menteri/Ketua dibantu oleh unit akuntansi di bawah Sekretaris Jenderal sedangkan tanggung jawab SAP diserahkan kepada Menteri Keuangan yang dibantu oleh Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN).

Setiap subsistem utama dibagi menjadi beberapa subsistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan akuntansi dan informasi dari pemakai tertentu. Subsistem dalam SAP dan SAI didesentralisasikan di propinsi-propinsi. Masing-masing subsistem akan memenuhi tujuan-tujuan informasi akuntansi dan pengawasan dari setiap instansi atau bagian dari Pemerintah Pusat. Secara keseluruhan sistem akuntansi ini akan memberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, para pengambil keputusan tingkat tinggi pemerintah, dan pihak yang berkepentingan lainnya informasi yang mencukupi, relevan, dan tepat waktu mengenai realisasi anggaran serta posisi keuangan dari seluruh Pemerintah Pusat atau dari masing-masing instansi.

Input SAPP adalah berupa dokumen sumber transaksi keuangan pemerintah seperti SPM (Surat Perintah Membayar), SSP

(Surat Setoran Pajak), SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak), SSBC (Surat Setoran Bea Cukai), arsip data komputer aset tetap, arsip data komputer transaksi interregional dan lain-lain sedangkan *output* yang dihasilkan oleh SAPP adalah laporan keuangan tingkat proyek, laporan realisasi anggaran pendapatan, neraca anggaran rutin, dan Perhitungan Anggaran Negara. Pemrosesan input untuk SAPP dilakukan oleh Kantor Akuntansi Regional (KAR) yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. KAR adalah instansi vertikal BAKUN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAKUN. Dalam menyelenggarakan tugasnya KAR berfungsi sebagai pengumpulan dan verifikasi dokumen transaksi keuangan pemerintah, pengolahan data transaksi keuangan pemerintah, pendistribusian hasil pengolahan data akuntansi, pelaksanaan sistem akuntansi pusat, analisis laporan keuangan pemerintah, bimbingan teknis SAP termasuk Sistem Akuntansi Aset Tetap kepada unit-unit akuntansi di wilayah kerjanya, dan pelaksanaan administrasi KAR.

Pada suatu sistem akuntansi, laporan keuangan yang dihasilkan sangat bergantung pada keakuratan dan keabsahan input data transaksinya. Berdasarkan fungsi tersebut di atas berarti bahwa input SAPP dari setiap transaksi keuangan pemerintah berada di bawah tanggung jawab KAR. Ini berarti bahwa tugas yang diemban oleh KAR sangat penting. Keakuratan dan keabsahan laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan

tergantungan dari kualitas kerja yang dilakukan oleh KAR dalam mengelola input data transaksi keuangan pemerintah. Akan tetapi seringkali muncul kendala-kendala/masalah-masalah dalam pengolahan input sehingga *output* yang dihasilkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak akurat. Padahal hasil yang akurat hanya dapat dicapai jika input yang dimasukkan juga akurat.

II. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis beberapa permasalahan terkait penggunaan Sistem Akuntansi Pusat oleh KAR Jakarta berikut ini, yaitu:

1. Seperti apakah proses yang terjadi pada KAR Jakarta?
2. Apakah masalah-masalah/kendala-kendala yang dihadapi oleh KAR dalam mengelola data transaksi keuangan pemerintah?
3. Bagaimana mengatasi masalah-masalah/kendala-kendala yang dihadapi oleh KAR dalam mengelola data transaksi keuangan pemerintah?

III. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan gambaran yang jelas dan sebenarnya tentang proses yang terjadi pada KAR Jakarta.
2. Memberikan gambaran yang jelas dan sebenarnya tentang masalah-masalah/kendala-kendala yang dihadapi oleh KAR dalam mengelola data transaksi keuangan pemerintah
3. Melakukan analisis dan pembahasan terhadap masalah-masalah/kendala-

kendala yang dihadapi oleh KAR Jakarta sehingga dapat memperoleh solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

IV. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis masalah/kendala yang dihadapi oleh KAR Jakarta dan proses yang saat ini dilaksanakan oleh KAR Jakarta. Metoda dan teknik yang digunakan dalam analisis adalah dengan *Critical Succes Factor* (CSF) bagi KAR Jakarta, *Data Flow Diagram* (DFD), *Entity Relationship Diagram* (ERD), dan *Network Modeling*. Selanjutnya berdasarkan teori-teori yang didapat daristudi literatur akan dicari pemecahannya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

I. ANALISIS

a. Gambaran Umum Sistem Akuntansi pada KAR Jakarta

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat terdiri dari subsistem-subsistem: pengeluaran (*Cash Disbursement/CD*), penerimaan (*Cash Receipt/CR*), anggaran (*Budgeting*), aset tetap (*Fixed Asset/FA*), inveslasi permanen (*Permanent Investment/PI*), dan hutang jangka panjang (*Long-term Liabilities/LTL*). Pada prakteknya, subsistem-subsistem tersebut dikerjakan oleh berbagai instansi. Berikut ini disajikan tabel yang menjelaskan tentang instansi dan subsistem yang digunakan oleh instansi tersebut.

Tabel 1.1
 Instansi dan Subsistem yang Digunakan

No.	Subsistem	Pengolahan Data Dilakukan oleh	Keterangan
1.	CD	KAR,KAK	<ul style="list-style-type: none"> • KAR hanya mengolah data pengeluaran kas negara yang dilakukan oleh KPKN. • KAK hanya mengolah data pengeluaran kas negara yang dilakukan DJA Pusat.
2.	CR	KAK, KAR	<ul style="list-style-type: none"> • KAR hanya mengolah data penerimaan kas negara yang dilakukan oleh KPKN. • KAK hanya mengolah data penerimaan kas negara yang dilakukan DJA Pusat.
3.	Budgeting	KAK	
4.	GL	KAK, KAR	
5.	FA	Instansi (Kantor/Proyek)	
6.	PI	KAK	Yang melaporkan datanya adalah penanggung jawab investasi.
7.	LTL	KAK	Yang melaporkan datanya adalah penanggung jawab hutang.

Subsistem-subsistem yang Digunakan oleh KAR Jakarta

Dari tabel di atas terlihat bahwa sistem Kantor Akuntansi Regional Jakarta menggunakan subsistem-subsistem berikut ini untuk menjalankan fungsinya:

- *Subsistem cash disbursement (pengeluaran)*

Subsistem ini digunakan untuk mengolah semua dokumen sumber pengeluaran pemerintah yang diterima Kantor Akuntansi Regional dari Kantor Tata Usaha Anggaran (KTUA). Dokumen sumber tersebut adalah dalam bentuk SPM (Surat Perintah Membayar). Adabanyak jenis format SPM, yaitu: (a) format untuk rutin, pembangunan, UYHD rutin, UYHD pembangunan, PFK yang tidak dianggarkan, (b) Format untuk SPM U PEMDA, (c) Format untuk pendapatan yang dibayarkan kembali.

Cash disbursement termasuk *cash transfer-out* dan dokumen WP yang telah dibayar. SPM dapat dikelompokkan secara logik ke dalam berikut ini: (a) Pengeluaran rutin, (b) Pengeluaran pembangunan, termasuk transaksi-transaksi BA16 berdasarkan allotmen DIP, (c) UYHD rutin, pembayarannya melalui kas yang dibayar dimuka, (d) PFK yang tidak dianggarkan termasuk SPM U PEMDA, (e) Pembayaran kembali pendapatan, termasuk pembayaran pajak, pembayaran bea dancukai dan pembayaran pendapatan lainnya, (f) transfer kas keluar (g) WP yang telah dibayarkan.

Selain dokumen sumber pengeluaran KTUA juga memberikan *fileinterface* arsip data komputer (ADK) dan print out

rekapitulasi P7 yang biasanya dibuat per Bagian Anggaran. Dokumen sumber tersebut diterima, diteliti dan dibukukan oleh sub bagian umum KAR. Dokumen sumber akan diberikan ke seksi verifikasi untuk dibatch dan dibandingkan dengan *Register* Transaksi Harian (RTH) yang dicetak oleh Seksi pengolahan Data Akuntansi (SPDA). Sedangkan *fileinterface* (ADK) diberikan kepada SPDA. SPDA mencetak RTH yang kemudian dikirim ke seksi verifikasi, dan membentuk GL *entries* pengeluaran.

- *Subsistem cash receipt (penerimaan)*

Subsistem ini digunakan untuk mengolah semua dokumen sumber penerimaan pemerintah yang diterima Kantor Akuntansi Regional dari Kantor Tata Usaha Anggaran (KTUA). Dokumen tersebut berbentuk SSP untuk pendapatan dari penerimaan pajak, VAT receipt, rental tax receipt, dan penerimaan pajak lainnya.

- a) SSBC untuk pendapatan bea dan cukai
- b) SSBP untuk pendapatan bukan pajak, seperti pendapatan dari minyak, pendapatan sewa, pendapatan dari penjualan, dan pendapatan lainnya.
- c) SSBP UYHD untuk UYHD Rutin dan UYHD Pembangunan.
- d) KU-In untuk transfer kas.

Berdasarkan informasi dari dokumen sumber di atas, untuk semua dokumen kecuali KU-In akan disusun dan dibatch menurut urutan berikut ini: (a) Wilayah KPKN, (b) Bagian Anggaran dan Eselon I, (c) Kode BKPP, (d) Kode KPKN.

Untuk KU-In, dokumen akan dibatch menurut urutan Kode KPKN, Kode BKPP, Tanggal dokumen dari transaksi asal.

Selain dokumen sumber penerimaan KTUA juga memberikan *fileinterface* arsip data komputer (ADK) dan *print out* rekapitulasi P7 yang biasanya dibuat per Bagian Anggaran. Dokumen sumber tersebut diterima, diteliti dan dibukukan oleh sub bagian umum KAR. Dokumen sumber akan diberikan ke seksi verifikasi untuk dibatch dan dibandingkan dengan *Register* Transaksi Harian (RTH) yang dicetak oleh Seksi pengolahan Data Akuntansi (SPDA). Sedangkan *fileinterface* (ADK) diberikan kepada SPDA. SPDA mencetak RTH yang kemudian dikirim ke seksi verifikasi, dan membentuk GL *entries* penerimaan.

- *Subsistem general ledger (buku besar)*

Pada subsistem ini semua GL *entries* yang dihasilkan oleh subsistem pengeluaran maupun penerimaan akan diposting ke buku besar sehingga membentuk GL detail. Dari GL detail akan dicetak daftar transaksi dan posting (DT&P). GL detail dan DT&P ini kemudian dikirim oleh KAR ke instansi-instansi Kantor Pusat BAKUN, Unit Akuntansi Wilayah (UAW), dan Unit Akuntansi Eselon (UAE). Jika terjadi kesalahan misalnya ada data yang belum terekam atau data yang salah maka UAW akan membuat memo penyesuaian (MP) untuk kesalahan tersebut dan mengirimkan MP tersebut ke KAR. Oleh KAR MP tersebut dibagikan ke seksi verifikasi untuk dibatch

dan ke SPDA. SPDA kemudian akan membetulkan kesalahan yang terjadi berdasarkan MP yang diterima. SPDA akan mencetak RTH MP untuk diperiksa oleh seksi verifikasi. Jika masih ada yang salah maka seksi verifikasi akan memberikan tanda pada RTH untuk diperbaiki oleh SPDA. Setelah RTH dinyatakan benar maka akan dilakukan posting transaksi MP ke buku besar.

Subsistem - subsistem tersebut dikerjakan oleh Kantor Akuntansi Regional Jakarta melalui 4 bagian yang dimilikinya, yaitu sub bagian umum, seksi verifikasi, Seksi Pengolahan Data Akuntansi (SPDA), dan seksi Konsolidasi. Adapun tugas dan urutan kerja yang dilakukan oleh bagian tersebut adalah:

Sub Bagian Umum:

- a) Menerima arsip data komputer (ADK) *interface* dan dokumen sumber (DS) dariKTUA.
- b) Membukukan penerimaan.
- c) Menyerahkan ADK ke seksi PDA dan DS ke seksiverifikasi.

Seksi Verifikasi:

- a) Menerima DS dari sub bagian umum.
- b) Membagikan DS ke pelaksana.
- c) Menerima dan membagikan *Register* Transaksi Harian (RTH).
- d) Mencocokkan RTH dengan DS.
- e) Mencocokkan RTH perbaikan.
- f) Meminta pembentukan GL *entries*.
- g) Menerima dan membagikan data transaksi dan *posting* (DT&P).
- h) Membuat pengantar ADK dan DT&P ke instansi.

- i) Mengirim ke instansi.

Seksi PDA:

- a) Menerima ADK darisub bagian umum.
- b) Konversi data
- c) *Interface* data.
- d) Mencetak RTH
- e) Mengirim RTH ke verifikasi.
- f) Memperbaiki RTH.
- g) Mengirim RTH perbaikan.
- h) Menerima permintaan pembentukan GL *entries*.
- i) Menyetujui pembentukan GL *entries*.
- j) Membentuk GL *entries*.
- k) Mengirim GL *entries* ITR (interegional) ke KAK.
- l) Menerima GL *entries* ITR dari KAK.
- m) Melakukan posting.
- n) Mencetak DT&P.
- o) Mengirim DT&P ke verifikasi.
- p) Mencetak *register* pengiriman GL detail untuk KP BAKUN, UAW dan UAE.
- q) Download ke ADK KP BAKUN, UAW, dan UAE.

Apabila ada estimasi pendapatan, saldo awal harus diinput. Setelah itu urutan kerja sama dengan dari poin d sampai j. Sebelumnya tabel saldo sudah diterima dari KAK bersama dengan *allotmentnya*.

Seksi Konsolidasi:

Membuat laporan gabungan dari semua transaksi yang terjadi. Laporan konsolidasi dapat berupa laporan gabungan transaksi dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun.

Menurut BAKUN (1999) SAPP adalah suatu sistem terpadu yang menggabungkan

prosedur manual dan proses elektronis untuk mengambil data, mernbukukan, dan melaporkan atas semua transaksi keuangan, aset, hutang, dan ekuitas dari seluruh pemerintah pusat dan instansi-instansinya. SAPP terdiri dari dua subsistem utama, yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI. Tanggung jawab SAI diserahkan kepada Kepala Departemen/Lembaga dalam hal ini Menteri/Ketua dibantu oleh unit akuntansidi bawah Sekretaris Jenderal sedangkan tanggung jawab SAP diserahkan kepada Menteri Keuangan yang dibantu oleh Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN). SAP mempunyai dua subsistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang akan dilaksanakan oleh BAKUN melalui Kantor Akuntansi Regional (KAR) didaerah dan Kantor Pusat BAKUN di Jakarta, yaitu Sistem Akuntansi Umum (SAU) dan Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN). SAU membukukan dan melaporkan secara sentral mengenai AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN), alotment dan estimasi pendapatan,pendapatan dan belanja yang direalisasi, aset lancar, aset permanen, aset tetap, asetlain-lain, hutang jangka pendek, dan hutang jangka panjang, saldo dana lancar (surplus atau defisit), dan ekuitas dana yang diinveslasikan yang berasal dari transaksi instansi-instansiPemerintah Pusat. Sedangkan SAKUN meliputi perkiraan-perkiraan dana/kas pusat yang dipelihara oleh unit-unitdibawah Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), khususnya Kantor Perbendaharaan danKas Negara (KPKN), Direktorat Tata

Usaha Anggaran (DTUA), dan Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara (DPKN). Dari penjelasan tersebut dapat dilihat kaitan antara Sistem KAR, SAP, dan SAI.

Kaitan Antara Sistem KAR, SAP, dan SAI

Proses SAPP di BAKUN oleh KAR dan KAK. Pada KAR dokumen sumbernya berasal dari:

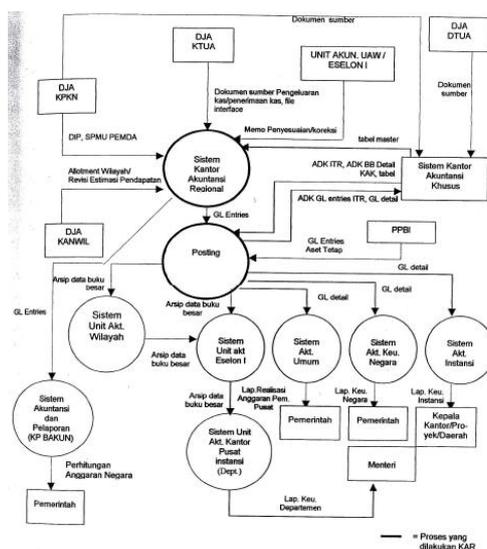
- DJA KTUA (Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Tata Usaha Anggaran), berupa dokumen sumber pengeluaran kas/penerimaan kas & file interface.
- DJA KPKN (Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan & Kas Negara), berupa DIP dan SPMU PEMDA.
- DJA KANWIL (Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Wilayah), berupa altotment (kredit anggaran) wilayah/revisi estimasi pendapatan.
- Unit Akuntansi UAW Eselon I, berupa memo penyesuaian/koreksi

e) PPBI (Pembantu Penguasa Barang Inventaris) yang merupakan instansis etingkat kantor wilayah, berupa arsip data komputer aset tetap.

f) KAK (Kantor Akuntansi Khusus) berupa tabel master, arsip data komputer buku besardetail KAR Khusus dan arsip data komputer interregional.

Pada KAK dokumen sumbernya berasal dari DJA DTUA dan DJA KPKN yang diolah dan menghasilkan tabel master, arsip data komputer buku besar detail KAR Khusus dan arsip data komputer interregional. Hasil-hasil inilah yang dikirim ke KAR.

Semua dokumen sumber tersebut masuk ke KAR dan diproses. Hasil dari proses tersebut adalah GL detail yang dipisah-pisahkan menurut instansi (arsip data buku besar).GL yang telah dipisah-pisahkan ini kemudian dikirim oleh UAW ke UAEI dan dari UAEI dikirim ke UAKPI.



Gambar 1.1
 Kaitan antara KAR, SAP dan SAR

SAU, SAKUN, dan SAI memperoleh arsip buku besar detail dari KAR. Kemudian setiap sistem berdasarkan arsip data buku besar detail yang diperoleh dari KAR akan diolah untuk menghasilkan laporan keuangan yang akan diberikan kepada:

- Laporan keuangan dari SAU akan diberikan kepada pemerintah.
- Laporan keuangan dari SAKUN akan diberikan kepada pemerintah.
- Laporan keuangan dari SAI akan diberikan kepada Kepala Kantor/proyek/Daerah

Sementara itu di UAKPI data diproses untuk menghasilkan laporan Realisasi Anggaran tingkat kantor maupun tingkat proyek dan neraca percobaan untuk setiap departemen per wilayah. Laporan-laporan ini kemudian diverifikasi terhadap dokumen sumbernya.

Seharusnya jika diperiksa, laporan yang dihasilkan oleh UAKPI akan memiliki jumlah yang sama dengan laporan PAN (Perhitungan Anggaran Negara) yang dihasilkan oleh KP BAKUN. Akan tetapi karena fasilitas yang ada di UAKPI kurang memadai maka laporan yang dihasilkan menjadi tidak sama.

b. Masalah dan atau Kendala-kendala yang Dihadapi oleh KAR Jakarta

Masalah atau kendala-kendala yang dihadapi oleh KAR Jakarta antara lain:

1. Kelengkapan dokumen sumber.

Dokumen sumber banyak yang tidak lengkap sehingga tidak diketahui secara pasti

berapa jumlah SPM (Surat Perintah Membayar), SSP (Surat Setoran pajak), SSBP (surat setoran Bukan pajak), dan SSBC (surat setoran Bea dan cukai).

Ketidaklengkapan tersebut dapat berupa:

- Arsip Data Komputer (ADK, berupa disket dari I(TUA) ada tetapi dokumen sumbernya (DS) belum ada.
- Arsip Data Komputer ada, dokumen sumber ada tetapi tidak lengkap.
- Arsip Data Komputer tidak ada tetapi dokumen sumber ada.

Untuk mengatasi hal tersebut beberapa langkah yang telah ditempuh oleh KAR adalah:

- Jika arsip data komputer ada tetapi dokumen sumbernya belum ada biasanya dipecahkan berdasarkan pengalaman sebelumnya jika menghadapi hal yang sama.
- Jika arsip data komputer ada, dokumen sumber ada tetapi tidak lengkap biasanya dipecahkan dengan : SPM yang ada dianggap benar, dihitung, kemudian dicocokkan dengan rekapitulasi PT kemudian dibandingkan dengan RTH. RTH dibandingkan/diperiksa lagi berdasarkan dokumen pendukungnya seperti Daftar Isian Kegiatan dan Daftar Isian Proyek. Rekapitulasi P7 dibuat dari ADK yang diterima kemudian dibuat rekapitulasinya berdasarkan kode BA (Bagian Anggaran). Atau dipecahkan berdasarkan pengalaman sebelumnya jika menghadapi hal yang sama.

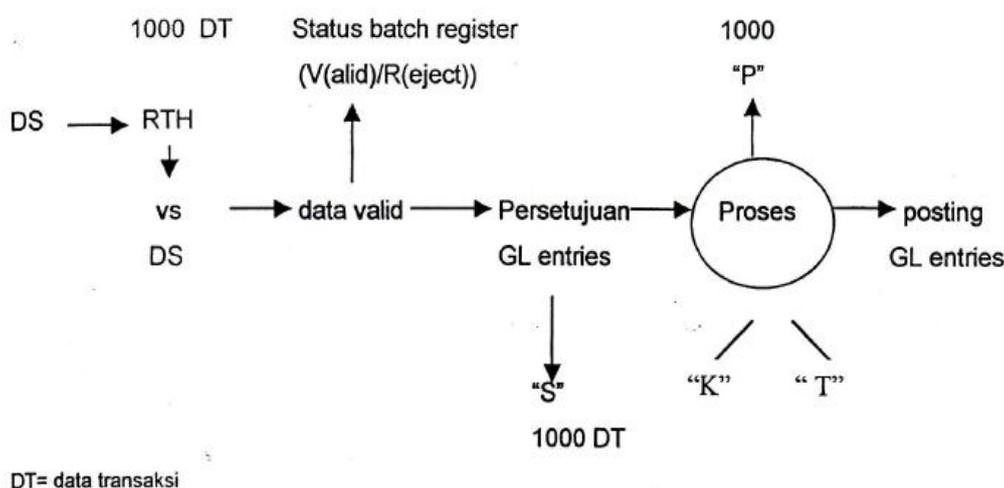
- Jika arsip data komputer tidak ada tetapi dokumen sumber ada maka staf SPDA di KAR harus menginput data berdasarkan dokumen sumber yang diterima. Dokumen sumber biasanya terdiri dari dua unsur, yaitu:
 - Fisik berupa disket yang berisi arsip data komputer.
 - Elemen data. Misalnya elemen data untuk SPM adalah:
 - kegiatan lain (Daftar Isian

Kegiatan/Daftar Isian proyek)

- Sektor Subsektor Program (SSP)
- MAK/MAP,
- BA-ES seperti SKO dan DIK S

2. Masalah verifikasi yang belum cermat

Urutan prosesnya adalah sebagai berikut (pekerjaan ini dikerjakan oleh seksi verifikasi):



Gambar 1.2
Urutan Kerja Seksi Verifikasi

RTH (*Register Transaksi Harian*) yang telah dicetak oleh SPDA akan diperiksa oleh seksi verifikasi. RTH dibandingkan dengan dokumen sumber yang ada (misalnya ada 1000 transaksi). Setelah RTH dibandingkan dengan dokumen sumber dan data dinyatakan valid (benar) maka status *batch register* akan menunjukkan huruf "V" yang berarti benar ada 1000 transaksi. Pada saat *GL entries* terbentuk dan statusnya adalah "S" (setuju) maka itu berarti bahwa transaksi yang terbentuk pada *GL entries* juga 1000

transaksi. Dan pada saat terjadi proses *GL entries* status akan menunjukkan "P" (proses) yang berarti juga ada 1000 transaksi yang siap untuk diposting. Akan tetapi ternyata 1000 transaksi yang diwakili oleh status-status "V", "S" dan "P" tersebut ternyata tidak benar-benar 1000 transaksi.

3. Program konversi yang digunakan oleh KAR Jakarta masih kurang sempurna.

ADK *interface* dari KTUA dibuat dengan menggunakan *Dbase III+* sedangkan sistem di KAR dibuat dengan menggunakan sistem

UNIX dan bahasa pemrograman PowerHouse. ADK *interface* dari KTUA tersebut harus dikonversi dari *file.DBF* menjadi *file.TXT* terlebih dahulu agar dapat digunakan oleh sistem KAR Jakarta. Akan tetapi pada *file* hasil konversi masih terdapat data yang lolos atau tidak terproses sehingga tidak dapat dibuatkan rekapitulasi dari data penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Biasanya berdasarkan arsip data komputer yang masuk, KAR akan membuat rekapitulasi pengeluaran maupun penerimaan berdasarkan bagian anggaran.

4. Elemen data SPM yang belum benar.

Pada SPM terdapat informasi tentang kantor yang menerima dana serta kode bagian anggaran (kode departemen) dari kantor tersebut. Ternyata terdapat ketidakcocokan data antara kantor yang menerima dana dan kode bagian anggarannya pada SPM yang dikeluarkan oleh KPKN. Sistem yang ada di KAR Jakarta saat ini belum memiliki mekanisme untuk mencek/memeriksa hal tersebut sehingga terjadi perbedaan pencatatan transaksi antara instansi/kantor

II. PEMBAHASAN

a. Critical Success Factor bagi KAR Jakarta

Tujuan KAR Jakarta adalah untuk menyediakan daftar transaksi dan posting (DT&P) serta arsip data BB yang akurat dan benar bagi Kantor pusat BAKUN, Unit Akuntansi Wilayah (UAW), dan Unit Akuntansi Tingkat Eselon (UAE) untuk digunakan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan laporan keuangan pemerintah,

yang menerima dana dengan pencatatan transaksi yang dilakukan oleh KAR Jakarta.

5. Kurangnya motivasi pegawai dalam menjalankan tugasnya.

Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai KAR Jakarta adalah jenis pekerjaan yang rutin dan membutuhkan ketelitian yang tinggi (antara lain seperti meneliti kelengkapan dokumen sumber, memeriksa data transaksi harian dan mencocokkannya dengan dokumen sumber) sehingga lama-kelamaan akan menimbulkan kejenuhan para pegawai. Kondisi yang seperti ini ditambah dengan kurangnya ganjaran yang diberikan terhadap para pegawai membuat kurangnya motivasi para pegawai tersebut dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya adalah hasil kerja yang dihasilkan oleh KAR Jakarta menjadi kurang optimal dan akurat. Padahal hasil kerja yang optimal dan akurat dibutuhkan karena *output* yang dihasilkan oleh sistem KAR Jakarta menjadi dasar bagi pembuatan laporan keuangan pemerintah.

laporan keuangan tingkat wilayah, laporan keuangan kantor/proyek, dan laporan keuangan tingkat eselon, laporan keuangan tingkat departemen/instansi.

Agar KAR Jakarta dapat mencapai tujuan tersebut maka *Critical Success Factor* (CSF) yang harus dimiliki adalah:

1. Dokumen sumber yang lengkap.

Pada sistem akuntansi, dasar dari pembuatan jurnal adalah adanya dokumensumber yang merekam transaksi

yang dilakukan. Tanpa adanya dokumen sumbermaka pembukuan yang dilakukan adalah tidak benar dan tidak akurat.

2. *Pegawai yang memiliki motivasi tinggi dalam menjalankan tugasnya.*

Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai KAR Jakarta adalah jenis pekerjaan yang rutin, membutuhkan ketelitian dan tidak bervariasi sehingga menimbulkan kejenuhan para pegawainya. Sebagai instansi yang bertugas untuk menyediakan data dasar bagi pembuatan laporan keuangan pemerintah yang nantinya laporan tersebut digunakan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, Pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah maka KAR Jakarta harus memiliki pegawai yang memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya sehingga data yang dihasilkan adalah data yang benar dan akurat.

3. *Prosedur verifikasi yang baik*

Agar data transaksi dan posting serta GL detail yang dihasilkan akurat maka KAR Jakarta harus prosedur verifikasi yang baik sehingga kesalahan sekecil apapun dapat ditemukan. Dengan demikian maka data yang dihasilkan menjadi akurat.

4. *Infrastruktur yang memadai pada instansi terkait.*

Sistem KAR berhubungan dengan instansi lain seperti KPKN, KTUA, UAW, UAE, DJA dan lain-lain. Instansi-instansi tersebut harus memiliki

infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan untuk mengolah data yang akan dikirim ke KAR sehingga hasil kerja KAR Jakarta dapat selesai tepat pada waktunya karena hasil kerja KAR Jakarta diperlukan oleh instansi/lembaga lain untuk membantu dalam pengambilan keputusan, perencanaan, anggaran, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah dan mempercepat penyajian Perhitungan Anggaran Negara (PAN) serta memudahkan pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

5. *Membuat sistem baru yang terpadu atau memperbaiki sistem yang sudah ada.*

Hal ini perlu dilakukan agar dapat menghasilkan data yang benar, akurat, dan lebih cepat tersaji sehingga laporan yang dihasilkan juga menjadi laporan yang benar, akurat, dan tepat waktu.

• *Membuat sistem baru yang terpadu*

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa sistem KAR berhubungan dengan instansi lain seperti KPKN, KTUA, UAW, UAE, DJA dan KP BAKUN sehingga akan lebih baik jika dibangun sistem baru yang terpadu. Terpadu berarti meliputi seluruh bagian yang terkait dan terintegrasi. Ini diperlukan agar aliran data antar instansi yang berhubungan dapat berjalan dengan lebih lancar sehingga

informasi yang dibutuhkan dapat segera dihasilkan.

- *Memperbaiki sistem yang ada*

Memperbaiki sistem yang ada berarti tetap mempertahankan sistem yang ada dan menambahkan beberapa prosedur yang sangat dibutuhkan serta memperbaiki beberapa prosedur yang kurang baik. Untuk sistem KAR Jakarta beberapa prosedur yang harus diperbaiki atau dibuatkan prosedur baru adalah:

- ✓ *Prosedur penerimaan dokumen sumber.*

Diperlukan prosedur perbaikan untuk mengatasi ketidaklengkapan dokumen sumber sehingga dapat diketahui secara pasti berapa pengeluaran dan pendapatan pemerintah pada suatu waktu tertentu.

- ✓ *Prosedur untuk verifikasi*

Meskipun sudah dilakukan verifikasi dan pencocokan antara RTH dan dokumen sumber tetapi masih juga terdapat kesalahan pada RTH sehingga prosedur yang ada perlu diperbaiki agar data yang dihasilkan menjadi lebih akurat.

- ✓ *Prosedur input data dokumen sumber yang tidak disertai ADK.*

Prosedur ini perlu dibuat agar data yang dihasilkan menjadi lebih akurat.

- ✓ *Prosedur untuk mengecek kesamaan antara kode kantor dan kode bagian anggaran pada SPM.*

Prosedur ini perlu dibuat agar terdapat kesesuaian antara uang yang dikeluarkan oleh KPKN dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang menerima.

- ✓ *Membuat program konversi data yang lebih sempurna*

Program konversi data yang lebih sempurna perlu dibuat mengingat KAR Jakarta menerima dokumen sumber dalam bentuk arsip data komputer dari sistem KTUA yang dibuat dengan bahasa pemrograman yang berbeda dengan bahasa pemrograman pada sistem KAR Jakarta. Dengan demikian maka proses konversi yang dilakukan akan sempurna (tidak ada data yang lolos).

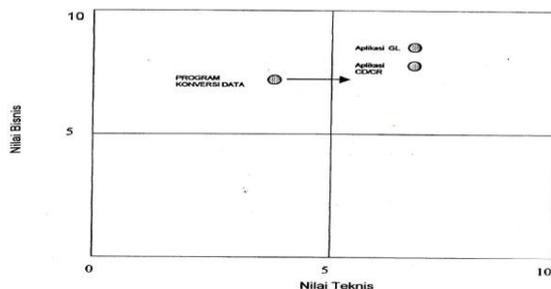
b. Evaluasi Perangkat Lunak Aplikasi Sistem Informasi

Dari gambar 5 di bawah ini diketahui bahwa:

- Aplikasi GL data mempunyai nilai atau manfaat tertinggi bagi KAR Jakarta, disusul oleh aplikasi CD dan CR serta program konversi data.
- Aplikasi GL, CD, dan CR memiliki nilai bisnis dan teknis yang tinggi sehingga aplikasi tersebut harus dipelihara, ditingkatkan, dan dikembangkan lebih lanjut.

- Program konversi data memiliki nilai bisnis yang tinggi namun nilai teknisnya rendah, maka aplikasi ini harus diperbarui.
- Secara keseluruhan aplikasi sistem informasi yang ada mempunyai nilai teknis

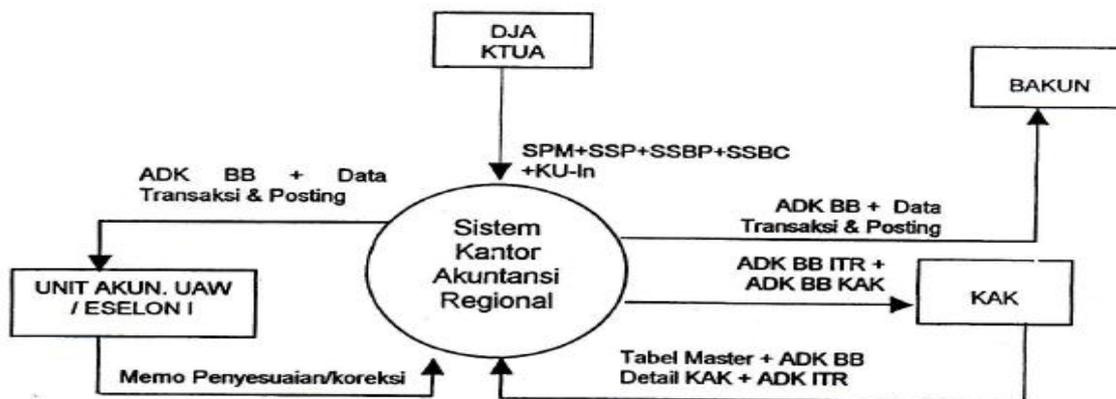
antara 4 dan 8 pada skala 0 sampai 10, yang berarti belum cukup memuaskan pemakai akhir dan perlu ditingkatkan serta disempurnakan lebih lanjut



Gambar 1.3
 Grid Evaluasi Perangkat Lunak

➤ **Process Modeling**

Diagram konteks untuk Kantor Akuntansi Regional Jakarta adalah sebagai berikut:



Gambar 1,4
 Diagram Konteks Kantor Akuntansi Regional Jakarta

Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa Sistem Kantor Akuntansi Regional mendapat masukan dari :

- DJA KTUA (Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Tata Usaha Anggaran), berupa dokumen sumber pengeluaran kas/penerimaan kas & file interface.
- KAK (Kantor Akuntansi Khusus) berupa tabel master, arsip data komputer buku

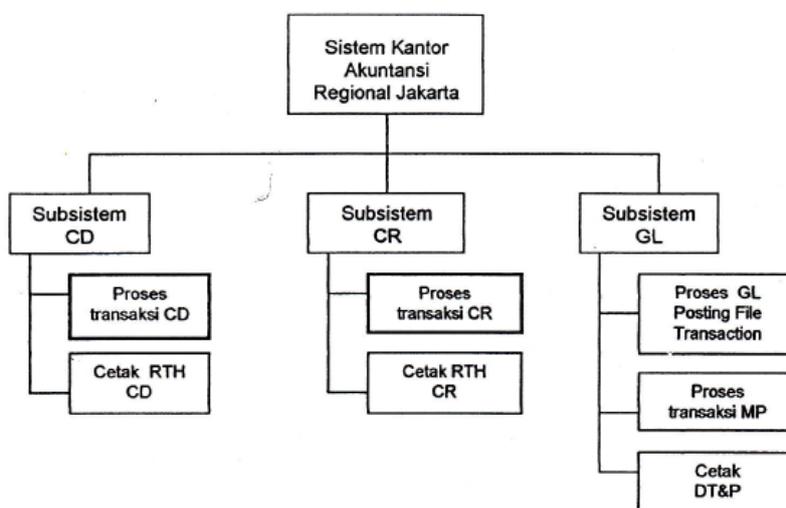
besar detail KAR Khusus dan arsip data komputer interregional.

- Unit Akuntansi UAW Eselon 1, berupa memo penyesuaian koreksi
 Semua data tersebut diolah oleh KAR dan menghasilkan keluaran yang akan dikirim ke:

- KAK, berupa arsip data komputer buku besar intereregional dan arsip data komputer aset tetap.
- Unit akuntansi *UAW/Eselon I*, berupa arsip data komputer buku besar, daftar transaksi dan posting serta laporan lainnya.
- BAKUN, berupa arsip data komputer buku besar dan daftar transaksi dan posting.

➤ **Functional Decomposition Diagram**

Sistem Kantor Akuntansi Regional Jakarta mengerjakan 3 subsistem dari SAPP, yaitu: subsistem *Cash Disbursement* (pengeluaran), subsistem *Cash Receipt* (penerimaan), dan subsistem *General Ledger* (buku besar). *Functional Decomposition Diagram* Akuntansi Regional adalah sebagai berikut.



Gambar 1.5
 Functional Decomposition Diagram
 Sistem Kantor Akuntansi Regional Jakarta

➤ **Event-Response List**

Subsistem *Cash Disbursement*

No.	Event
1	KAR menerima ADK <i>interface</i> / dokumen sumber dari KTUA.
2	SPDA mengkonversi data (ADK) yang diterima dari Sub bagian Umum.
3	Verifikasi mencocokkan DS pengeluaran pemerintah Oengan RTH.
4	SPDA memperbaiki RTH.
5	Seksi verifikasi meminta pembentukan

	GL <i>entries</i> kepada SPDA.
--	--------------------------------

Subsistem *Cash Receipt*

No.	Event
1	KAR menerima ADK <i>interface</i> / dokumen sumber penerimaan pemerintah dari KTUA
2	SPDA rnengkonversi data (ADK) yang diterima dari Sub Bagian Umum.
3	Seksi verifikasi rnencocokkan DS pengeluaran pemerintah dengan RTH

No.	Event
4	SPDA memperbaiki RTH.
5	Seksi verifikasi meminta pembentukan GL <i>entries</i> kepada SPDA

Subsistem General Ledger

No.	Event
1	SPDA melakukan posting.
2	SPDA mencetak DT&P.
3	Seksi verifikasi membuat pengantar ADK dan DT&P untuk instansi.
4	Pencetakan <i>register</i> pengiriman GL detail untuk KP BAKUN, UAW, dan UAE oleh SPDA.
5	Ekspor <i>file</i> GL detail ke KP BAKUN, KAK, UAW, dan UAE.
6	Memasukkan transaksi MP dari UAW ke subsistem buku besar.
7	Pemeriksaan RTH oleh seksi verifikasi.
8	Pembentukan GL <i>entries</i> MP.
9	Posting batch MP ke buku besar.

➤ **E-R Modeling (Data Modeling)**

Sesuai dengan ruang lingkup dalam proses kegiatan KAR Jakarta, dapat diidentifikasi yang berikut ini:

Jenis entity

<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi • SPM • Jenis SPM • Sifat SPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti Penerimaan Kas • P • Cara Setor • Perkiraan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis belanja • Cara bayar • Bank • GL <i>Entries</i> • Jenis perkiraan
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jenis Relasi

Entity	Relasi	Entity
Organisasi	Memiliki	SPM Bukti penerimaan
Perkiraan	Menerima	SPM GL <i>Entries</i>
Bank	Membayar	SPM
P	Berada pada	GL <i>Entries</i> Organisasi
Cara setor	Berada pada	Bukti penerimaan kas
Jenis perkiraan	Berada pada	Bukti penerimaan kas
Jenis belanja	Berada pada	SPM
Cara bayar	Berada pada	SPM
Jenis SPM	Berada pada	SPM
Sifat SPM	Berada pada	SPM

Cardinality

Entity/Relationship	Cardinality
Organisasi dan SPM	1:M
Organisasi dan Bukti penerimaan	1:M
Perkiraan dan SPM	1:M
Perkiraan dan GL <i>Entries</i>	1:M
Perkiraan dan Bukti penerimaan	1:M
Banks dan SPM	1:M
P dan GL <i>Entries</i>	1:M
P dan Organisasi	1:M
Cara setor dan Bukti penerimaan	1:M
Jenis perkiraan dan Bukti penerimaan	1:M
Jenis belanja dan SPM	1:M
Cara bayar dan SPM	1:M
Jenis SPM dan SPM	1:M
Sifat SPM dan SPM	1:M

Atribut dan Entity atau Relationship

Entity/Relationship	Atribut
Organisasi	Kode organisasi Nama organisasi Alamat organisasi Kode wilayah
Wilayah	Kode wilayah Deskripsi wilayah
SPM	No SPM Tanggal SPM Tahun Anggaran Kode jenis belanja Kode organisasi yang mengeluarkan

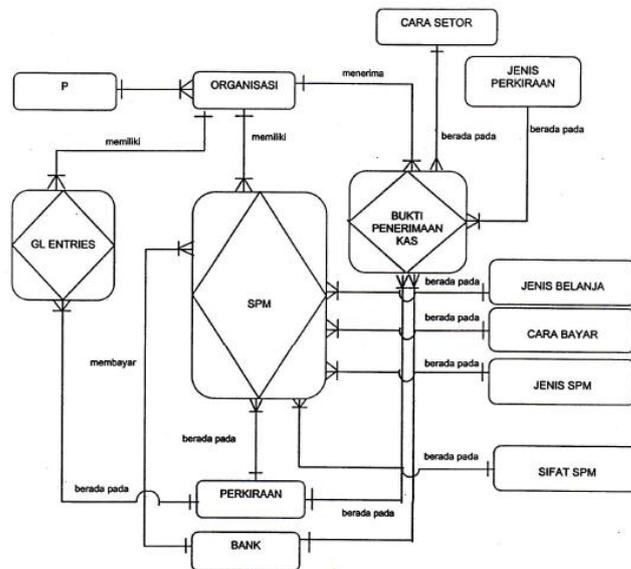
	Kode bank bayar No rekening Kode cara bayar Kode jenis SPM Kode sifat SPM Kode perkiraan Jumlah Penanggung jawab
Perkiraan	Kode perkiraan Deskripsi perkiraan
Bank	Kode bank Nama bank
P	Kode P Deskripsi P
Jenis belanja	Kode jenis belanja Deskripsi jenis belanja
Cara bayar	Kode cara bayar Deskripsi cara bayar
Jenis SPM	Kode jenis SPM Deskripsi jenis SPM
Sifat SPM	Kode sifat SPM Deskripsi sifat SPM
GL Entries	Kode organisasi Kode P Kode perkiraan Jumlah Tahun posting Bulan posting Tanggal posting Penanggung jawab
Bukti penerimaan kas	Kode organisasi Kode P Kode perkiraan Jumlah Tahun posting Bulan posting Tanggal posting Penanggung jawab
Cara setor	Kode cara setor Deskripsi cara setor
Jenis penerimaan	Kode jenis penerimaan

	Deskripsi jenis penerimaan
--	----------------------------

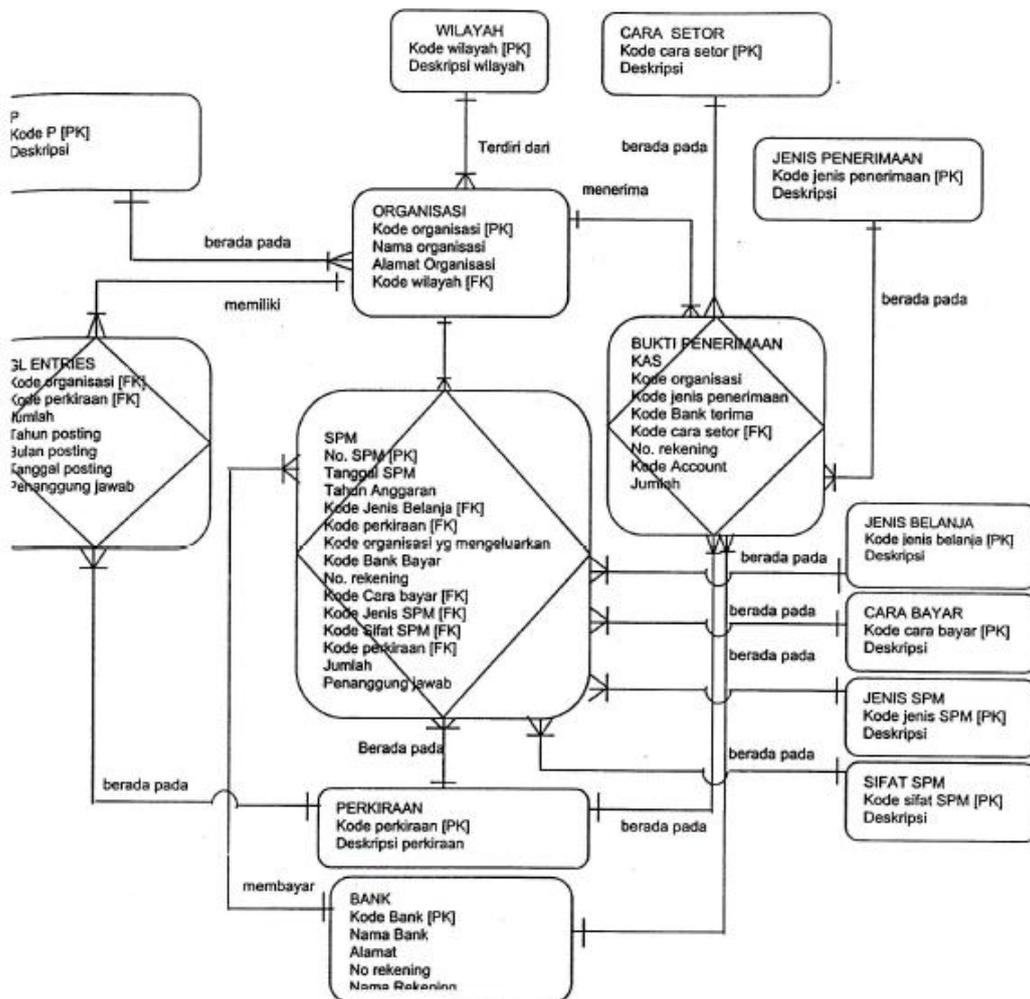
Atribut-atribut Primary Key dan Candidat Key

Entity/Relationship	Primaru Key	Alternate Key
Organisasi	Kode organisasi	
Wilayah	Kode wilayah	
SPM	No SPM	
Perkiraan	Kode perkiraan	
Bank	Kode bank	
P	Kode P	
Jenis belanja	Kode jenis belanja	
Cara bayar	Kode cara bayar	
Jenis SPM	Kode jenis SPM	
Sifat SPM	Kode sifat SPM	
GL Entries	Kode perkiraan	
Bukti pnerimaan kas	Kode organisasi	
Cara setor	Kode cara setor	
Jenis penerimaan	Kode jenis penerimaan	

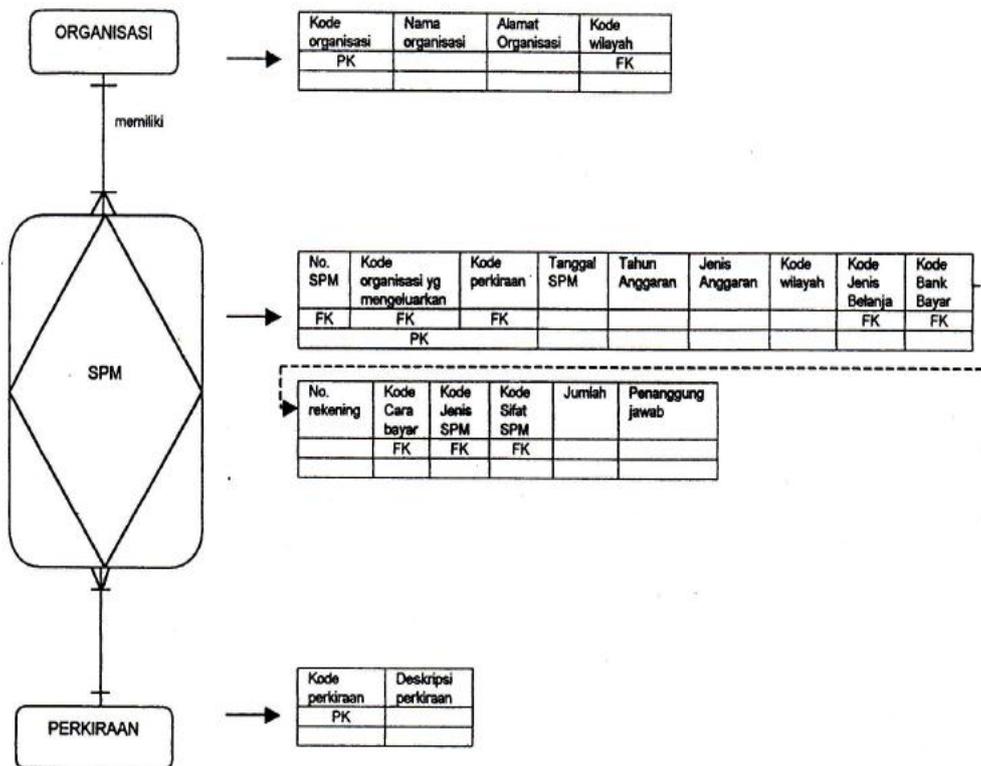
Berikut ini adalah gambar diagram ERD untuk sistem KAR Jakarta.



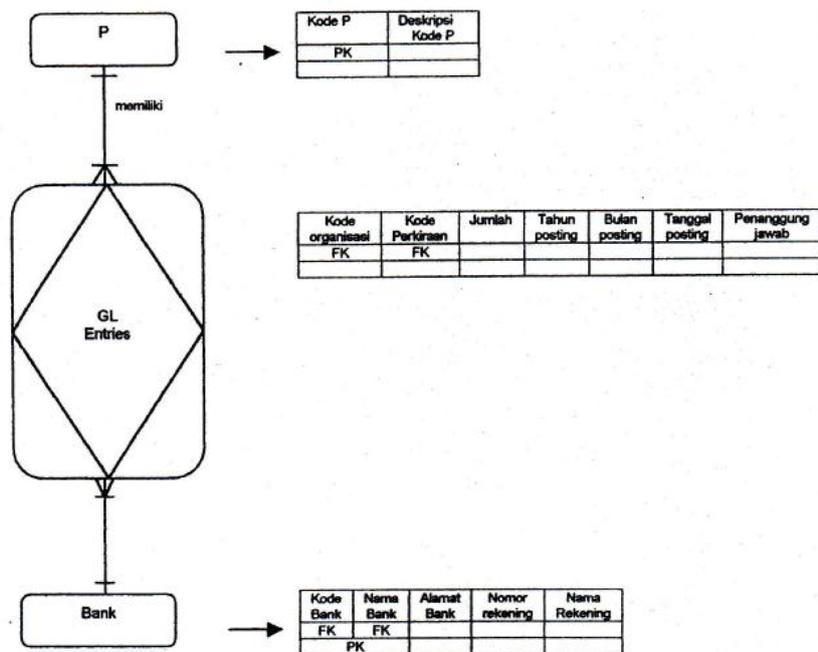
Gambar 1.6
 ERD Sistem KAR Jakarta



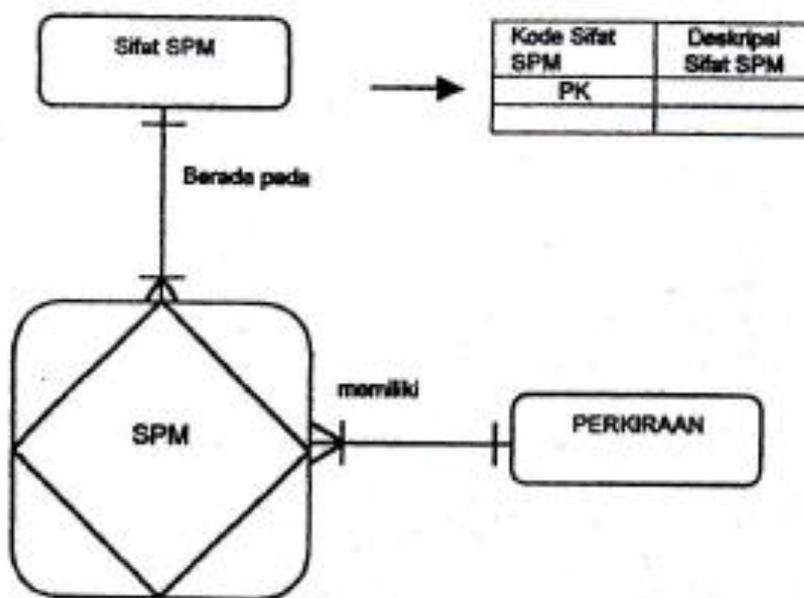
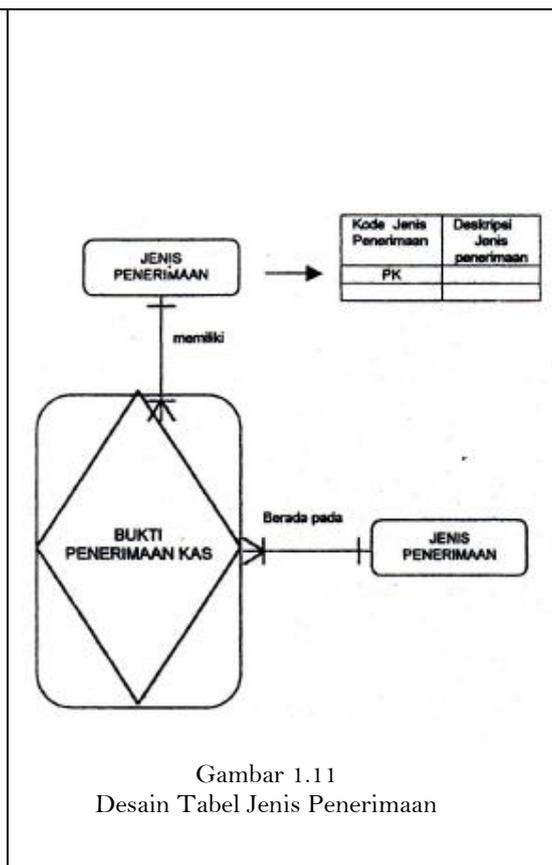
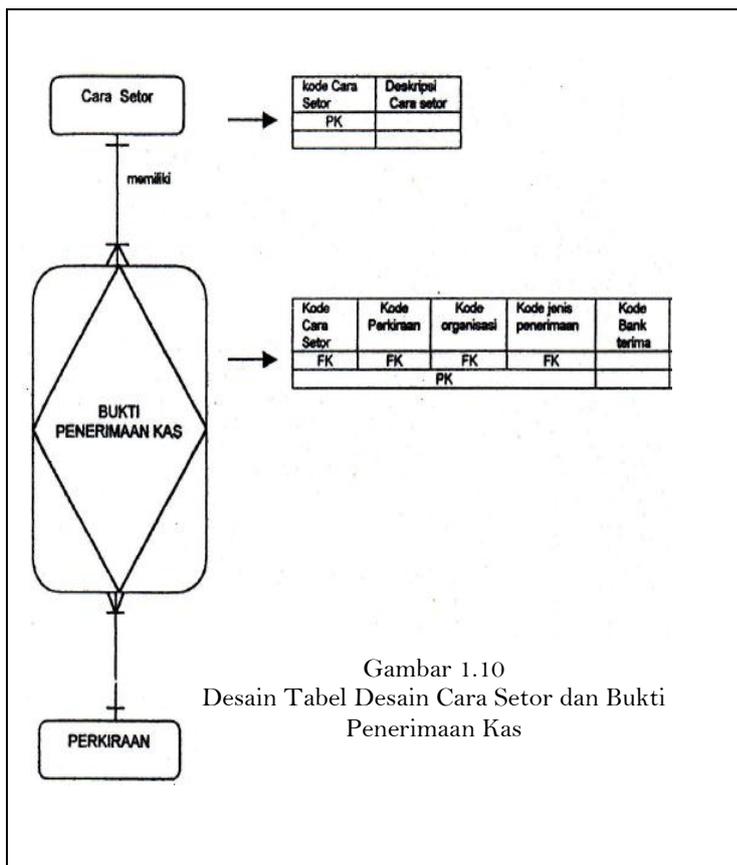
Gambar 1.7
 A Fully Attributed ERD Sistem KAR Jakarta



Gambar 1.8
 Desain Tabel Organisasi, SPM, dan Perkiraan



Gambar 1,9
 Desain Tabel P, GL Entries, dan Bank



➤ **Network Modeling**

Geografi dari Sistem berjalan pada Kantor Akuntansi Regional Jakarta adalah sebagai berikut:

• **Location Decomposition Diagram**

Sistem KAR Jakarta terdiri dari sub bagian umum, seksi verifikasi, seksi

pengolahan data akuntansi, dan seksi konsolidasi. Masing-masing bagian terletak pada ruangan yang berbeda. Jika digambarkan dalam diagram lokasi akan menjadiseperti berikut ini.



Gambar 1.13
Location Decomposition Diagram KAR Jakarta

Pada lokasi Sistem Kantor Akuntansi Regional Jakarta terdapat aplikasi *Cash Disbursement (CD)*, *Cash Receipt (CR)*, dan *General Ledger (GL)*. Pelayanan yang diberikan oleh sistem ini adalah berupa daftar *register* transaksi harian, daftar transaksi dan posting serta menyediakan GL detail bagi UAW, UAE, KAK, dan BAKUN. Pada lokasi Sub bagian umum tidak terdapat aplikasi. Disini semua pekerjaan dilakukan secara manual. Pelayanan yang diberikan adalah penerimaan dokumen sumber penerimaan dan pengeluaran dan meneliti kelengkapan dokumen sumber tersebut. Pada lokasi seksi verifikasi tidak terdapat aplikasi. Disini semua pekerjaan dilakukan secara manual. Pelayanan yang diberikan

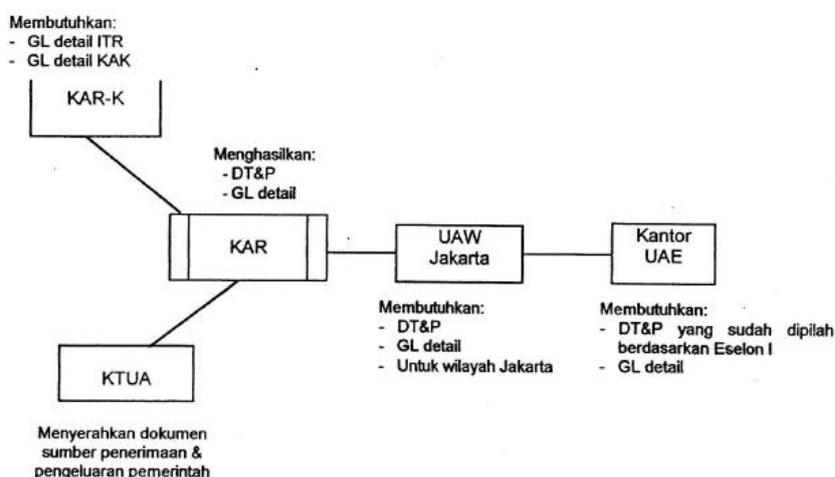
adalah pemeriksaan terhadap *register* transaksi harian (RTH). Pada lokasi SPDA terdapat aplikasi CD, CR, dan GL. Pelayanan yang diberikan adalah menyediakan RTH bagi seksi verifikasi, data transaksi dan posting bagi UAW, UAE, KAK, dan BAKUN. Pada lokasi seksi konsolidasi tidak terdapat aplikasi. Disini semua pekerjaan dilakukan secara manual. Pelayanan yang diberikan adalah menggabungkan semua SPM dari bulan ke bulan atau daritahun ke tahun.

• **Location Conectivity Diagram**

Setiap bagian dari Sistem KAR Jakarta saling berhubungan. Selain itu sistem KAR Jakarta juga berhubungan dengan sistem-sistem lain yang

memberikan input data bagi sistem KAR Jakarta atau menerima *output* dari sistem KAR Jakarta. Sistem diluar KAR Jakarta tersebut adalah Sistem Unit Akuntansi Wilayah yang memberikan koreksi/memo penyesuaian atas DT&P serta GL detail yang dihasilkan oleh sistem KAR Jakarta, sistem Kantor Tata usaha Anggaran yang memberikan dokumen sumber dan arsip

data komputer pengeluaran/penerimaan pemerintah, sistem Kantor Akuntansi Khusus yang memberikan tabel master, arsip data komputer buku besar dan arsip data komputer intenegeional Kantor Akuntansi Khusus, dan sislem Unit Akuntansi Eselon I yang menerima DT&P dan GL detail dari sistem KAR Jakarta.



Gambar 1.14
 Location Conectivity Diagram

Tujuan dari sistem KAR Jakarta adalah untuk menyediakan daftar transaksi dan posting (DT&P) serta arsip data BB yang akurat dan benar bagi KP BAKUN, UAW, UAE untuk digunakan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan tingkat kantor/proyek, laporan keuangan tingkat eselon, laporan keuangan tingkat departemen/instansi dan laporan keuangan pemerintah pusat. Tujuan tersebut amat berkaitan dengan tugas yang diemban oleh KAR yaitu melaksanakan akuntansi atas transaksi keuangan pemerintah di daerah

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan semakin banyaknya transaksi pengeluaran dan penerimaan pemerintah yang dilakukan oleh KPKN dilihat dari jumlah dokumen sumber yang masuk ke KAR Jakarta, maka persoalan-persoalan yang dihadapi oleh KAR Jakarta harus segera diatasi agar DT&P serta arsip data BB yang dihasilkan oleh KAR menjadi lebih benar dan akurat. Masalah-masalah/kendala yang dihadapi oleh KAR terdiri dari masalah organisasi dan sistem informasi. Oleh karena itu masalah/kendala yang dihadapi tersebut

akan dibahas berdasarkan sisi organisasi dan sistem informasi.

➤ **Struktur Organisasi KAR**

Kantor Akuntansi Regional Jakarta terdiri dari 3 bagian yaitu sub bagian umum, seksi verifikasi dan seksi pengolahan data akuntansi (SPDA) serta seksi konsolidasi. Pembagian pekerjaan ke dalam 4 bagian ini sudah tepat karena sudah terjadi pemisahan antara fungsi penerimaan, pemeriksaan, pengolahan data serta penggabungan data. Akan tetapi karena jenis pekerjaan yang dilakukan adalah jenis pekerjaan yang rutin, membutuhkan ketelitian tinggi dan tidak bervariasi maka terjadi kejenuhan pada para pegawai KAR Jakarta. Hal ini menyebabkan hasil kerja para pegawai KAR Jakarta menjadi kurang memuaskan. Kondisi yang seperti ini ditambah dengan kurangnya motivasi dan tanggung jawab dari para pegawai terhadap tugas yang diberikan kepada mereka menyebabkan hasil kerja KAR secara keseluruhan menjadi kurang baik. Mengingat fungsi yang dijalankan oleh KAR adalah fungsi yang sangat mendasar dan penting bagi pembuatan laporan keuangan yaitu antara lain menyediakan DT&P dan ADK buku besar (GL detail) bagi UAW, UAE dan KP BAKUN serta mengirimkan GL *entries* ITR dan GL detail ke KAK maka situasi yang seperti ini harus segera ditangani.

Teori harapan dari Victor Vroom mengatakan bahwa seorang *karyawan dimotivasi untuk menjalankan upaya yang tinggi bila ia meyakini upaya akan menghantar ke suatu penilaian Kinerja yang baik; suatu penitaaian yang*

baik akan mendorong ganiarcnganiaran organisasional sepefii bonus, kenaikan gaji atau suatu promosi; dan ganiannnganiann itu akan memuaskan tujuan-tujuan pibadi karyawan itu.

KAR Jakarta sebagai bagian dari organisasi yang lebih besar terikat kepada struktur organisasi Departemen Keuangan. Keputusan mengenai promosi, kenaikan gaji atau bonus ditentukan oleh pusat. Sangat sukar bagi KAR Jakarta untuk memberikan ganjaran-ganjaran organisasional kepada pegawainya. Langkah yang mungkin dapat dilakukan adalah melakukan rotasi pekerjaan secara berkala terhadap para pegawainya sehingga kejenuhan para pegawai agak berkurang. Langkah ini perlu dilakukan mengingat jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai KAR Jakarta adalah pekerjaan yang rutin dan membutuhkan ketelitian tinggi. Langkah lain yang perlu diambil adalah mengenai promosi pegawai. Promosi pegawai selama ini ditentukan oleh pusat tanpa melihat prestasi kerja pegawai. Akan lebih baik jika setiap instansi di bawah Departemen Keuangan mengirimkan daftar prestasi kerja para pegawainya peserta bukti-bukti yang mendukung prestasitersebut ke pusat dan promosi akan dilakukan berdasarkan prestasi tersebut. Meskipun hal ini sulit untuk dilakukan tetapi para pegawai akan termotivasi dalam melakukan pekerjaannya karena masih memiliki harapan untuk menerima ganjaran promosi.

➤ **Sistem Informasi**

KAR Jakarta khususnya bagian SPDA menyadari bahwa sistem yang ada saat ini

belum sempurna. Beberapa prosedur dan program yang dirasakan belum sempurna antara lain prosedur untuk penerimaan dokumen sumber, prosedur untuk verifikasi, prosedur untuk mencek SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan kegiatan yang dilakukan oleh tiap departemen/instansi yang mengajukan, dan program untuk konversi data dari DJA ke KAR yang belum sempurna sehingga data yang didapat dari hasil konversi tidak lengkap karena masih ada data yang lolos.

Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, terdapat dua terdapat dua alternatif untuk memecahkan masalah sistem di atas.

pertama, menyusun sistem baru yang terpadu. Kedua, memperbaiki sistem yang ada dan mengganti dengan sistem yang sama sekali baru. Terpadu berarti meliputi seluruh bagian yang terkait dan terintegrasi. memperbaiki sistem yang ada berarti tetap mempertahankan sistem yang ada dan menambahkan beberapa prosedur yang sangat dibutuhkan serta memperbaiki beberapa prosedur yang kurang baik.

Untuk menentukan alternatif mana yang harus dipilih, berikut ini akan dibahas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alternatif pada tabel berikut.

Alternatif	Kelebihan	Kelemahan
<i>Menyusun sistem yang baru</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem yang disusun dengan cara merombak sistem yang sedang berjalan dan membuat sistem yang sama sekali baru akan menghasilkan sistem yang benar-benar terpadu antara bagian-bagian/instansi-instansi yang terkait. • Informasi dapat dihasilkan dengan cepat karena sistem yang terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menyusun sistem yang terpadu membutuhkan biaya yang sangat mahal, baik untuk membayar pembuat sistem maupun untuk melengkapi peralatan-peralatan yang dibutuhkan. • Untuk menyusun sistem tersebut diperlukan waktu yang lama, karena skopnya luas. Sistem KAR berhubungan dengan sistem lain seperti sistem BAKUN, KAK, UAW, UAE, DJA, KTUA, KPKN dan lain-lain. • Keberhasilan suatu sistem untuk mencapai tujuan pembentukan sistem sangat tergantung kepada orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut. Untuk menerapkan sistem yang terintegrasi diperlukan banyak orang-orang yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan sistem tersebut. Saat ini KAR Jakarta belum memiliki orang-orang yang berkemampuan demikian, sehingga jika akan menerapkan sistem baru yang terpadu tersebut perlu dikeluarkan biaya untuk pelatihan

<i>Alternatif</i>	<i>Kelebihan</i>	<i>Kelemahan</i>
		<i>pegawai-pegawainya</i>
<i>Memperbaiki sistem yang sudah ada</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Jika dibandingkan dengan menyusun sistem yang baru, memperbaiki sistem yang sudah ada lebih murah biayanya karena skopnya tidak luas sehingga biaya yang dikeluarkan untuk membayar penyusun dan pengadaan alat-alat yang diperlukan seperti komputer, dll tidak terlalu banyak.</i> • <i>Waktu yang diperlukan untuk memperbaiki sistem tersebut relatif tidak lama karena lingkungannya tidak luas.</i> • <i>Pegawai yang perlu pelatihan untuk menangani operasional dengan sistem ini relatif sedikit dibandingkan dengan sistem yang baru dan terpadu</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dengan hanya memperbaiki sistem yang ada di KAR Jakarta maka kelemahan operasional di instansi lain yang terkait tidak teratasi.</i> • <i>Informasi yang lengkap tidak dapat diperoleh dengan cepat karena ada informasi dari terkait yang harus dikerjakan secara manual di lokasi yang terpisah-pisah</i>

Setelah mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari setiap alternatif sistem dan mempertimbangkan faktor biaya, waktu dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh KAR Jakarta, maka peneliti mengambil alternatif yang kedua yaitu memperbaiki sistem yang sudah ada sebagai sistem yang diusulkan. Berikut ini akan diuraikan usulan sistem bagi KAR Jakarta agar dapat menghasilkan *output* yang optimal.

III. SOLUSI MASALAH

a. Usulan Sistem

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh KAR Jakarta diberikan usulan sistem. Usulan sistem yang diberikan adalah berupa usulan perbaikan rancangan logik sistem bukan rancangan fisik. Berdasarkan analisis, maka untuk memperbaiki sistem yang sudah ada diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- *Memperbaiki prosedur penerimaan dokumen sumber.*
 Prosedur ini diperlukan untuk mengatasi ketidaklengkapan dokumen sumber sehingga dapat diketahui secara pasti berapa pengeluaran dan pendapatan pemerintah pada suatu waktu tertentu.
- *Memperbaiki prosedur untuk verifikasi*
 Prosedur ini diperbaiki agar data yang dihasilkan menjadi lebih akurat.
- *Memperbaiki prosedur input data dokumen sumber yang tidak disertai ADK.*
 Prosedur ini perlu dibuat agar data yang dihasilkan menjadi lebih akurat.
- *Membuat prosedur untuk mengecek kesamaan antara kode kantor dan kode bagian anggaran pada SPM.*
 Prosedur ini diperlukan agar terdapat kesesuaian antara uang yang

dikeluarkan oleh KPKN dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang menerima.

- *Membuat program konversi data yang lebih sempurna*

Prosedur ini diperlukan mengingat KAR Jakarta menerima dokumen sumber dalam bentuk arsip data komputer dari sistem KTUA yang dibuat dengan bahasa pemrograman yang berbeda dengan bahasa pemrograman pada sistem KAR Jakarta. dengan demikian maka poses

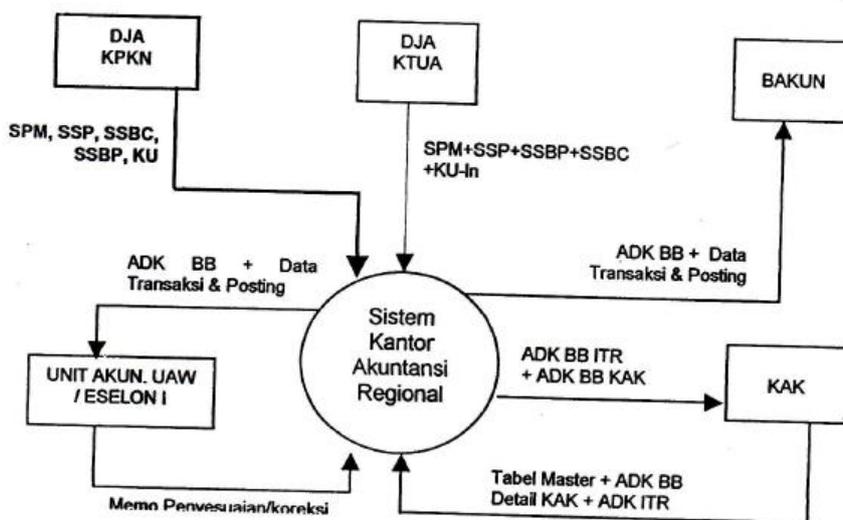
konversi yang dilakukan akan sempurna (tidak ada data yang lolos).

- *Membuat diagram sistem perbaikan*

Diagram sistem perbaikan perlu dibuat agar proses perbaikan dapat dilihat.

• Diagram Konteks

Diagram konteks untuk Kantor Akuntansi Regional Jakarta mengalami perubahan yaitu menjadi sebagai berikut:

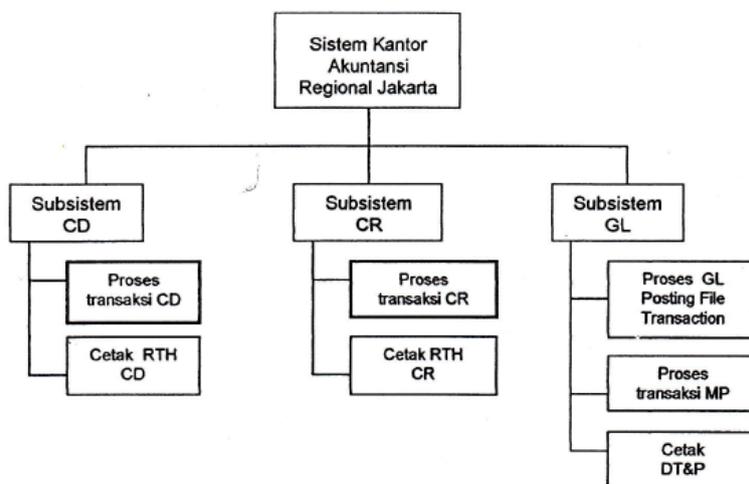


Gambar 1.15
 Diagram Konteks Kantor Akuntansi Regional Jakarta

Dengan ditambahkan *external* entity DJA KPKN di atas maka sistem KAR Jakarta dapat menerima dokumen sumber langsung dari instansi yang menerbitkan/menerima dokumen sumber (KPKN) sehingga masalah ketidaklengkapan dokumen sumber dapat segera teratasi.

• *Functional Decomposition Diagram*

Perubahan pada *Functional Decomposition Diagram* Akuntansi Regional adalah sebagai berikut terjadi transaksi CD dan transaksi CR. Sehingga menjadi:



Gambar 1.16
 Perubahan pada *Functional Decomposition Diagram*
 Sistem Kantor Akuntansi Regional Jakarta

• **Event-Response List**

Perubahan yang terjadi untuk Event bisnis yang harus direspon serta respon yang harus diberikan oleh Sistem Kantor Akuntansi Regional Jakarta adalah sebagai berikut:

Subsistem Cash Disbursement

No.	Event
1	KAR menerima informasi tabel master dari Kantor Akuntansi Khusus (KAK).
2	Permintaan DS pengeluaran pemerintah ke KPKN untuk DS yang tidak lengkap.
3	KAR menerima ADK <i>interface</i> dan DS dari KTUA
4	Sub bagian umum memberikan catatan pada seksi verifikasi dan SPDA tentang DS pengeluaran pemerintah yang tidak disertai ADK.
5	SPDA mengkonversi clatra (ADK)

No.	Event
	yang diterima dari Sub bagian Umum.
6	Input data transaksi pengeluaran pemerintah tanpa ADK di minikomputer KAR Jakarta
7	DJA KPKN menyerahkan DS pengeluaran pemerintah ke KAR.
8	Mencek kesamaan antara kode pos dan kode bagian anggaran.
9	Seksi verifikasi mencocokkan DS dengan RTH dan merecheck RTH yang telah dicocokkan.
10	SPDA memperbaiki RTH.
11	Seksi verifikasi meminta pembentukan GL <i>entries</i> kepada SPDA.

Subsistem Cash Receipt

No.	Event
1	KAR menerima informasi tabel master dari Kantor Akuntansi Khusus (KAK).
2	KAR menerima ADK <i>interface</i> dan DS

No.	Event
	penerimaan pemerintah dari KTUA.
3	Permintaan DS penerimaan pemerintah ke KPKN.
4	Sub bagian umum memberikan catatan pada seksi verifikasi dan SPDA tentang DS penerimaan pemerintah yang tidak disertai ADK.
5	SPDA mengkonversi data (ADK) yang diterima dari Sub bagian Umum.
6	Input data transaksi penerimaan pemerintah tanpa AD di minikomputer KAR Jakarta.
7	DJA KPKN menyerahkan DS penerimaan pemerintah.
8	Seksi verifikasi mencocokkan DS penerimaan pemerintah dengan RTH dan merecheck RTH yang telah dicocokkan.
9	Seksi verifikasi mencocokkan DS penerimaan pemerintah dengan RTH dan merecheck RTH yang telah dicocokkan.
10	SPDA memperbaiki RTH.
11	Seksi verifikasi meminta pembentukan GL <i>entries</i> kepada SPDA.

Subsistem General Ledger (tidak ada yang perlu disempurnakan/diubah)

No.	Event
1	KAR menerima informasi tabel master dari Kantor Akuntansi Khusus (KAK).
2	SPDA melakukan posting..
3	SPDA mencetak DT&P.
4	Seksi verifikasi membuat pengantar

No.	Event
	ADK dan DT&P untuk instansi.
5	Pencetakan <i>register</i> pengiriman GL detail untuk KP BAKUN, UAW, dan UAE oleh SPDA.
6	Ekspor <i>file</i> GL detail ke KP BAKUN, KAK, UAW, dan UAE.
7	Memasukkan transaksi MP dari UAW ke subsistem buku besar.
8	Pemeriksaan RTH oleh seksi verifikasi.
9	Pembentukan GL <i>entries</i> MP.
10	Posting batch MP ke buku besar.

- **Network Modeling**

Berdasarkan analisa CSF maka network modeling untuk sistem KAR Jakarta menjadi sebagai berikut:

- a. *Location Decomposition Diagram*

Tidak mengalami perubahan karena berdasarkan geografi yang dimiliki sistem KAR Jakarta tersebut tidak menimbulkan masalah.

- b. *Location Conectivity Diagram*

Ada sedikit perubahan, yaitu dengan menambahkan hubungan ke sistem Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Ini dilakukan untuk memecahkan masalah dokumen sumber yang tidak rangkap. Dokumen sumber yang dimaksud adalah dokumen sumber pengeluaran pemerintah, yaitu SPM dan dokumen sumber penerimaan pemerintah, yaitu:

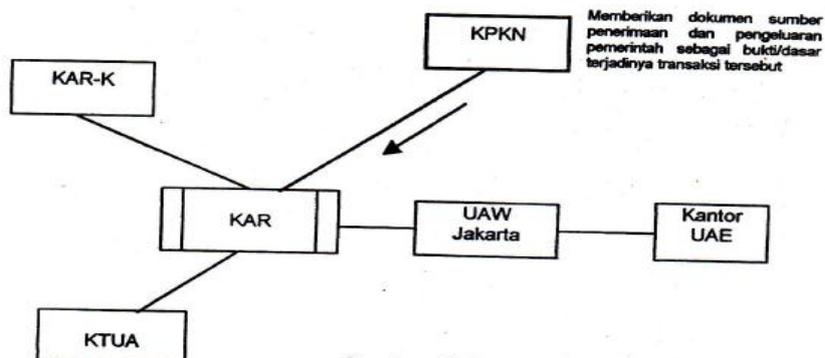
- SSP untuk pendapatan dari penerimaan pajak, *VAT receipt*,

rental tax receipt, dan penerimaan pajak lainnya.

- SSBC untuk pendapatan bea dan cukai
- SSBP untuk pendapatan bukan pajak, seperti pendapatan dari minyak, pendapatan sewa, pendapatan dari penjualan, dan pendapatan lainnya.
- SSBP UYHD untuk UYHD Rutin dan UYHD pembangunan.
- KU-In untuk *transfer* kas.

KTUA mendapat dokumen tersebut dari KPKN dan melaporkannya ke KAR Jakarta. Dengan ditambahkannya hubungan langsung ke KPKN maka dokumen sumber yang tidak ada dapat langsung ditanyakan ke KPKN sebagai instansi yang menerbitkan dan menerima dokumen sumber. Jika dokumen sumber sudah lengkap maka *register* transaksi harian dari KTUA yang telah dicetak oleh SPDA dapat segera dicocokkan dengan dokumen sumbernya sehingga data transaksi yang dihasilkan adalah data yang sah dan akurat

Selama ini KAR Jakarta hanya menerima dokumen sumber dari KTUA.



Gambar 1.17
Location Conectivity Diagram

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Sistem Akuntansi pemerintah pusat di Kantor Akuntansi Regional Jakarta serta masalah-masalah yang dihadapi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Kantor Akuntansi Regional (KAR) adalah instansi vertikal BAKUN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAKUN. Dalam

menyelenggarakan tugasnya KAR berfungsi sebagai pengumpulan dan verifikasi dokumen transaksi keuangan pemerintah, pengolahan data transaksi keuangan pemerintah, pendistribusian hasil pengolahan data akuntansi, pelaksanaan sistem akuntansi pusat, analisis laporan keuangan pemerintah, bimbingan teknis SAP termasuk Sistem Akuntansi Aset Tetap kepada unit-unit

akuntansi diwilayah kerjanya, dan pelaksanaan administrasi KAR.

- KAR Jakarta menggunakan subsistem-subsistem *cash disbursement* (pengeluaran), *cash receipt* (penerimaan), dan *general ledger* (buku besar) untuk menjalankan fungsinya.
- KAR Jakarta memiliki masalah/kendala dalam melaksanakan tugasnya, antara lain dokumen sumber yang tidak lengkap, verifikasi data yang belum cermat, program konversi data yang digunakan masih kurang sempurna, elemen data SPM yang belum benar, dan kurangnya motivasi pegawai dalam menjalankan tugasnya.
- Dari hasil analisis *Critical Success Factor* (CSF) diperoleh bahwa aktifitas-aktifitas kunci yang harus dilakukan oleh KAR Jakarta agar dapat berhasil dalam melaksanakan tugasnya, yaitu menghasilkan data transaksi dan posting serta GL detail yang akurat dapat diidentifikasi maka KAR Jakarta *harus memiliki dokumen sumber yang lengkap, pegawai yang memiliki motivasi tinggi dalam menjalankan tugasnya, prosedur verifikasi yang baik, infrastruktur yang memadai pada instansi terkait serta memperbaiki sistem yang sudah ada.*
- Berdasarkan hasil evaluasi terhadap aplikasi perangkat lunak sistem KAR Jakarta maka dapat diketahui bahwa aplikasi yang harus dipelihara, ditingkatkan, dan dikembangkan lebih lanjut adalah aplikasi *GL, CD dan*

CR karena memiliki nilai bisnis dan teknis yang tinggi. Aplikasi yang harus diperbarui adalah program konversi data karena memiliki nilai bisnis yang tinggi namun nilai teknisnya rendah.

- Dari hasil analisis terhadap proses yang terjadi pada sistem KAR Jakarta dengan menggunakan metode *Data Flow Diagram* (DFD) diketahui bahwa ada prosedur dan program yang harus dibuat ataupun diperbaiki. Prosedur-prosedur atau program harus diperbaiki adalah *prosedur penerimaan dokumen sumber, prosedur untuk verifikasi, prosedur input data dokumen sumber yang tidak disertai ADK, dan program konversi data. Prosedur baru yang harus dibuat adalah prosedur untuk mengecek kesamaan antara kode kantor dan kode bagian anggann pada SPM.*

Hasil analisis terhadap data sistem KAR Jakarta dengan menggunakan metode *Entity Relationship Diagram* (ERD) menghasilkan Tabel relasional yang dapat digunakan untuk membuat usulan data untuk sistem berjalan. Hasil analisis terhadap struktur geografi sistem KAR Jakarta dengan menggunakan metode *Network Modeling* ditemukan bahwa dibutuhkan suatu hubungan antara KAR Jakarta dengan KPKN sebagai instansi yang menerbitkan dokumen sumber pengeluaran kas pemerintah dan penerima dokumen sumber penerimaan kas pemerintah. Hubungan dengan KPKN ini dibutuhkan agar ketidaklengkapan dokumen sumber yang diterima oleh KAR Jakarta dari KTUA dapat

segera dilaporkan ke KPKN dan meminta KPKN untuk mengirimkan dokumen sumber yang dibutuhkan. Dengan demikian maka data transaksi yang dihasilkan dapat lebih

dipertanggungjawabkan karena memiliki dokumen sumber sebagai bukti tedadinya transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinta, Kustadi, *Pengantar Akuntansi Pemerintahan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke-4, ISBN/ISSN : 979-414-537-8, 1990
- Badan Akuntansi dan Keuangan Negara, *Komputerisasi sistem Akuntansi Pemerintah*, Badan Akuntansi dan Keuangan Negara, 1999
- Badan Akuntansi dan Keuangan Negara, *Modul Sistem Akuntansi pemerintah Pusat (SAPP) versi 2.0 untuk Lembaga*, Badan Akuntansi dan Keuangan Negara, 1999
- Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan, *Pengelolaan Keuangan Negara*, Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan, 1999
- BAKUN, *Prosedur Manual SAPP untuk KAR Jakarta: Buku Besar*, BAKUN, 1999
- BAKUN, *Prosedur Manual SAPP untuk KAR Jakarta: Cash Disbursement*, BAKUN, 1999
- BAKUN, *Prosedur Manual SAPP untuk KAR Jakarta: Cash Receipt*, BAKUN, 1999
- BAKUN, *Prosedur Manual SAPP untuk KAR Jakarta: Tabel Master*, BAKUN, 1999
- BAPPENAS, & Departemen Keuangan, *Petunjuk Teknis Pengisian DIP Tahun Anggaran 1999/2000*, BAPPENAS dan Departemen Keuangan, 1999
- Baswir, Revrison, *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2000
- Bodnar, George M. & Hopwood, William S., *Accounting Information System*, edisi 4, (Boston: Allyn & Bacon), 1980
- Connolly, Thomas E. & Begg, Carolyn E., Strachan, Anne D., *Database System*, Addison Wesley Publishing Company, 1997
- H.M.' Yogiarto., *Analisis & Disain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi*, Edisi kedua, cetakan pertama, (Penerbit Andi Yogyakarta), 1999
- Harris, David, *System Analysis & Design*, Edisi 2, (The Dryden Press), 1999

- KAR Jakarta, *Urutan Kerja Pegawai KAR Jakarta*, KAR Jakarta, 2000
- Keputusan Menteri Keuangan No. 1135/KMK/01/1992 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Badan Akuntansi dan Keuangan Negara*
- Keraf, Gorys, *Komposisi*, cetakan ke.11, Ende: penerbit Nusa indah, 1997
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, edisi 3, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekorah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN), 1997
- Perry, James T., & Schneider, Garry P., *Building Accounting Systems*, (South Westem College Publishing), 1995
- PT Ernst & Young Consulting, *Report BAKUN: Cash Disbursement for GAS Release 2.0*, PT Ernst & Young Consulting, 1997
- PT Ernst & Young Consulting, *Report BAKUN: Cash Receipt for GAS Release 2.0*, PT Ernst & Young Consulting, 1997
- PT Ernst & Young Consulting, *Report BAKUN: General Ledger for GAS Release 2.0*, PT Ernst & Young Consulting, 1997
- PT Ernst & Young Consulting, *Report BAKUN: Master Tabel for GAS Release 2.0*, PT Ernst & Young Consulting, 1997
- Robbins, Stephen, *Organizational Behaviour*, Prentice Hall, 1998
- Romney, Marshall B. & Steinbart, Paul John, Cushing, Barry E., *Accounting Information System*, Seventh Edition, Addison Wesley, 1997
- Saputra, Gede, *Sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia*, Jakarta PT.Gramedia, 2000
- Sulaiman, Anita, *Evaluasi Terhadap Sistem Pencatatan Akuntansi Pemerintah di Indonesia*, unpublished Bachelor dissertation, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1992
- Turban, Efraim & McLean. Efraim, Wetherbe, James, *Information Technology for Management*, John Wiley & Son, 1996
- Whitten, Jeffery L. & Bentley, Lonnie D, *System Analysis and Design*, fourth edition, (Irwin McGraw-Hill), 1999
- Yusna, Dewi, *Prospek dan Kendala Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah*, www.mep.ugm.ac.id/kuliah/file.php/1/Artikel/Akuntansi_Pemerintah/mp082200128.pdf, 2001.

ANALISIS RASIO LANCAR RUMAH SAKIT X

Marsdenia^{1*}

¹*Program Studi Akuntansi Program Vokasi Universitas Indonesia*

ABSTRAK - Peningkatan efisiensi pengelolaan rumah sakit secara terus menerus merupakan pedoman pengelolaan keuangan yang mutlak harus diadopsi oleh rumah sakit mana pun. Penelitian ini bertujuan diperolehnya informasi tentang komponen yang berkontribusi terhadap terjadinya fluktuasi rasio lancar RS X tahun 2000, 2001 dan 2002. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan sumber data primer (wawancara mendalam kepada pihak terkait yaitu Direktur RS, Kepala Bagian Keuangan Wadir Adiministrasi dan Keuangan) dan data sekunder (laporan keuangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio lancar RS X masih dalam rentang normal kecuali untuk tahun 2001 yang berada dibawah standar (1.42). Rasio yang lebih sensitif, yaitu *Acid Test Ratio*, masih dalam rentang normal untuk tahun 2000, tetapi pada tahun 2001 dan pada tahun 2002, angka rasio berada pada tingkat dibawah rentang normal. Rasio kas juga berada pada angka dibawah normal, kecuali untuk tahun 2000. Angka perputaran piutang juga berada pada angka yang semakin kecil untuk 3 tahun ini yang memberi makna bahwa butuh waktu yang lebih lama lagi untuk menagih piutang dibandingkan dengan rentang normal hari tertagihnya piutang yaitu antara 14 sampai dengan 20 hari. Untuk angka rasio perputaran persediaan RS X berada dibawah angka rasio normal (24 – 32 kali pembelian per tahun). Sedangkan hari rata-rata persediaan tersimpan digudang adalah selama 16 – 21 hari. Nilai rasio lancar diperoleh dari perbandingan asset lancar dengan kewajiban lancar, dimana secara angka/nominal rasio lancar RS X pada tahun 2002 pada rentang normal, 1,5-2,00 tetapi angka ini memiliki nilai riil yang sebaliknya. Hal ini karena saldo piutang pasien jaminan dinilai pada angka yang terlalu tinggi begitu juga dengan piutang pasien non jaminan/pasien umum/pasien dengan bayar sendiri. Berdasarkan penelitian ini, manajemen RS X memiliki berbagai solusi untuk mengatasi masalah likuiditas yang ditandai dengan menurunnya rasio lancar dan berada pada rentang dibawah normal. Ada beberapa usulan yang bisa diimplementasikan oleh manajemen, yaitu melakukan pengendalian atas pengeluaran kas keluar dan kas masuk, melakukan evaluasi kembali atas kebijakan pemberian piutang kepada pasien, reformasi prosedur persediaan obat.

Kata kunci: Rasio lancar, kas, piutang pasien, persediaan, kewajiban lancar.

ABSTRACT – *Increasing the efficiency of hospital management sustainability is an ongoing financial management guidelines that absolutely must be adopted by any hospital. This study aims at obtaining information about the components that contribute to the fluctuations of the current ratio Hospital X between 2000, 2001 and 2002. This study used quantitative and qualitative approaches, with the primary data source (in-depth interviews to the relevant parties ie Hospital Director, Chief Financial Officer and Vice Director Adiministrasi Finance) and the secondary data source include financial statements. The research shows that RS X's current ratio are still in a normal range except in the year of 2001 was below the standard (1.42). The more sensitive ratio, Acid Test Ratio, is still in normal range in the year of 2000, but in the year of 2001, and 2002, the ratios are in the lowest bend of the normal range. Cash Ratios for many years are also in the lowest bend except for the year of 2000, Receivable turn over ratios for the last three years go smaller showing that receivables took longer time to collect, the normal range for receivable turn over is 14 up to 20 days. Inventory turn over ratios are below the standard range (24-32 times per year), the average inventory held in warehouse*

is between 16 up to 21 days. The value of current ratio is got from comparison between current assets and current liabilities. Nominally, RS X's current ratio in 2002 is in the state bend, namely, 1.5 – 2.00, in the real term, the ratio shows on contradictory pictures. The reasons are a) Guaranteed Receivables are valued above the normal practice (overstated) b) overstated of Non Guaranteed receivables/Personal Receivables.

Based on this research, the author thinks that there are some rooms for RS X's management to fit their current ratio problem. There are several suggestions that the management can adopt, namely controlling cash outflow and cash inflow, reevaluating receivables policy, reforming the supply of inventories (medicine) procedures.

Keywords: Current ratio, cash, patient receivables, inventory, current liabilities.

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Peningkatan efisiensi pengelolaan rumah sakit secara terus menerus merupakan pedoman pengelolaan keuangan yang mutlak harus diadopsi oleh rumah sakit mana pun, dimana efisiensi yang tinggi akan meningkatkan keunggulan kompetitif dan peningkatan pendapatan dan akhirnya meningkatkan kemampuan keuangan rumah sakit (RS) untuk mensejahterakan anggotanya (Setiawan, 1996).

Statistik perkembangan RS Swasta memperlihatkan bahwa telah terjadi pertumbuhan yang sangat pesat baik itu untuk jenis RS umum mau pun RS khusus seperti RS Khusus Jiwa, Kusta atau Tuberculosis. (Depkes RI, 1998), semakin besarnya peranan pelayanan kesehatan rumah sakit oleh sektor swasta ditandai dengan tingkat pertumbuhan yang rumah sakit swasta sebesar 142% untuk jenis pelayanan umum.

RS X merupakan rumah sakit swasta yang setahap demi setahap berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanannya, dengan menambah sarana penunjang medis, jumlah

tempat tidur (TT), serta alat-alat medis sehingga sekarang telah mempunyai 126 TT, termasuk tipe madya (kelas C). RS X telah menjalin kerjasama dengan instansi-instansi se Jabotabek, telah menerima sertifikasi Akreditasi penuh untuk lima standar pelayanan rumah sakit dari Depkes pada 1 September 1999.

Dari laporan keuangan RS X periode 2000 s/d 2002 untuk analisis rasio likuiditas, terlihat bahwa cenderung terjadi penurunan yang cukup lebar, terutama untuk angka rasio lancar tahun 2001 yang turun hampir setengah dari angka rasio lancar untuk tahun 2000. Begitu juga dengan angka rasio cair, rasio kas dan rasio-rasio likuiditas lainnya cenderung terjadi penurunan, yang segera harus dicermati penyebabnya. Memang rasio lancar lebih menggambarkan secara komprehensif dari kondisi likuiditas. Dimana rasio cair dan rasio kas lebih menggambarkan sensitivitas dari kemampuan likuiditas dari RS karena rasio cair diperoleh dari mengeluarkan komponen persediaan dari komponen harta lancar dari formula rasio lancar, sedangkan rasio kas adalah mengeluarkan komponen piutang dari komponen harta lancar (neumann, 1995). Rasio lancar diperoleh dari

perbandingan antara harta lancar dengan kewajiban lancar dengan ukuran baku 1.75-2.75 (Sjaaf, 2000). Terlihat pada rasio lancar RS X yang sudah tidak dalam ukuran baku yaitu sebesar 1.42 pada tahun 2001.

Dari Kinerja Pelayanan RS X secara kasar terlihat bahwa untuk BOR delapan

tahun terakhir cenderung terjadi penurunan terus sampai tahun 2002 (Tabel 1.1). Penurunan antara lain karena faktor eksternal rumah sakit yang tidak bias diintervensi yaitu terjadinya krisis moneter dan krisis global.

Tabel 1.1
Kinerja pelayanan RS X 8 tahun (1995 – 2002)

Indikator	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
BOR	70,45	66,71	69,00	53,27	54,00	67,97	68,40	65,50
LOS	4,06	4,14	3,81	3,69	3,70	3,48	3,38	3,45
BTO	67,55	62,02	66,50	51,80	53,43	68,42	71,06	68,50
TOI	1,60	1,97	1,68	3,29	3,14	1,71	1,62	1,84
NDR	0,9	1	0,89	1,61	1,36	1,48	1,37	1,32
TT	123	121	121	127	127	126	126	126

Sumber: bagian Informatika RS X

II. Pokok Masalah

- Fluktuasi saldo kas, bank dan deposito 2000, 2001, 2002 yang cukup lebar
- Fluktuasi saldo piutang tahun 2000, 2001 dan 2002 yang cukup lebar dan saldo piutang yang besar
- Fluktuasi saldo perediaan obat tahun 2000, 2001, 2002 yang cukup lebar dan saldo persediaan obat yang besar

a. Pertanyaan penelitian

- Komponen apa saja yang berkontribusi terhadap terjadinya fluktuasi kas, bank, deposito serta apa/bagaimana solusi pengelolaan kas, bank, deposito?

- Komponen apa saja yang berkontribusi terhadap terjadinya fluktuasi saldo piutang dan besarnya saldo piutang, apa/bagaimana solusi pengelolaan piutang?
- Komponen apa saja yang berkontribusi terhadap terjadinya fluktuasi saldo persediaan dan besarnya saldo persediaan, apa/bagaimana solusi pengelolaan persediaan?

III. Tujuan

a. Tujuan Umum

Diperolehnya informasi tentang komponen yang berkontribusi terhadap terjadinya fluktuasi

rasio lancar RS X tahun 2000, 2001 dan 2002 sehingga bisa memberikan masukan kepada pihak manajemen agar bisa menjaga rasio lancar dalam batas yang aman dalam rangka mempertahankan kelangsungan RS X dimasa yang akan datang.

b. Tujuan Khusus

- Diketuainya informasi tentang komponen yang berkontribusi terhadap terjadinya fluktuasi kas, bank, deposito dan solusi pengelolaan kas, bank, deposito
- Diketuainya informasi tentang komponen yang berkontribusi terhadap terjadinya fluktuasi piutang dan solusi pengelolaan piutang
- Diketuainya informasi tentang komponen yang berkontribusi terhadap terjadinya persediaan obat dan solusi pengelolaan persediaan obat

IV. Metodologi Penelitian

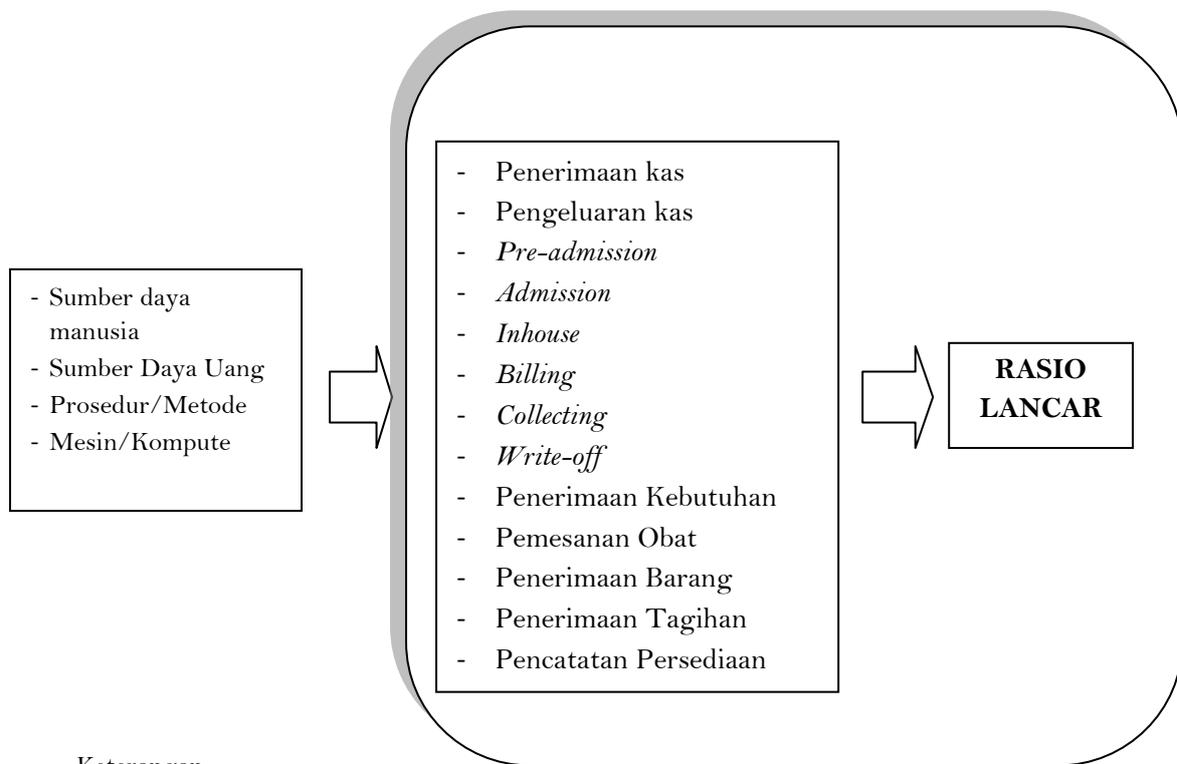
a. Kerangka Konsep

Fluktuasi rasio lancar RS X untuk tahun 2000, 2001 dan 2002 bisa dianalisis dengan pendekatan sistem untuk melihat rasio lancar sebagai suatu indikator kinerja RS secara komprehensif/menyeluruh. Menurut Neumann (1995), rasio lancar diperoleh dari aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar

yang menggambarkan kemampuan rumah sakit didalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo. Dimana Aktiva lancar rumah sakit terdiri dari kas, piutang, persediaan dan kewajiban lancar terdiri dari kewajiban kepada vendor dan uang muka pasien.

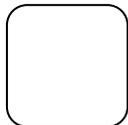
- a. input : Penderita yang berobat jalan dan menginap, tenaga medis, para medis dan non medis (Man), SDU (Sumber Daya Uang), Metode/Prosedur dan peralatan medis dan non medis/mesin/Komputerisasi (sarana prasarana) (Modifikasi PERDHAKE, 1992)
- b. Proses : dimana untuk proses diambil dari kegiatan yang ada di rumah sakit yang akan menghasilkan penerimaan kas, pengeluaran kas, *pre-admission*, *admission*, *inhouse*, *Collecting*, *Write-off*, Permintaan obat/Kebutuhan. Pengadaan/Pemesanan, Penerimaan Barang/Obat, Penerimaan Tagihan
- c. *Output* : Kas, Piutang, Persediaan Obat, Rasio Lancar diperoleh dari aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar yang menggambarkan kemampuan rumah sakit didalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo, $(kas+piutang+persediaan) / (kewajiban\ pada\ vendor+Uang\ Muka\ Pasien)$ (Neumann, 1995)

Gambar 1.1
Kerangka Konsep Penelitian



Keterangan :

= Area Penelitian



b. Definisi Operasional

Proses

- Penerimaan kas adalah setiap transaksi yang diterima dari hasil penjualan jasa pelayanan mau pun dari sumber lainnya. Sumber data: analisis secara mendalam laporan keuangan serta wawancara mendalam kepada pihak terkait dengan penerimaan kas yaitu Kasir dan melakukan pengamatan proses penerimaan kas di lapangan
- Pengeluaran kas adalah : setiap transaksi yang dikeluarkan untuk membayar biaya-

biaya baik itu pengeluaran operasional, pengeluaran pembiayaan, dan pengeluaran pengembangan yang menyebabkan berkurangnya saldo kas. Sumber data : analisis secara mendalam laporan keuangan serta wawancara mendalam kepada pihak terkait dengan pengeluaran kas yaitu Kepala urusan perbendaharaan dan melakukan pengamatan proses pengeluaran kas di lapangan

- *Pre Admission*/Pra penerimaan adalah tahap awal untuk mendapatkan informasi yang diperlukan oleh RS dari pasien/penanggungjawab sebelum pasien mendapat layanan kesehatan. Sumber data : wawancara mendalam kepada pihak terkait dengan pra penerimaan yaitu Bagian Loker Pendaftaran, dan atasannya yaitu Kepala Bagian Informatika.
- *Admission*/ Penerimaan adalah tahap penerimaan pasien di RS untuk mendapatkan layanan kesehatan. Sumber data : wawancara mendalam kepada pihak terkait dengan pra penerimaan yaitu Bagian Loker Pendaftaran, dan atasannya yaitu Kepala Bagian Informatika.
- Tahap Perawatan/ *inhouse* adalah proses pembebanan biaya atas pelayanan yang diberikan oleh RS baik pelayanan medis mau pun penunjang medis. Sumber data : wawancara mendalam kepada pihak terkait dengan pencatatan rincian biaya pasien yaitu Penata Rekening, bagian Piutang Pasien dan melakukan pengamatan di lapangan.
- *Billing*/Penataan rekening adalah proses penataan rekening tagihan dari pasien yang menerima pelayanan kesehatan. Sumber data : wawancara mendalam kepada pihak terkait dengan pencatatan rincian biaya pasien yaitu Staf Penata Rekening, bagian Piutang Pasien dan laporan keuangan yang dihasilkan dan melakukan pengamatan proses penataan rekening di lapangan.
- *Collecting*/Penagihan adalah penagihan yang dilakukan oleh urusan penagihan atas jasa pelayanan yang telah diberikan oleh RS yang belum dibayar oleh pasien/Penanggung jawab pasien baik selama atau sesudah lepas dirawat. Sumber data : analisis secara mendalam laporan keuangan serta wawancara mendalam kepada pihak terkait dengan penagihan piutang yaitu Penata rekening, Bagian Piutang dan Bagian Penagihan/ *collecting* dan melakukan pengamatan proses penagihan piutang di lapangan.
- penutupan rekening/ *write-off* adalah rekening pasien ditutup dan dihapusbukukan dari catatan piutang bila pasien sudah melunaskan atau kebijakan pimpinan RS menghapus piutang tsb dengan alasan umur piutang yang sudah tua. Sumber data : analisis secara mendalam laporan keuangan serta wawancara mendalam kepada pihak terkait dengan penutupan rekening yaitu Kepala Bagian Keuangan dan Bagian

Penagihan/*collecting* dan melakukan pengamatan proses penutupan rekening piutang di lapangan.

- Permintaan kebutuhan adalah rekapitulasi kebutuhan dari masing-masing unit RS dalam rangka menjalankan operasional layanan kesehatan sehari-hari. Sumber data : analisis secara mendalam laporan keuangan serta wawancara mendalam kepada pihak terkait dengan Permintaan kebutuhan yaitu Kepala Bagian Keuangan dan kepala Departemen Farmasi, Bagian Anggaran dan melakukan pengamatan proses penutupan rekening piutang di lapangan

Out Put

Rasio lancar adalah rasio yang menggambarkan kemampuan rumah sakit didalam memenuhi kewajiban lancarnya yang jatuh tempo dengan menggunakan harta lancarnya, Sumber data : analisis secara mendalam laporan keuangan serta wawancara mendalam kepada pihak terkait yaitu Direktur RS, Kepala Bagian Keuangan Wadir Adiministrasi dan Keuangan.

Rancangan Penelitian

Menggunakan rancangan penelitian operasional yaitu penelitian yang menggunakan data kuantitatif dan data

kualitatif untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan peneliti. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam (Sanapiah, 1990). Data kuantitatif diperoleh melalui data keuangan rumah sakit beserta dokumen pendukungnya dianalisis.

1. Lokasi dan waktu penelitian

Di RS X untuk laporan keuangan tahun 2000, 2001, dan 2002, khususnya untuk transaksi Aset lancar dan kewajiban lancar

2. Informan Penelitian

Menggunakan teknik sampling metode tak acak (*Non Probabilty Sampling*) yaitu *judgment Sampling/Purposive Sampling*. Informan penelitian Direktur RS, Wadir Adm & Keu, KabagKeu beserta stafnya terkait transaksi Aset lancar dan kewajiban lancar.

3. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data primer melalui pengamatan langsung dan data sekunder dipeoleh melalui laporan keuaangan dan perincian data keuangan beserta dokumen-dokumen pendukungnya.

4. Pengolahan Data :

- *editing* adalah data yang terkumpul melalui proses *editing* untuk mengetahui kualitas data atau informasi yang

diperoleh, apakah sudah sesuai dan memadai.

- **Pengelompokan data**, dimana data yang diperoleh dikelompokkan sesuai kriteria yang sesuai atau sejenis untuk mempermudah peringkasan
- **Ringkasan Data**, dimana setelah mengatur data, langkah selanjutnya adalah meringkas data menurut kelompok atau kriteria yang sama.
- **Analisis Data**, dilakukan analisis data sesuai topik/makalh untuk menjawab tujuan penelitian yang berasal dari kuesioner saat wawancara mendalam. Juga dilakukan perbandingan antara temuan atau informasi yang diperoleh dengan tunjauan pustaka atau literatur yang relevan
- **Penyajian Data**, atas data yang sudah diringkas dalam bentuk narasi yang sesuai berdasarkan temuan dan ringkasan peneliti dari para informan.

5. Proses Penelitian

Pengumpulan data primer dan sekunder dilaksanakan di RS X dari bulan Maret sampai dengan Juni 2003. Data Primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yang terpilih, sedangkan data sekunder diperoleh melalui observasi dan pengumpulan

dokumen-dokumen dan laporan-laporanyang berhubungan dengan Bagian Keuangan dan Bagian Farmasi menyangkut persediaan obat. Laporan dan dokumen tersebut berupa laporan keuangan, buku besar penerimaan kas, buku besar pengeluaran kas, buku besar piutang, daftar piutang, buku besar persediaan, laporan *stock opname* persediaan obat per 31 Desember 2002. Observasi lapangan untuk Proses dan Standar Operasional Prosedur untuk pencatatan persediaan obat-obatan, penilaian dan pengawasan persediaan obat-obatan, prosedur pencatatan kas baik di bank mau pun penerimaan kas lainnya, prosedur pengeluaran kas bank dan kas RS, prosedur perencanaan penerimaan kas dan pengeluaran kas (Anggaran Kas). Untuk kebijakan dan pendalaman materi yang diteliti penulis melakukan wawancara mendalam dengan Direktur sebagai pembuat kebijakan garis besar untuk keseluruhan RS, Wadir Adm & Keu sebagai tangan kanan yang akan menerjemahkan kebijakan yang telah diputuskan oleh Direktur, Kabag Keu sebagai manajer yang mengepalai Urusan Keuangan dan Akuntansi, Kabag Instalasi Farmasi sebagai Manajer Persediaan

Obat-obatan, Pelaksana di Bagian Keuangan dan Farmasi yaitu: Ka. Ur. Akuntansi, Ka. Ur. Piutang, Ka. Ur. Perbendaharaan, Ka. Ur. Anggaran, Koordinator Uang Muka Pasien Rawat Inap. Selanjutnya dilakukan kajian yang mendalam atas hasil wawancara dengan informan-informan diatas.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah adanya perbedaan waktu antara keadaan operasional/proses sekarang dan pada saar rasio lancar itu dihasilkan tahun 2000, 2001, 2002, sedang data dikumpulkan sejak Maret sampai dengan Juni 2003. Adanya data yang bersifat *confidential* yaitu sisi modal dari Neraca dan Biaya Administrasi dan Umum juga membuat pembahasan hasil penelitian memiliki keterbatasan pula.

Keterbatasan lainnya dalam penelitian ini adalah tidak dilakukannya *Focus Group Discussion* (FGD) disebabkan karena sulitnya untuk mengumpulkan pihak-pihak yang terkait secara bersamaan karena memiliki kesibukan masing-masing dan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Sehingga teknik penelitian riset operasional dengan mengumpulkan data kuantitatif berupa laporan keuangan dan data kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan

observasi partisipatif. Dengan tidak dilakukan FGD maka dalam penelitian ini tidak dapat diperoleh umpan balik dari setiap bagian/unit atas unit/bagian yang lain untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan wawancara mendalam alur pembicaraan hanya satu arah dengan FGD diperoleh informasi dari pembicaraan timbal balik. Tapi walau pun hanya dengan wawancara mendalam, *cross check* data tetap dilakukan untuk menjamin validitas.

Penelitian ini memfokuskan kepada analisis rasio lancar yang memprioritaskan pada proses dan *output* dari perkiraan-perkiraan harta lancar. Penelitian ini menyangkut perkiraan yang mempunyai porsi terbesar/*significant* yaitu mencakup proses penagihan piutang rawat inap, proses terjadinya saldo kas, proses persediaan obat farmasi (porsi terbesar untuk perkiraan persediaan). Rasio lancar diperoleh dari data sekunder RS tanpa melihat kembali tingkat *accuracy* dari laporan keuangan tersebut, tetapi laporan keuangan RS X senantiasa di audit oleh pihak independen yaitu Kantor Akuntan Publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang artinya laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Penelitian ini dilakukan fokus pada proses dimana yang dilihat mencakup aspek perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan koordinasi. Kemudian dari sisi *output* dianalisis rasio lancar untuk tiga tahun yaitu 2000, 2001 dan 2002.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

I. Kas, Bank, Deposito

a. Penerimaan Kas

Pelaksanaan dilapangan proses pembayaran tunai di RS X diterima di kasir terpisah yaitu kasir Apotik, kasir UGD, kasir Poliklinik/Rawat Jalan dan Kasir Sentral (Kasir Rawat Inap). Ketiga kasir akan memberikan laporan memorial kas ke kasir sentral dengan urutan nomor sebagai kontrol penerimaan dan pencatatan kas. Kasir Apotik merupakan staf bagian keuangan bekerja dengan 3 shift supaya pasien dapat telayani 24 jam sehari. Kasir sentral hanya 2 shift, setelah itu penerimaan kas diserahkan ke kasir apotik/rawat jalan yang bekerja 3 shift.

Kontrol Penerimaan kas dilakukan oleh Kabag Keuangan sesuai sumber penerimaan kas tersebut, dimana penerimaan dari Piutang Pasien dilakukan cross check ke daftar piutang dengan cheque yang masuk ke bank, sedangkan untuk pasien rawat jalan belum dilakukan cross check dengan jumlah pasien dibagian pendaftaran/admission, untuk uang muka pasien rawat inap juga belum dilakukan cross check dengan jumlah pasien.

b. Pengeluaran Kas

Pengeluaran kepada pihak ketiga dibuat dengan membuat rekapitulasi bukti penerimaan barang yang discocokkan dengan faktur dari pihak ketiga lalu diminta persetujuan ke Kabag Keu baru dilakukan pembayaran, sedangkan untuk transaksi pengeluaran rutin dikeluarkan langsung oleh Kabag Keu melalui Ka Ur Perbendaharaan dan untuk pengeluaran non rutin harus melalui persetujuan Direktur/ Pimpinan RS

Tabel 1.2
Analisis vertikal Kas, Piutang dan Persediaan per tanggal 31 Desember 2000, 2001 dan 2002

Akun	2002 (rupiah)	%	2001 (rupiah)	%	2000 (rupiah)	%
ASET LANCAR						
Kas, Bank, desposito	483.179.921	22	624.296.522	30	929.122.882	40%
Piutang Instansi	792.780.581	35	665.641.118	32	519.083.140	22
Piutang perorangan	352.798.640	16	310.200.945	15	269.831.345	12
Cadangan Penghapusan Piutang	(85.515.750)	(4)	(73.382.2700)	3	(90.605.675)	4
Piutang karyawan	92.791.755	4	97.650.581	5	116.239.781	5
Persediaan	590.861.745	26	451.779.712	21	558.951.922	24
Biaya dibayar dimuka	6.804.000	0.30	34.053.333	2	23.155.000	1
Total Aset lancar	2.233.700.892	100	2.110.239.941	100	2.325.778.395	100
KEWAJIBAN LANCAR						
Utang <i>Supplier</i>	642.522.972	60	850.642.677	58	644.218.309	64
Biaya YMH dibayar	325.182.853	30	506.889.282	34	38.860.200	4
Utang UM Pasien	64.277.150	6	69.792.900	5	45.210.946	5
Utang Pajak	45.757.808	4	48.692.535	3	273.731.669	27
Total Kewajiban Lancar	1.077.740.783	100	1.476.017.394	100	1.002.021.124	100
MODAL KERJA	1.155.960.109		634.222.547		1.323.757.271	

Sumber : Laporan Keuangan RS X, diolah kembali oleh penulis

Akun kas, bank dan deposito selama tiga tahun terakhir yaitu 2000, 2001 dan 2002 secara prosentase terus menurun yaitu 40%, lalu 30% terakhir tahun 2002 hanya 22% (Tabel 1.3) dan jika dilihat kecenderungannya (*trend*) selama tiga tahun terakhir ini memang mengalami penurunan terus menerus yaitu sebesar 22% untuk tahun

2000, turun sebesar 33% pada tahun 2001 dan turun sebesar 23% pada tahun 20X2 (Tabel 1.3). Hal ini terjadi karena RS X melakukan pencairan dana deposito untuk keperluan renovasi Poliklinik/Unit Rawat Jalan, adanya proses pembuatan *business plan*.

Tabel 1.3
Analisis horizontal Pendapatan Bersih Layanan RS X untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2000, 2001 dan 2002

Jenis Pelayanan	Naik/ (turun)	2002 Pendapatan- HPP	Naik/ (turun)	2001 Pendapatan - HPP	Naik/ (Turun)	2000 Pendapatan- HPP
Rawat Jalan	35	435.566.723	(194)	323.345.343	(220)	(345.243.424)
UGD	7	(194.311.405)	(134)	(181.668.902)	7773	533.684.300

Jenis Pelayanan	Naik/ (turun)	2002 Pendapatan- HPP	Naik/ (turun)	2001 Pendapatan - HPP	Naik/ (Turun)	2000 Pendapatan- HPP
Rawat Inap Umum	(4)	1.111.723.818	28	1.159.926.558	81	909.185.171
Rawat Inap Anak	34	(150.773.351)	(210)	(112.717.558)	32	102.392.279
Rawat Inap kebidanan	5	312.761.143	(42)	297.660.418	62	516.167.005
Farmasi	10	1.650.519.949	19	1.506.681.235	36	1.263.474.748
Laboratorium	29	786.262.451	5	611.174.340	52	579.882.716
Radiologi	47	322.211.072	3	219.239.944	30	212.227.949
Kamar Bedah	20	912.720.093	49	761.398.261	33	512.045.824
Utilitas Lain	(2)	1.215.699.795	(5)	1.246.688.005	(414)	1.308.012.180
TOTAL	10	6.402.380.288	4	5.831.727.644	113	5.591.828.748

Berdasarkan analisis horizontal, diperoleh informasi bahwa pendapatan bersih RS X naik pada tahun 2000 (113%), pada tahun 2001 mengalami peningkatan yang sangat kecil (4%) dan pada tahun 2002 kenaikannya hanya 10% (Tabel 1.3). Jika dicermati dari kinerja layanan (Tabel 1.1) terjadi penurunan BOR RS X untuk tiga tahun terakhir dan berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian keuangan, selama ini terus dilakukan penyesuaian tarif dan belum kearah peningkatan efisiensi didalam mengantisipasi kenaikan pengeluaran operasional RS.

Jika dilihat dari analisis vertikal pada komponen pendapatan kotor untuk tahun 2000, 2001 dan 2002 terlihat bahwa unit produksi yang masuk dalam tiga besar adalah Farmasi, Unit Rawat Inap Umum, dan Kamar bedah. Tetapi jika dilihat dari komponen pendapatan bersih, unit

produksi yang masuk dalam tiga besar adalah Farmasi, Rawat Inap Umum dan Utilitas lainnya kecenderungan dari pendapatan bersih yang berfluktuasi ini tentu akan berdampak pada jumlah penerimaan kas RS X yang akan berdampak pada likuiditas dan rasio lancar RS

Anggaran yang dibuat haruslah sejalan dengan visi dan misi RS yang tertuang di Renstra dan dijabarkan di *Business Plan*, anggaran bisa dijadikan sebagai suatu komitmen untuk efisiensi sesuai dengan target yang telah tercantum di anggaran tersebut. Uang kas berarti komitmen setiap anggota RS untuk mencapai suatu saldo yang diperoleh dari selisih penerimaan kas yang diperoleh dari pasien dan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mendapatkan penerimaan tersebut. Disebut memberikan dampak bagus

untuk arus kas jika penerimaan kita terima diatas pengeluaran yang dilakukan.

Di RS X, sumber penerimaan kas dari unit produksinya yaitu rawat jalan, rawat inap, dan unit penunjang seperti laboratorium, farmasi, radiologi dan lain-lain, dimana masing-masing unit produksi menetapkan target jumlah pasien yang akan berkunjung sesuai dengan kemampuan yang ada serta ramalan permintaan yang akan terjadi dengan mempertimbangkan juga aspek eksternal yaitu ekonomi penduduk, tren yang sedang berlaku, serta regulasi dan epidemiologi penyakit. Sehingga didalam membuat anggaran kas menurut Bedford (1992), anggaran operasi suatu organisasi merupakan rencana tindakannya, biasanya dinyatakan dalam satuan uang, untuk periode tertentu, biasanya satu tahun. Selanjutnya Bedford mengatakan bahwa, dalam proses penganggaran, anggaran umumnya disusun dengan menggabungkan anggaran-anggaran divisi atau departemen, yang merupakan tanggungjawab manajer divisi/departemen.

Di RS X anggaran kas memang sudah dibuat berdasarkan permintaan masing-masing unit ditambah kemungkinan sekian persen, tetapi sampai saat ini belum ada evaluasi atas realisasi anggaran tersebut untuk masing-masing unitnya. Padahal menurut bedford (1992), suatu sistem pengendalian manajemen ada unsur evaluasi setelah perencanaan dan akan pelaksanaan dari

anggaran tersebut. Perlunya diinformasikan ke masing-masing unit akan anggaran/target, sehingga diketahui saldo yang harus dicapai sebagai motivator didalam melaksanakan tugas sehari-hari. Dan sudah saatnya sekarang ditimbulkan *self control* atas saldo pengeluaran masing-masing unit dengan mengetahui saldo anggaran yang masih tersisa setiap akan mengajukan permintaan ke Bagian Pengadaan.

Untuk Pelaksanaan penerimaan kas yang diterimakan di kasir sentral dari tiga kasir lainnya yaitu kasir rawat jalan/apotik, kasir rawat jalan (dekat *admission*) dan kasir UGD, perlu ditingkatkan akuntabilitasnya. Menurut Arens (1994), suatu pengendalian dari kas adalah adanya *segregation of duties* yaitu adanya pemisahan antara pihak yang melakukan fungsi penerimaan, pencatatan dan penyimpanan dari fisik kas tersebut. Sehingga akuntabilitas dari saldo kas dapat dipertanggungjawabkan dan tertib administrasi kas dapat dijalankan.

Perencanaan dan pengendalian dari kas mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Perencanaan yang tepat, sehingga dana yang diperoleh dapat digunakan untuk operasional usaha sehari-hari baik untuk jangka panjang mau pun jangka pendek
2. Penggunaan dana yang seefisien mungkin

3. Menciptakan akuntabilitas penerimaan kas dan disimpan dalam keadaan yang aman sampai kas itu disetor ke bank

II. Piutang

Pada saat ini belum ada tim khusus untuk menagih pasien perorangan yang jumlahnya 12-16% dari harta lancar RS X, selama ini staf penagihan instansi juga merangkap untuk staf penagihan perorangan. Saldo perkiraan piutang perorangan untuk tahun 2002 sebesar Rp 352.798.640,- dengan komposisi 30% berumur diatas 3 tahun yang artinya sudah tidak lancar lagi. Berdasarkan wawancara dengan Kabag Keu, kemungkinan untuk tertagihnya juga sangat tipis. Sebenarnya RS X sudah melakukan penghapusbukukan Rp 85 juta (85%). Tetapi karena RS X tidak melakukan penyisihan piutang, maka nilai terealisasi dari piutang jauh dibawah saldo yang disajikan dilaporan keuangan, yang angkanya kita gunakan untuk menghitung rasio lancar.

a. Piutang

Menurut Mehta (1988), RS perlu membuat prosedur kredit kepada pasien untuk mengetahui kemampuan dari pasien didalam membayar tagihan RS, tagihan yang dibuat lengkap, baik dan alternatif prosedur penagihan piutang pasien.

Pintu gerbang masuk pasien yaitu di *Admission* perlu dibuat aturan yang lebih jelas dan

informatif kepada pasien, sehingga menjamin bahwa pasien mendapatkan layanan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini berlaku terutama untuk pasien rawat inap perorangan RS X didalam pemberian kredit kepada pasien selama ini bersifat agak longgar karena pertimbangan segmen pasar menengah ke bawah dan kurang tegasnya para karyawan terhadap calon pasien/orang sakit. *Admission* sebagai penjaga gawang depan RS untuk menyaring pasien yang masuk selama ini kurang berjalan, karena ada unsur tidak tega demi kemanusiaan. Sehingga pasien bisa masuk mendapat layanan tanpa ada kejelasan status pasien jaminan tersebut, apakah layanan diperoleh pasien termasuk yang mendapat penggantian dari asuransi/pihak ketiga.

Dilapangan, selama ini untuk pasien rawat inap dengan status sudah boleh pulang oleh dokter dan belum mampu melunasi kewajibannya bisa langsung meninggalkan rumah sakit dengan memberikan jaminan yang kurang kuat untuk menjamin si pasien untuk melunasi hutangnya diwaktu yang akan datang, misalnya KTP, sehingga pasien pun kurang terpacu untuk melunasi piutangnya.

Padahal RS X sudah memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk pasien rawat inap yang kalau dijalankan dilapangan tentu piutang pasien tidak akan bersaldo sebesar saat ini (tahun 2001).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia (PSAK, 2011) untuk Piutang yang berumur diatas satu tahun sebaiknya diklasifikasikan di Neraca (Laporan Posisi Keuangan) sebagai Piutang tidak lancar. Hal ini tentu akan memiliki dampak terhadap angka Rasio Lancar RS X, yang akan semakin kecil karena aset lancar (piutang) menjadi lebih kecil lagi karena formula rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar.

Berdasarkan dari wawancara mendalam dengan Kepala Bagian Keuangan RS X diperoleh informasi bahwa 70-80% Piutang tak tertagih memang berasal dari pasien tanpa jaminan/pasien bayar sendiri dan umur piutangnya juga diatas 90

hari dan bahkan ada yang diatas 360 hari. Sayangnya jumlah pendapatan RS dari pasien tanpa jaminan ini tidak dapat diperoleh datanya sehingga tidak diketahui proporsi tagihan pasien perorangan yang tidak tertagih. Selama ini RS X belum melakukan manajemen piutang perorangan yang efektif, sehingga piutang itu sebenarnya sudah tidak dimunculkan lagi di Neraca, ini menyebabkan saldo piutang di Neraca RS X menjadi lebih catat/*over stated*. Sehingga artinya angka rasio lancar RS X tahun 2001 jauh lebih kecil lagi dari angka yang ada sekarang.

Berdasarkan telaah saldo Piutang yang dimunculkan di Neraca RS X pada 31 Desember 2002 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Umur Piutang RS X tahun 2002

No.	Klasifikasi Piutang	0-30 hari	31-60 hari	61-120 hari	>120 hari	Jumlah
1	Piutang Instansi	275.001.450,-	176.075.400,-	70.524.000,-	197.578.881	719.179.731
2	Piutang PT Askes		73.540.850*			73.540.850
3	Piutang Perorangan	323.194.560	23.312.550	4.550.945	301.740.585	352.798.640
	Jumlah	296.196.010	272.928.810	75.074.945	499.319.466	1.143.519.231

Sumber : Keuangan RS X, diolah kembali

* berdasarkan estimasi direktur keuangan

Pada tabel diatas terlihat bahwa Piutang Instansi mempunyai umur yang cukup tua sebesar Rp 197.578.881 yang artinya, tingkat kemungkinan untuk tertagihnya (penerimaan kas) adalah sangat kecil sekali, sedangkan pencatatan

akuntansi di Indonesia menganut konservatisme (PSAK, 2012), yang artinya kalau memang kemungkinan tertagihnya sangat kecil dan jika setelah ditelusuri keberadaan bisnis dari instansi itu juga sedang bermasalah, maka bisa dipastikan

saldo akun piutang yang disajikan juga lebih catat/*overstated*. Perlu dilakukan telaah lebih lanjut atas catatan historis dari si pemberi jaminan jika kelak akan membuat kontrak dengan pihak ketiga untuk mencegah terjadinya ketidakmampuan bayar dari perusahaan penjamin.

Untuk saldo akun piutang Askes sebesar Rp 73.540.850 (7% dari total piutang), RS X tidak mempunyai dokumen pendukung atas umur piutang ini, sehingga tidak diketahui juga apakah bisa tertagih atau tidak, jangan sampai likuiditas RS X merupakan likuiditas yang tidak sebenarnya/semu.

Pada saldo Akun Piutang Perorangan didominasi oleh piutang berumur diatas 120 hari (85%), yang artinya tingkat konversi untuk menjadi kas/penerimaan kas menjadi sangat kecil juga, apalagi ini pasien perorangan dimana alamatnya sudah tidak sama lagi dengan yang tercantum di data RS. Pada saat dihitung *cost benefit* untuk mengahai juga tidak seimbang. Dimasa yang akan datang perlu disiplin dari semua pihak terkait untuk menjalankan prosedur penerimaan pasien perorangan, jaminannya perlu dibuat signifikan dari pada hanya sekedar KTP dan BPKB kendaraan. Perlu komitmen tinggi mulai dari *admission*, perawat mau pun bagian keuangan untuk menjalankan prosedur pemberian sanksi/evaluasi atas penundaan pasien untuk setiap penundaan menyetorkan uang

muka/deposit atau cicilan selama pasien sudah masuk ruang rawat inap. Pada RS X juga terjadi keterbatasan atas Sumber Daya Manusia yang melakukan penagihan dari Bagian Keuangan.

b. Persediaan

Berdasarkan pengamatan dilapangan diperoleh Alur Permintaan Barang, dimana terlihat bahwa Apotek/Depo setiap hari kerja membuat Daftar Permintaan Barang yang diikuti dengan Laporan Pemakaian obat Ruangan (Bukti Pemakaian Obat Ruangan), lalu diajukan ke gudang farmasi dalam rangka untuk penyediaan barang, lalu barang obat dikeluarkan, catat dikartu persediaan setiap transaksi terjadi.

Untuk mengetahui jumlah persediaan obat yang ada baik di Depo, Apotik mau pun ruangan baik UGD, Rajal mau pun Ranap dilakukan *stock opname* setiap bulan. Belum ada kartu persediaan dimasing-masing tempat tersebut untuk mengetahui mutasi persediaan antara saldo awal dengan saldo persediaan tersisa. Sedangkan untuk mengetahui nilai persediaan obat yang tercantum di Laporan Keuangan diperoleh dengan LIFO (*Last In First Out*), dimana dipakai harga terakhir untuk item obat yang sama.

Fluktuasi kas, Piutang dan Persediaan Obat.

Modal kerja secara kecenderungan terlihat menurun tajam pada tahun 2001 lebih dari

setengah modal kerja yang dimiliki tahun sebelumnya (tahun 2000), tetapi pada tahun 2002 naik hampir setengah modal kerja tahun 2001.

Berdasarkan analisis vertikal atas aset lancar per 31 Desember 2000, 2001 dan 2002 diperoleh informasi bahwa, disatu sisi perkiraan kas, bank dan deposito porsinya terus menurun. Sementara dipihak lain piutang instansi dan piutang perorangan porsinya terus meningkat, sedangkan porsi cadangan piutang cenderung tetap.

c. Persediaan Obat-Obatan

Menurut Soerjandari (1994), berdasarkan penelitian, peningkatan biaya adalah signifikan dengan tidak adanya pengendalian atau kontrol pada persediaan, sehingga mekanisme kontrol yang efektif tidak saja untuk mencapai kedua tujuan tersebut, tetapi juga memecahkan konflik yang terjadi. Salah satu cara yang paling sederhana didalam mengontrol persediaan obat adalah dengan membuat kartu persediaan disetiap pos-pos yang menyimpan persediaan obat, yaitu di Depo Farmasi, Gudang, UGD, Ruangank baik Rawat Jalan mau pun Rawat Inap. Kesiapan SOP dan SDM mutlak diperlukan untuk menjamin tercatatnya setiap mutasi dikartu persediaan dengan benar, akurat, cepat dan *valid*. Jika dana memungkinkan bisa membuat sistem kontrol persediaan disetiap pos persediaan obat yang terkomputerisasi dan terintegrasi sehingga saldo akun persediaan obat bisa diketahui setiap saat.

Untuk obat yang dipakai diruangan, selama ini merupakan data yang dibuat oleh perawat ruangan, tanpa ada paraf pada kartu persediaan, yang sebenarnya dari sisi keuangan diperlukan untuk masalah validitas pemakaian obat itu sendiri, sedangkan dari sisi medis akan melindungi RS dan dokter jika dikemudian hari ada masalah hukum dengan pasien.

Perencanaan persediaan obat haruslah menjamin bahwa persediaan obat yang ada di rumah sakit berada pada level yang minimal, karena adanya biaya penyimpanan persediaan obat yang sangat tinggi belum lagi kalau *slow moving*, dikhawatirkan obat belum dipakai tetapi sudah kadaluarsa, jika ini terjadi merupakan tindakan yang sangat merugikan rumah sakit dari segi arus kas.

Menurut Yenis (1998), didalam pemesanan obat haruslah dicek lagi apakah obat yang diterima sudah sesuai dengan item dan jumlah obat yang diminta oleh unit-unit yang terkait baik dari ruangan (rawat inap), apotik mau pun UGD. Selama ini pengecekan obat yang diterima hanyalah ke surat pesanan yang ditujukan kepada distributor, bukan dicocokkan dengan surat permintaan dari unit-unit. Padahal dasar pemesanan adalah surat permintaan unit ini, karena merekalah pihak yang berkepentingan.

Begitu juga didalam pemilihan rekanan/distributor/Pedagang Besar farmasi

(PBF) untuk mendapatkan harga yang bersaing sebaiknya melalui mekanisme tender dan bukan penunjukan langsung. Minimal RS X mempunyai prosedur pemilihan PBF yang menguntungkan baik dari segi kualitas dan kuantitas barang, juga yang memberikan fasilitas dispensasi waktu bayar yang cukup panjang untuk menghindari RS terkena sanksi pinalti atas keterlambatan bayar dan tentu saja dengan harga yang bersaing.

Ada beberapa kondisi yang penting didalam pengelolaan persediaan (Heckert, 1990)

1. Definisi yang jelas atas tanggung jawab dan wewenang yang menyangkut persediaan, untuk obat apakah obat itu bisa diapakai oleh karyawan? Obat jenis apa saja? Lalu apakah ada obat yang disimpan dalam kondisi terkunci dan wewenang siapa kunci itu dan sebagainya
2. Definisikan dengan baik tujuan dan kebijakan yang diambil, jika terjadi resep diluar formularium langkah apa saja yang akan diambil, begitu juga dengan adanya obat yang kadaluarsa langkah apa yang akan diambil?
3. Penyimpanan yang memadai dan fasilitas penyimpanan
4. Klasifikasi persediaan yang tepat dan identifikasi yang jelas
5. Standarisasi dan penyederhanaan dari persediaan
6. Pencatatan dan laporan yang memadai, sediakan kartu persediaan disetiap penyimpanan obat, setiap mutasi dilakukan pencatatan yang jelas baik itu untuk jenis item obat dan jumlahnya serta paraf yang mengambil obat dan juga paraf dokter yang menuliskan resepnya. Jika sudah komputerisasi yang terintegrasi lebih baik lagi akuntabilitas dari persediaan obat
7. Pegawai/SDM yang bertanggungjaab dan memuaskan, dimana prosedur yang ada akan diikuti dengan penuh tanggungjawab dan bisa mengatasi setiap masalah yang dihadapi dilapangan.

Pada RS X, selama ini jika memiliki dana yang terbatas yang dibandingkan dengan kebutuhan obat yang diminta, dipakai pertimbangan skala prioritas membeli obat yang *fast moving*. Menurut yenis (1998), jika rumah sakit pada posisi keterbatasan dana untuk membeli obat, maka masyarakat memakai VEN. Berarti masyarakat melihat apakah obat itu penting sekali tidak didalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai visi misi RS X.

Selama ini RS X mencatat persediaan berdasarkan harga pembelian dari pemasok dan tidak terdapat persediaan yang usang atau kadaluarsa. Akun Persediaan dihitung berdasarkan *stock opname* yang dilakukan setiap akhir bulan.

Jika dilihat dari kinerja likuiditas, likuiditas RS X selama ini hanya dipergunakan untuk membiayai keperluan operasional seperti jasa medis, membeli obat-obatan dan pengeluaran rutin lainnya. RS X belum berani melakukan pengembangan, padahal alokasi penerimaan kas sebaiknya digunakan secara seimbang antara pengeluaran operasional, investasi dan pembiayaan, baik yang bersifat lancar dan tidak lancar.

Pada saat berdiri, sekitar tahun 1980-an RS X merupakan *market leader* didaerahnya, tetapi karena kurang berani melakukan pengembangan, saat ini sudah terlindas oleh beberapa rumah sakit baru yang merupakan rumah sakit yang dikelola lebih berani melakukan pengembangan diberbagai, baik dari sisi alat-alat kesehatan, bangunan rumah sakit yang representatif, dan jenis layanan yang inovatif, yang berdampak posisi RS X saat ini hanyalah *follower*. Namun RS X saat secara pelan-pelan sudah mulai berbenah diri, berani melakukan pengembangan walau pun terbatas karena memang budaya pemilik RS X yang terlalu sangat hati-hati, yang sudah terlihat dampak pada likuiditas RS X yang agak bermasalah sedikit, ditandai dengan angka rasio lancar yang turun pada tahun 2001.

Penurunan Rasio lancar pada tahun 2001 terpuruk menjadi 1.42 yang artinya aset lancar yang dimiliki untuk membayar kewajiban lancar

hanya berlebih 42%. Walau pun *volume* produksi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi ternyata kewajiban kepada vendor sangat besar juga, hal ini karena memang belum jatuh tempo.

Sedangkan pada tahun 2002, walau pun rasio lancar sekitar 2, yang artinya ada kelebihan 100% dari aset lancar yang digunakan untuk membiayai kewajiban lancar, tetapi kondisi aktivitas pelayanan menurun, BOR menurun, begitu juga dengan utilisasi kapasitas pelayanan kesehatan RS X. Setelah ditelaah lebih lanjut, Rasio lancar yang meningkat semata-mata karena aktivitas pembelian obat yang menurun, sehingga berdampak rasio lancar meningkat. Ditambah piutang perorangan yang berkurang karena bergesernya pasien bayar sendiri yang tidak mampu menjadi pasien yang dibiayai oleh Pemerintah/Gakin.

Secara keseluruhan angka rasio likuiditas RS X selama 10 tahun terakhir adalah menurun, walau pun terjadi sedikit kenaikan untuk rasio likuiditas tahun 2002, juga rasio lancarnya, tapi kenaikan ini adalah semu. Hal ini terjadi karena sejak tanggal 17 Oktober 2001, berdasarkan surat no. KS.00.1156 yang diterbitkan oleh Departemen kesehatan, menunjuk RS X sebagai salah satu rumah sakit di Kota X untuk melaksanakan Program PD PSE BK KS yang selanjutnya berubah menjadi PKPS-BBM BIDKES (Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar

Minyak yang Bidang Kesehatan) dalam upaya membantu keluarga miskin untuk memperoleh hak atas akses kesehatan dan kesejahteraan.

Melalui Program PKPS BBM BIDKES RS X mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 399.950.000,- untuk tahap I pada bulan November 2001 dan tahap II Rp 399.950.000,- diterima RS X pada bulan Agustus 2002. Dana ini semua digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan GAKIN I wilayah Kota X yang dirujuk melalui Puskesmas setempat dan diketahui oleh RT/RW dimana pasien berdomisili.

Walau pun keuangan Gakin dikelola terpisah dari pengelolaan keuangan RS X, tetapi dampak dari adanya dana ini jelas ada untuk arus kas masuk RS X. Segmen pasar RS X adalah masyarakat menengah kebawah (Suwardjoko, 1999), dimana sebelum adanya dana Gakin ini, pasien tidak mampu yang tidak membayar tagihan RS X akan ditanggung oleh keuangan RS X karena memang RS X secara rutin mendapat donasi dari Pemerintahan Kota (Pemkot) X yang sistemnya tetap, bukan berdasarkan jumlah pasien tidak mampu membayar datang ke RS X. Sehingga pada kenyataannya donasi Pemkot X tidak menutupi tagihan pasien tidak mampu tsb. Sehingga sebagian besar biaya pasien tidak mampu itu ditanggung oleh RS X. Maka sejak adanya dana Gakin, pasien tidak mampu membayar akan dialihkan oleh pihak rumah sakit, dalam hal ini

front office/admission/resepsionis ke pasien Keluarga Miskin (Gakin). Ini sangat membantu keuangan RS X dalam jangka pendek, tetapi tidak untuk jangka panjang karena akan didirikannya RSUD Kota X.

Kepala bagian Keuangan berdasarkan wawancara mendalam mengatakan bahwa, apakah dengan terpilihnya R X sebagai RS penerima dana Gakin akan berdampak positif bagi RS X atau tidak. Karena dikawatirkan *image/citra* RS X akan menjadi kurang bagus didalam menangkan pasien di segmen menengah. Dan untuk jangka panjang ditakutkan dana Gakin tidak diperoleh lagi karena akan berdiri RSUD, tetapi pasien miskin sudah terlanjur menuju RS X. Jika kita melihat angka rasio lancar tahun 2002 menjadi *overstated* karena adanya pemasukan kas RS X yang merupakan sisi sumbangan/donasi dan bukan dari pendapatan pelayanan RS X. Perlu disini dilakukan penelitian lebih lanjut berapa sebenarnya angka rasio lancar RS X jika tidak memperoleh sumbangan/dana Gakin. Apakah masih bisa bertahan RS X jika RSUD kelak benar-benar berdiri di Kota X?

Rasio lancar angkanya diperoleh melalui perbandingan antara aset lancar dan kewajiban lancar (Neumannm 1995), untuk RS X secara nominal memang masih dibawah batas aman untuk tahun 2002 yaitu 1.5 – 2.00 (Sjaaf, 2000),

tetapi nilai riil dari rasio tersebut sebenarnya jauh dibawah itu, hal ini karena:

a. Piutang jaminan *overstated*

Yang dinilai terlalu tinggi, dan ada yang berumur diatas 3 tahun masih tercantum di Neraca sebagai aset lancar padahal menurut PSAK (2002). Aset lancar merupakan aset yang bisa dikonversikan menjadi tunai atau ekuivalennya dalam jangka waktu kurang dari satu tahun buku, yang artinya aset lancar RS X *over stated*

b. Piutang Perorangan yang *overstated*

Untuk piutang perorangan ini ternyata sebesar 85% dari total saldo berumur diatas 3 bulan, yang artinya tingkat ketertagihannya adalah sangat kecil, apalagi piutang perorangan ini tidak dijamin dengan barang yang senilai dengan nilai dari piutang itu sendiri, sehingga sangat sukar untuk dikonversikan sebagai kas. Artinya angka rasio lancar adalah *overstated*.

Hal ini memberikan implikasi bahwa RS X harus lebih berhati-hati didalam mengelola keuangannya supaya terus bisa eksis sebagai rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan baik preventif, kuratif, promotif, mau pun rehabilitatif kepada masyarakat kota X.

Manajemen keuangan menurut Setiawan (1996) mencakup aspek

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, yang berarti disamping perlu dilakukan evaluasi perencanaan dan realisasi, dan kontrol/pengawasan atas setiap perkiraan yang tercantum pada laporan keuangan RS X.

Perlunya penerapan pengendalian manajemen, dimana menurut Bedford (1989). Sistem Pengendalian manajemen memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pemilihan program-program yaitu proses memilih program spesifik untuk kegiatan-kegiatan organisasi
- b. Penganggaran, merupakan rencana tindakannya, biasanya dinyatakan dalam satuan uang untuk periode, biasanya satu tahun
- c. Operasi dan pengukuran, dilakukan dengan pencatatan tentang sumber daya yang secara aktual digunakan, dinyatakan dalam bentuk biaya, serta mengenai pendapatan yang secara aktual diperoleh
- d. Pelaporan dan analisis, dimana sistem pengendalian manajemen berfungsi sebagai alat komunikasi, informasi yang dikomunikasikan terdiri atas data akuntansi dan non akuntansi, dihasilkan baik dari dalam mau pun dari luar organisasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

I. Kesimpulan

1. Adanya fluktuasi saldo kas dan setara kas disebabkan oleh fluktuasi pendapatan bersih, peningkatan saldo piutang, anggaran penerimaan dan pengeluaran yang mengahndalkan data historis, belum adanya evaluasi atas selisih dari anggaran dengan realisasi, tidak adanya kontrol yang memadai
2. Adanya fluktuasi saldo piutang disebabkan karena, fluktuasi pendapatan bersih, perubahan cara bayar dari bayar sendiri menjadi pasien jaminan/asuransi, belum adanya mekanisme penyaringan pasien jaminan/asuransi dan perorangan, lamanya proses penagihan piutang pasien jaminan/asuransi, sistem keuangan yang belum terintegrasi.
3. Adanya fluktuasi persediaan obat karena, mutasi obat untuk pasien di ruangan-ruangan belum tercatat dengan baik, surat pesanan dari farmasi belum

direkonsiliasi dengan surat permintaan dari ruangan atau depo, dan tidak memakai mekanisme tender untuk pemilihan distributor.

II. Saran

1. Solusi pengelolaan Kas, Deposito dan Bank adalah perlunya dibuat anggaran kas melalui partisipasi aktif dari unit-unit produksi dan bukan tanggungjawab bagian keuangan semata, evaluasi selisih anggaran-realisasi, perlu dibuat prosedur permintaan kas, kontrol integrasi dari semua kasir
2. Solusi pengelolaan Piutang melalui pembenahan piutang dimulai dari titik awal dari penerimaan pasien, tersedianya informasi teknologi terkini status pasien-piutangnya
3. Solusi pengelolaan persediaan obat adalah, validitas pemakaian obat ruangan, dibuatnya peraturan yang jelas pada unit produksi untuk traksaksi yang terkait uang, pencatatan mengacu pada PSA.

DAFTAR PUSTAKA

Alkatiri, Ali dkk, 2001, *Reformasi Perumah Sakitan*, Grasindo

Amir Widjaja/Wibowo Sudirman, 1990, *Apakah Strategix Planning diperlukan? Majalah Akuntansi*, No. 9 TH IX September

- Azwar, Azrul, 1996, *Analisa Laporan Keuangan*, Lembaga Pendidikan dan Pengembangan, PERSI, Jakarta
- Benjamin, P. Wahjudi, 1989, *Akuntansi Dasarwarsa 1990-an*, Makalah Pada Program MM PPs FEUI
- Bodnar, H. George, Hopwood, *Accounting Information System*, Edisi 5, Prentice-Hall International
- Bedford, Dearden Anthony, 1989, *Management Control System. 6th edition*, Richard D, Irwin
- Caplan, H Edwin, 1968, *Behavioral Assumptions of Management Accounting*, the Accounting Review, July, h 342-362
- Kresno, S, 1999, *Aplikasi Penelitian Kualitatif dalam Pemantauan dan Evaluasi Program kesehatan*, FKMUI Bekerjasama dengan Pusat Data kesehatan, Depkes dan Kesos RI, 1999
- Morse, J.M & Field, P, A, 1995, *Qualitative Research Method for Health Professionals 2nd Ed*, Sage Publication International Educational & Professional Publisher, Thousand Oaks, London
- Notoadmodjo, Soekidjo, 1996, *Metodologi kesehatan, Edisi 1*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Phelps, E. Charles, 1996, *Health Economics*, Harper Collins Publisher
- Wibowo, Herman, 1999, *Manajemen Kas: Pendekatan Efektif-Biaya*, Majalah Akuntansi, No.3 Thn VIII, Ikatan Akuntan Indonesia, Maret

PENINGKATAN KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN BIostatistik DENGAN METODE KOOPERATIF MELALUI MEDIA LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM) DI PROGRAM STUDI PERUMAHSAKITAN

Nia Murniati^{1*}, Supriadi^{1*}, Tri Gunadi^{2*}

¹*Program Studi Perumahsakitan Program Vokasi Universitas Indonesia*

²*Program Stud Okupasi Terapi Program Vokas Universtas Indonesia*

ABSTRAK - Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang bergairahnya mahasiswa Program Studi Perumahsakitan dalam mengikuti Mata Kuliah Biostatistik, karena metode pembelajarannya tidak membuat mahasiswa menjadi aktif dan partisipatif. Akibatnya Mata Kuliah Biostatistik seringkali meninggalkan beberapa mahasiswa yang terpaksa mengulang kredit karena batas nilai akhirnya tidak mencapai ambang lulus (C). Hal ini tentu saja sangat merugikan mahasiswa yang bersangkutan karena harus mengulang kredit pada tahun berikutnya, mengingat mata kuliah ini tidak ditawarkan setiap semester. Bahkan ada mahasiswa yang harus mengulang hingga saat magang (semester akhir). Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan subyek seluruh mahasiswa RS1 Tahun Akademik 2012/2013 sebanyak 50 orang dengan batasan materi biostatistik ditekankan pada materi probabilitas. Tempat penelitian di Program Vokasi Universitas Indonesia. Hasil penelitian diperoleh pada siklus 1 rata-rata skor tercapai $3770/5000 = 75,4$, siklus 2 rata-rata skor tercapai $4105/5000 = 82,1$ dan siklus 3 rata-rata skor tercapai $4585/5000 = 91,7$. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan metode kooperatif melalui media LKM memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar mahasiswa yang ditandai dengan peningkatan rata-rata skor tercapai dalam setiap siklus, serta dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar mahasiswa yang ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas diskusi di dalam kelas. Peneliti menyarankan dalam melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan metode kooperatif melalui media LKM memerlukan persiapan yang cukup matang, sehingga dosen harus mampu menentukan skenario pembelajaran yang benar-benar bisa diterapkan untuk memperoleh hasil yang optimal.

Kata kunci: Penelitian Tindakan Kelas, Metode Koopertif, Lembar Kerja Mahasiswa.

ABSTRACT -This research is motivated by the lack of passionate students of the Program Studi Perumahsakitan Vokasi in the following study courses Biostatistics, because the teaching method does not make the students become active and participate. Consequently Biostatistics courses often leave some students are forced to repeat the due credit limit does not reach the threshold value eventually pass (C) and of course is very detrimental to the student having to repeat the course credit until they intern (last semester). This study is a class act with the entire student subjects RS1 50 people Academic Year 2012/2013 in the University of Indonesia with the material limits of Biostatistics emphasis on material probability. Results were obtained in cycle 1 achieved an average score of $3770/5000 = 75.4$, cycle 2 average scores achieved $4105/5000 = 82.1$ and cycle 3 achieved an average score of $4585/5000 = 91.7$. Conclusion The method of cooperative learning approach through the media LKM have a positive impact in improving student achievement is marked by an increase in the average scores achieved in each cycle, and through the media worksheet can increase student interest and motivation shown by increased activity in the classroom discussion. Advice is to carry out a cooperative approach through the media LKM method requires the preparation of a fairly mature, so the lecturer must be able to determine the learning scenario can actually be applied in order to obtain optimal results.

Keywords: class action research, cooperative learning, worksheet students.

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Mata kuliah Biostatistik merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa Program Vokasi Program Studi Perumhaskitan. Sebagai mata kuliah yang berkaitan dengan data, seringkali mahasiswa kurang bergairah dalam mempelajarinya karena dianggap sulit dan membosankan. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan mahasiswa dalam memperoleh nilai akhir mata kuliah ini, diantaranya adalah metode pengajaran yang digunakan dosen.

Dalam kegiatan pembelajaran, peristiwa yang sering terjadi adalah mahasiswa kurang aktif, kurang berpartisipasi, kurang terlibat dan tidak punya inisiatif. Pertanyaan, gagasan maupun pendapat sering tidak muncul. Dosen bersifat otoriter, penyampaian materi searah, menganggap mahasiswa sebagai penerima, pencatat dan mesin perekam. Hal-hal negatif seperti itu seringkali berkontribusi besar terhadap ketidaklulusan mahasiswa terhadap mata kuliah biostatistik sehingga mereka terpaksa mengulang kredit yang sama pada semester berikutnya.

Salah satu upaya meningkatkan peran aktif mahasiswa dalam pembelajaran, perlu dikembangkan metode dan media yang dapat mengoptimalkan kemampuannya. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk bertukar pendapat, menanggapi

pemikiran yang berbeda, menggunakan media, akan dapat mengingat lebih lama mengenai suatu fakta, prosedur, definisi dan teori sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang tidak semata-mata hanya pengalaman belajar biostatistik. Untuk itu peneliti akan mencoba pendekatan metode kooperatif melalui media Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) dengan harapan mahasiswa lebih aktif dan mempunyai semangat belajar yang tinggi.

Sebagai mata kuliah wajib yang harus diambil di Program Vokasi Program Studi Perumhaskitan, Biostatistik seringkali meninggalkan beberapa mahasiswa yang terpaksa mengulang kredit karena batas nilai akhirnya tidak mencapai ambang lulus (C). Hal ini tentu saja sangat merugikan mahasiswa yang bersangkutan karena tidak pada setiap semester mata kuliah ini ditawarkan. Beberapa mahasiswa malah harus mengulang kredit mata kuliah ini hingga saat mereka magang (semester akhir). Berdasarkan permasalahan yang dihadapi ini, peneliti mencoba melihat apakah ada kenaikan nilai mahasiswa setelah menggunakan media LKM dengan metode kooperatif dalam proses pembelajaran?

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian tindakan kelas dengan subyek seluruh mahasiswa RS1 sebanyak 50 orang. Batasan materi biostatistik ditekankan pada materi probabilitas.

II. Studi Literatur

a. Pengertian Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

PTK adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan itu, serta memperbaiki kondisi dimana praktek pembelajaran tersebut dilakukan. Tujuan utama dari PTK adalah untuk memperbaiki/meningkatkan praktik pembelajaran secara berkesinambungan, sedangkan tujuan penyertaannya adalah menumbuhkan budaya meneliti di kalangan dosen (Mukhlis, 2000).

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart, yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu ke siklus yang berikutnya. Setiap siklus meliputi *planning* (rencana), *action* (tindakan), *observation* (pengamatan), dan *reflection* (refleksi). Langkah pada siklus berikutnya adalah perencanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Sebelum masuk pada siklus 1 dilakukan tindakan pendahuluan berupa identifikasi masalah. Observasi dibagi dalam tiga putaran, yaitu putaran 1, 2 dan 3, dimana masing-masing putaran dikenai perlakuan yang sama (alur kegiatan yang sama) dan membahas satu sub pokok bahasan yang diakhiri dengan tes formatif di akhir masing-masing putaran.

Dibuat dalam tiga putaran dimaksudkan untuk memperbaiki sistem pengajaran yang telah dilaksanakan.

b. *Cooperative Learning* (CL)

CL adalah metode belajar berkelompok yang dirancang oleh dosen untuk memecahkan suatu masalah/kasus atau mengerjakan suatu tugas. Kelompok ini terdiri atas beberapa orang mahasiswa, yang memiliki kemampuan akademik yang beragam. Metode ini sangat terstruktur, karena pembentukan kelompok, materi yang dibahas, langkah-langkah diskusi serta produk akhir yang harus dihasilkan, semuanya ditentukan dan dikontrol oleh dosen. Mahasiswa dalam hal ini hanya mengikuti prosedur diskusi yang dirancang oleh dosen. Pada dasarnya CL seperti ini merupakan perpaduan antara *teacher-centered* dan *student-centered learning*. CL bermanfaat untuk membantu menumbuhkan dan mengasah: (a) kebiasaan belajar aktif pada diri mahasiswa; (b) rasa tanggungjawab individu dan kelompok mahasiswa; (c) kemampuan dan keterampilan bekerjasama antar mahasiswa; dan (d) keterampilan sosial mahasiswa.

c. Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses, cara menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Sedangkan belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berusaha tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman (KBBI, 1996).

Selaras dengan pernyataan diatas, Soetomo mengemukakan bahwa pembelajaran

adalah proses pengelolaan lingkungan seseorang yang dengan sengaja dilakukan sehingga memungkinkan dia belajar untuk melakukan atau mempertunjukkan tingkah laku tertentu pula. Sedangkan belajar adalah suatu proses yang menyebabkan tingkah laku yang bukan disebabkan oleh proses pertumbuhan yang bersifat fisik, tetapi perubahan dalam kebiasaan, kecakapan, bertambah, berkembang daya pikir, sikap dan lain-lain (Soetomo, 1993).

Pasal 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi pembelajaran adalah proses yang disengaja yang menyebabkan mahasiswa belajar pada suatu lingkungan belajar untuk melakukan kegiatan pada situasi tertentu.

d. Hasil Belajar

Hasil belajar mahasiswa adalah nilai yang diperoleh mahasiswa selama kegiatan belajar mengajar. Belajar diartikan sebagai gejala perubahan tingkah laku yang relatif permanen dari seseorang dalam mencapai tujuan tertentu De Cecco (dalam Witjaksono, 1985). Menurut Gagne (dalam Witjaksono, 1985) belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam disposisi atau kapabilitas seseorang, dalam kurun waktu tertentu, dan bukan semata-mata sebagai proses pertumbuhan. Belajar merupakan proses dimana otak atau pikiran mengadakan reaksi terhadap kondisi-kondisi luar dan reaksi itu dapat dimodifikasi dengan pengalaman-pengalaman yang dialami

sebelumnya. Melalui proses belajar anak dapat mengadaptasikan dirinya pada lingkungan hidupnya. Adaptasi itu dapat berupa perubahan pikiran, sikap, dan keterampilan. Selaras dengan pernyataan di atas Bloom menekankan perhatiannya pada apa yang mesti dikuasai oleh individu. Tujuan belajar yang dikemukakannya dirangkum kedalam tiga kawasan yang terkenal dengan taksonomi Bloom adalah sebagai berikut:

- a. Domain kognitif, terdiri atas 6 tingkatan yaitu:
 - a. Pengetahuan (mengingat, menghafal)
 - b. Pemahaman (mengintepretasikan)
 - c. Aplikasi (menggunakan konsep untuk memecahkan masalah)
 - d. Analisis (menjabarkan suatu konsep)
 - e. Sintesis (menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep utuh)
 - f. Evaluasi (membandingkan nilai-nilai, ide, metode, dsb)
- b. Domain psikomotor, terdiri atas 5 tingkatan yaitu:
 - a. Peniruan (menirukan gerak)
 - b. Penggunaan (menggunakan konsep untuk melakukan gerak)
 - c. Ketepatan (melakukan gerak dengan benar)
 - d. Naturalisasi (melakukan gerak secara wajar)
- c. Domain afektif, terdiri atas 5 tingkatan yaitu:
 - a. Pengenalan (ingin menerima, sadar akan adanya sesuatu)
 - b. Merespon (aktif berpartisipasi)

- c. Penghargaan (menerima nilai-nilai, setia kepada nilai-nilai tertentu)
- d. Pengorganisasian (menghubungkan nilai-nilai yang dipercayainya)
- e. Pengalaman (menjadikan nilai-nilai sebagian bagian dari pola hidupnya)

Hasil belajar yang diukur pada pembelajaran yang berlandaskan kurikulum 2004 meliputi kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Maka dosen tidak hanya menilai mahasiswa dari aspek intelektual tetapi kemampuan sosial, sikap mahasiswa selama proses belajar mengajar serta keaktifan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran juga dinilai oleh dosen. Mahasiswa yang telah mengalami pembelajaran diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan baru serta perbaikan sikap sebagai hasil dari pembelajaran yang telah dialami mahasiswa tersebut. Pengukuran hasil belajar bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dalam menyerap materi. Sebaiknya hasil belajar yang telah dinilai oleh dosen diberitahukan kepada mahasiswa agar mahasiswa mengetahui kemajuan belajar yang telah dilakukannya serta kekurangan yang masih perlu diperbaiki.

Penilaian hasil belajar pada akhirnya sebagai bahan refleksi mahasiswa mengenai kegiatan belajarnya dan refleksi dosen terhadap kemampuan mengajarnya serta mengevaluasi pencapaian target kurikulum. Benjamin S. Bloom dalam *Taxonomy of*

Education Objectives membagi hasil belajar kedalam tiga ranah:

1. Ranah Kognitif

Ranah kognitif (berkaitan dengan daya piker, pengetahuan, dan penalaran) berorientasi pada kemampuan mahasiswa dalam berfikir dan bernalar yang mencakup kemampuan mahasiswa dalam mengingat sampai memecahkan masalah, yang menuntut mahasiswa untuk menggabungkan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Ranah kognitif ini berkenaan dengan prestasi belajar dan dibedakan dalam enam tahapan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pada mahasiswa SMP diutamakan pada ranah pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Pengetahuan mencakup kemampuan mengingat tentang hal yang telah dipelajari, dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu berkenaan dengan fakta, peristiwa, kaidah, prinsip, teori, dan rumus. Pengetahuan yang telah tersimpan dalam ingatan, digali pada saat dibutuhkan dalam bentuk mengingat (*recall*) atau mengenal kembali (*recognition*).

Pemahaman mencakup kemampuan untuk menyerap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu dapat dilihat dari kemampuannya menyerap suatu materi, kemudian mengkomunikasikannya dalam bentuk lainnya dengan kata-kata sendiri.

Penerapan mencakup kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam kegiatan pembelajaran untuk menghadapi situasi baru dalam kehidupan

sehari-hari. Tingkat penerapan ini dapat diukur dari kemampuan menggunakan konsep, prinsip, teori, dan metode untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari.

2. Ranah Psikomotor

Ranah psikomotor berorientasi kepada ketrampilan fisik, keterampilan motorik, atau keterampilan tangan yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan yang memerlukan koordinasi antara syaraf dan otot. Simpson (dalam Winkel, 1996) menyatakan bahwa ranah psikomotor terdiri dari tujuh jenis perilaku yaitu: persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas. Sedangkan menurut Kibler, Barker, dan Miles (dalam Dimiyati dan Mudjiono, 1994) ranah psikomotor mempunyai taksonomi sebagai berikut:

- a. Gerakan tubuh yang mencolok, merupakan kemampuan gerakan tubuh yang menekankan kepada kekuatan, kecepatan, dan ketepatan tubuh yang mencolok.
- b. Ketepatan gerakan dikordinasikan, merupakan ketrampilan yang berhubungan dengan gerakan mata, telinga, dan badan.
- c. Perangkat komunikasi non verbal, merupakan kemampuan mengadakan komunikasi tanpa kata
- d. Kemampuan berbicara, merupakan kemampuan yang berhubungan dengan komunikasi secara lisan. Untuk kemampuan berbicara, mahasiswa harus

mampu menunjukkan kemahirannya memilih dan menggunakan kata atau kalimat sehingga informasi, ide, atau yang dikomunikasikannya dapat diterima secara mudah oleh pendengarnya.

3. Ranah Afektif

Ranah afektif (berkaitan dengan perasaan/kesadaran, seperti perasaan senang atau tidak senang yang memotivasi seseorang untuk memilih apa yang disenangi) berorientasi pada kemampuan mahasiswa dalam belajar menghayati nilai objek-objek yang dihadapi melalui perasaan, baik objek itu berupa orang, benda maupun peristiwa. Ciri lain terletak dalam belajar mengungkapkan perasaan dalam bentuk ekspresi yang wajar. Menurut Krochwall Bloom (dalam Winkel 1996) ranah afektif terdiri dari penerimaan, partisipasi, penilaian, dan penentuan sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup. Untuk ranah kognitif, dosen menilai kemampuan kognitif mahasiswa berdasarkan hasil tes yang diberikan kepada mahasiswa pada akhir pelaksanaan siklus 1 dan 2.

III. Metode Penelitian

a. Subjek Penelitian

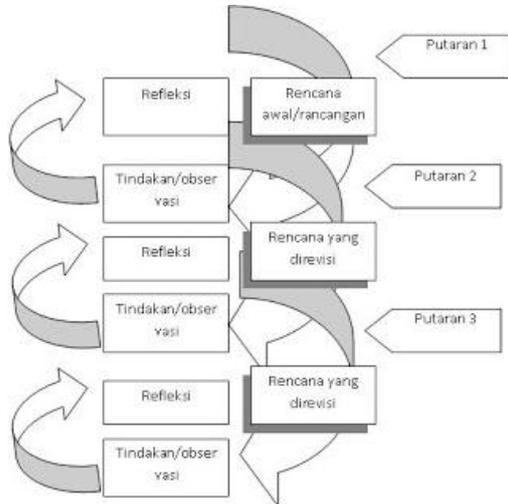
Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah seluruh mahasiswa (50 orang) kelas RS1 Program Vokasi Program Studi Perumahsakitan Tahun Akademik 2012/2013.

b. Tempat Penelitian

Tempat penelitian di Program Vokasi Universitas Indonesia.

c. Prosedur Penelitian

Langkah-langkah penelitian tindakan kelas dapat dilihat pada bagan alir berikut ini:



d. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Silabus
 Yaitu seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran pengelolaan kelas, serta penilaian hasil belajar.
- b. Satuan Acara Perkuliahan (SAP)
 Yaitu merupakan perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dosen dalam mengajar dan disusun untuk tiap putaran. Masing-masing SAP berisi kompetensi dasar, indicator pencapaian hasil belajar, tujuan pembelajaran khusus, dan kegiatan belajar mengajar.
- c. Lembar Kerja Mahasiswa (LKM)
 Lembar kerja ini yang dipergunakan mahasiswa untuk membantu proses pengumpulan data hasil eksperimen.
- d. Lembar Observasi Kegiatan Belajar Mengajar

a. Lembar observasi pengolahan metode pembelajaran demonstrasi, untuk mengamati kemampuan dosen dalam mengelola pembelajaran.

b. Lembar observasi aktivitas mahasiswa dan dosen, untuk mengamati aktivitas mahasiswa dan dosen selama proses pembelajaran.

e. Tes formatif

Tes ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tes formatif ini diberikan setiap akhir putaran. Bentuk soal yang diberikan adalah essay terbatas.

e. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi aktivitas mahasiswa dan dosen, serta tes formatif.

f. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui keefektivan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran perlu diadakan analisis data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai mahasiswa juga untuk memperoleh respon mahasiswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas mahasiswa selama proses pembelajaran. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan mahasiswa setelah proses belajar mengajar setiap putarannya

dilakukan dengan cara memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap akhir putaran.

Analisis ini dihitung dengan menggunakan statistik sederhana yaitu:

1. Untuk menilai tes formatif

Peneliti melakukan penjumlahan nilai yang diperoleh mahasiswa, yang selanjutnya dibagi dengan jumlah mahasiswa yang ada di kelas tersebut sehingga diperoleh rata-rata tes formatif.

$$R = \frac{\sum x}{N}$$

Dimana:

R = Nilai rata-rata mahasiswa

$\sum x$ = Jumlah semua nilai mahasiswa

N = Jumlah mahasiswa

HASIL PENELITIAN

IV. Analisis Data Penelitian Persiklus

a. Siklus I

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelajaran 1, LKM 1, soal tes formatif 1, dan alat-alat pengajaran yang mendukung.

2. Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2013 di kelas RS1 dengan jumlah mahasiswa 50 orang. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai dosen. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada rencana pembelajaran yang telah disiapkan. Pengamatan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. Pada akhir proses pembelajaran mahasiswa diberi tes formatif I dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan mahasiswa dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Adapun data hasil penelitian pada siklus I adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Hasil Tes Formatif Mahasiswa Pada Siklus I

No	Nilai	No	Nilai
1	70	26	60
2	60	27	50
3	70	28	55
4	80	29	60
5	90	30	60
6	60	31	50
7	60	32	60
8	70	33	80
9	65	34	80
10	70	35	90

No	Nilai
11	60
12	80
13	90
14	80
15	90
16	70
17	75
18	60
19	65
20	90
21	95
22	90
23	80
24	80
25	85

No	Nilai
36	90
37	95
38	80
39	85
40	85
41	90
42	95
43	95
44	90
45	65
46	60
47	90
48	65
49	90
50	65

Jumlah Skor 3770

Jumlah Skor Maksimal 5000

Rata-Rata Skor Tercapai $3770/5000$

$= 75,4$

b. Siklus II

1. Tahap perencanaan

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelajaran 2, LKM 2, soal tes formatif II, dan alat-alat pengajaran yang mendukung.

2. Tahap kegiatan dan pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2013 di kelas RS1 dengan jumlah mahasiswa 50

orang. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai dosen. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada rencana pembelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus I, sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus I tidak terulang lagi. Observasi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. Pada akhir proses pembelajaran mahasiswa diberi tes formatif II dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan mahasiswa. Instrument yang digunakan adalah tes formatif II. Adapun data hasil penelitian pada siklus II adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
 Hasil Tes Formatif Mahasiswa Pada Siklus II

No	Nilai	No	Nilai
1	75	26	80
2	65	27	70
3	75	28	65
4	95	29	65
5	90	30	75
6	65	31	70
7	75	32	70
8	75	33	80
9	80	34	90
10	70	35	90
11	70	36	90
12	85	37	95
13	90	38	85
14	85	39	90
15	95	40	90
16	75	41	90
17	80	42	95
18	65	43	100
19	70	44	100
20	90	45	75
21	95	46	75
22	90	47	90
23	90	48	85
24	90	49	95
25	90	50	70

Jumlah Skor 4105

Jumlah Skor Maksimal 5000

Rata-Rata Skor Tercapai $4105/5000 = 82,1$

c. Siklus III

1. Tahap perencanaan

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelajaran 3, LKM 3, soal tes

formatif III, dan alat-alat pengajaran yang mendukung.

2. Tahap kegiatan dan pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus III dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2013 di kelas RS1 dengan jumlah mahasiswa 50 orang. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai dosen. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada rencana pembelajaran

dengan memperhatikan revisi pada siklus II, sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus II tidak terulang lagi. Observasi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. Pada akhir proses pembelajaran mahasiswa diberi tes

formatif III dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan mahasiswa. Adapun data hasil penelitian pada siklus III adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
 Hasil Tes Formatif Mahasiswa Pada Siklus III

No	Nilai	No	Nilai
1	85	26	95
2	80	27	85
3	80	28	75
4	100	29	85
5	100	30	90
6	80	31	90
7	85	32	80
8	85	33	90
9	100	34	100
10	80	35	100
11	80	36	100
12	90	37	100
13	100	38	100
14	90	39	100
15	100	40	100
16	85	41	100
17	100	42	100
18	75	43	100
19	75	44	100
20	95	45	85
21	95	46	85
22	100	47	100
23	95	48	95
24	95	49	95
25	95	50	90

Jumlah Skor 4585
 Jumlah Skor Maksimal 5000
 Rata-Rata Skor Tercapai $4585/5000$
 $= 91,7$

Berdasarkan tabel 1, 2, dan 3 dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan rata-rata skor tercapai. Pada tabel 2 diketahui rata-rata skor

tercapai adalah 82,1, skor tersebut meningkat dari rata-rata skor tercapai pada siklus 1 yaitu 75,4. Pada siklus III terjadi peningkatan rata-rata skor hingga 91,7. Adanya peningkatan hasil belajar pada setiap siklus dimungkinkan karena mahasiswa sudah terbiasa dengan metode pembelajaran kooperatif menggunakan LKM sehingga lebih mudah memahami materi yang diberikan.

V. Refleksi

Pada tahap ini dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun yang masih kurang dalam proses pembelajaran dengan metode kooperatif melalui penerapan LKM. Dari data-data yang telah diperoleh dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui bahwa siswa aktif selama proses belajar berlangsung.
2. Setiap siklus mengalami peningkatan skor rata-rata tercapai yang menandakan terjadinya penambahan pemahaman materi yang lebih baik.

VI. Revisi Pelaksanaan

Pada siklus III dosen menerapkan metode kooperatif melalui penerapan LKM dengan baik dilihat dari aktivitas mahasiswa serta hasil evaluasi pembelajarannya. Maka tidak diperlukan revisi terlalu banyak, tetapi yang perlu diperhatikan untuk tindakan selanjutnya adalah memaksimalkan dan mempertahankan apa yang telah ada dengan tujuan agar pada pelaksanaan proses

pembelajaran melalui metode kooperatif dengan penerapan LKM dapat meningkatkan proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

PEMBAHASAN

I. Peningkatan skor rata-rata tercapai

Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan metode kooperatif melalui LKM berdampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari semakin tingginya pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan pada setiap siklus yang ditandai dengan pencapaian skor rata-rata pada masing-masing siklus yaitu 75,4, 82,1, dan 91,7.

II. Aktivitas dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran

Aktivitas dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran biostatistik yang paling dominan adalah bekerja dengan menggunakan alat/media, mendengarkan/ memperhatikan penjelasan dosen, dan diskusi antar mahasiswa/dosen secara aktif. Aktivitas dosen di antaranya membimbing dan mengamati mahasiswa dalam mengerjakan LKM/ menemukan konsep, menjelaskan/melatih menggunakan alat, dan memberi umpan balik/evaluasi/tanya jawab.

KESIMPULAN DAN SARAN

III. Kesimpulan

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga siklus, dan

berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembelajaran dengan pendekatan metode kooperatif melalui media LKM memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar mahasiswa yang ditandai dengan peningkatan rata-rata skor tercapai dalam setiap siklus, yaitu siklus I (75,4), siklus II (82,1), siklus III (91,7).
2. Penerapan pendekatan metode kooperatif melalui media LKM dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar mahasiswa yang ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas diskusi di dalam kelas.

IV. Saran

1. Untuk melaksanakan pendekatan metode kooperatif melalui media LKM memerlukan persiapan yang cukup matang, sehingga dosen harus mampu menentukan skenario pembelajaran yang benar-benar bisa diterapkan sehingga diperoleh hasil yang optimal.
2. Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar, dosen hendaknya lebih sering melatih mahasiswa dengan berbagai metode pembelajaran, walau dalam taraf yang sederhana, dimana mahasiswa nantinya dapat menemukan pengetahuan baru, memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga mahasiswa mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bloom B. S. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain*. New York: David McKay Co Inc.
- Dimiyati & Mudjiono. 2006. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 1996.
- Kemmis, S. dan Mc. Taggart, R. 1988. *The Action Research Planner*. Victoria Dearcin University Press. Dahar, R.W. 1989. *Teori-teori Belajar*. Jakarta: Erlangga.
- Mukhlis, Abdul. (Ed.). 2000. *Penelitian Tindakan Kelas*. Makalah Panitia Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah untuk Guru.
- Pengenalan Sistem Akademik Universitas. 2008. *Panduan Kegiatan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Tahun Akademik 2008/2009*. Depok. UI Press.
- Soetomo. 1993. *Dasar-dasar Interaksi Belajar Mengajar*. Usaha Nasional Surabaya.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
- Witjaksono, Mit. 1985. *Konsep Strategi Pendekatan Pengelolaan Kelas*. P3T IKIP Mal

BERBAGI PENGETAHUAN SEBAGAI ALTERNATIF PENCIPTAAN PENGETAHUAN UNTUK STAF PENGAJAR VOKASI UI

Dyah Safitri^{1*}

¹Program Studi Manajemen Informasi dan Dokumen Program Vokasi Universitas Indonesia

ABSTRAK - Proses berbagi pengetahuan menjadi proses penting bagi sebuah organisasi dalam menciptakan pengetahuan dan inovasi baru. Pengetahuan yang bersifat tacit dan explicit dapat dipindahkan melalui beberapa proses berbagi pengetahuan. Budaya menjadi bagian penting dalam proses tersebut terutama penghargaan terhadap sumber pengetahuan yang bersedia membagi pengetahuannya. Pada organisasi pendidikan seperti Program Vokasi UI yang belum lama berdiri seharusnya pelebagaan penyeleksi pengetahuan seperti knowledge centre akan bermanfaat dalam proses berbagi pengetahuan.

Kata kunci: Pengetahuan, Berbagi Pengetahuan, Pengetahuan Tacit, Pengetahuan Eksplisit, Pemindahan Pengetahuan, Pengelola Pengetahuan, Pusat Pengetahuan.

ABSTRACT -The process of knowledge sharing becomes important processes for an organization in creating new knowledge and innovation. Tacit and explicit knowledge can be moved through several processes to knowledge sharing. Culture an important part of the process, especially an appreciation of the sources of knowledge that is willing to share the knowledge. In educational organizations especially recently established such as Vocational Program UI should institutionalization of knowledge as a knowledge center will be beneficial in the process of knowledge sharing.

Keywords: Knowledge, Knowledge Sharing, Tacit Knowledge, Explicit Knowledge, Knowledge Transfer, Knowledge Manager, Knowledge Center

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Di dalam sebuah organisasi, pengetahuan adalah salah satu aset paling bernilai dan faktor penting dalam kompetisi. Siakas dan Giorgiadou (2008) berpendapat bahwa organisasi menempatkan pengetahuan sebagai faktor penting di dalam pembentukan, penggunaan, dan distribusi informasi untuk memperkuat modal pengetahuan di dalam organisasi tersebut dalam persaingan global. Kemampuan organisasi dalam belajar, beradaptasi, dan berubah menjadi kompetensi

inti untuk tetap bertahan dalam persaingan. Organisasi yang sukses adalah organisasi yang berhasil menciptakan pengetahuan baru, menyebarkannya di dalam organisasi dan mendorong penciptaan produk dan layanan baru.

Tidak banyak organisasi yang mengetahui dan sadar bahwa terdapat potensi pengetahuan tersembunyi di dalam organisasi. Setiarso *et.al* (2008) menyatakan bahwa Delphi Group pada tahun 1997 melakukan riset tentang komposisi pengetahuan yang tersimpan pada 42% di pikiran karyawan, 26% dalam dokumen kertas, 20% dalam

dokumen elektronik, dan 12% dalam *knowledge-base* elektronik. Pengetahuan yang tersimpan di dalam pikiran anggota organisasi adalah *tacit knowledge*. Menurut Filos (2008) *tacit knowledge* bersifat personal, kombinasi antara pengalaman dan intuisi, dan tidak banyak perusahaan dapat meng-*capture* dan mengkomunikasikan pengetahuan tersebut. Komitmen individu di dalam organisasi menjadi faktor penentu tersebarnya *tacit knowledge* di dalam organisasi, sehingga perlu diciptakan kepercayaan dan loyalitas di antara individu dan organisasi. Setiarso *et.al* (2008) menyatakan *tacit knowledge* memang sangat sulit dibagi ke orang lain, dan dokumentasi menjadi faktor penting dalam mengubah *tacit knowledge* menjadi *explicit knowledge*. Tanpa dokumentasi, *tacit knowledge* tidak akan berarti dan menjadi sulit diakses oleh siapapun dan kapanpun di dalam organisasi.

Agar pengetahuan tetap memberi manfaat dalam jangka panjang, sebuah organisasi harus menyadari keberadaan karyawan, pencipta pengetahuan, dan penggunaanya agar berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*) dapat berjalan efektif dan inovasi dapat terus muncul. Menurut Saenz, Aramburu, dan Rivera (2010) penciptaan pengetahuan merupakan proses berkelanjutan dari seorang individu yang memiliki keterbatasan pengetahuan kemudian memperoleh pengetahuan baru. Dengan interaksi dan berbagi pengetahuan antar individu, individu tersebut akan memiliki pandangan dan pengetahuan baru untuk menghadapi masalah yang akan terjadi. Pada

level organisasi –termasuk juga pada organisasi pendidikan– dorongan pada penciptaan pengetahuan dan inovasi pribadi akan membentuk penciptaan pengetahuan dan inovasi baru.

Sebagai salah satu organisasi pendidikan, Program Vokasi Universitas Indonesia merupakan organisasi baru yang dimulai pada 2008. Pengelolaan administrasi program pendidikan vokasi dilakukan secara terpusat di Universitas Indonesia menggantikan program diploma III yang tersebar di berbagai fakultas dan sudah ada sejak tahun 1980-an. Tujuan menyatukan program tersebut adalah efisiensi mengingat banyaknya jalur pendidikan yang ada di UI serta untuk merealisasikan visi UI menjadi universitas riset kelas dunia dalam menghadapi tantangan global. Program vokasi UI merupakan kumpulan dari berbagai disiplin ilmu eksakta, sosial, ekonomi, hingga kesehatan dan kedokteran. Program pendidikan vokasi bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tenaga ahli profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Secara khusus, program diploma diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja tertentu sehingga dapat langsung diserap sebagai tenaga kerja di industri/swasta, lembaga pemerintah atau berwiraswasta secara

mandiri, hal ini karena beban pengajaran pada program pendidikan vokasi telah disusun lebih mengutamakan beban mata kuliah keterampilan (60%) dibandingkan dengan beban mata kuliah teori. Visi Program Vokasi UI adalah menjadi pusat unggulan pendidikan vokasional di ASEAN. Misinya adalah Menyelenggarakan pendidikan vokasional dengan penekanan pada keahlian (*skilled*) dan praktek selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan industri untuk menghasilkan tenaga ahli profesional yang berstandar internasional, mengembangkan bidang-bidang vokasional dalam upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan dan kualitas masyarakat Indonesia, serta mengembangkan kerjasama antar lembaga/instansi di dalam dan luar negeri untuk kepentingan pendidikan, praktek kerja dan adaptasi kurikulum. (Vokasi, 2013)

Sebagai organisasi yang baru dengan membawahi pendidikan dengan lingkup rumpun ilmu yang beragam, berbagi pengetahuan untuk staf pengajar atau dosen di program vokasi UI menjadi sangat penting. Berbagai pengalaman yang diperoleh dari sebuah rumpun ilmu misalnya dapat dibagi ke dalam internal organisasi sehingga dapat dengan mudah diadaptasi oleh rumpun ilmu lainnya. Dengan budaya berbagi pengetahuan, akan lebih cepat dipetakan kekuatan program studi vokasi karena kekurangan pada program studi dapat saling terisi. Di samping itu, perkembangan ilmu dan pengayaan mata kuliah di berbagai rumpun ilmu dapat berkembang dengan lebih baik.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

I. Pengetahuan

Davenport dan Prusak (1998) menyebut pengetahuan sebagai pengalaman, nilai-nilai, konteks dan wawasan yang tercampur sehingga menyediakan sebuah kerangka kerja untuk mengevaluasi dan menghubungkan pengalaman-pengalaman dan informasi baru. Kedua peneliti itu menemukan bahwa di dalam organisasi, pengetahuan kerap menjadi artefak yang melekat seperti dokumen, video, audio atau penyimpanan di dalam rutinitas, proses, praktek, dan norma-norma organisasi. Mereka juga melihat bahwa pengetahuan akan bernilai apabila ada tambahan konteks, budaya, pengalaman, dan interpretasi dari orang lain. Nonaka (1994) melihat pengetahuan dalam arti yang lebih spesifik. Pengguna pengetahuan harus mengerti dan melihat pengalaman dengan konteks yang ada, kondisi dan pengaruh yang melingkupi, sehingga pengetahuan dihasilkan dan berarti untuk mereka.

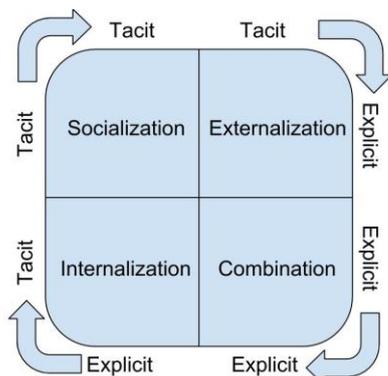
Nonaka dan Takeuchi (1995) menggambarkan dua tipe pengetahuan yaitu pengetahuan tacit (*tacitknowledge*) dan pengetahuan eksplisit (*explicit knowledge*).

- *Tacit knowledge* adalah pemahaman yang ada di dalam pikiran pemilik pengetahuan dan tidak secara langsung dapat dimunculkan dalam bentuk data atau representasi pengetahuan sehingga kerap disebut pengetahuan yang tidak terstruktur.

- *Explicit knowledge* yaitu pengetahuan yang secara langsung berbentuk pengetahuan dan umumnya disebut sebagai pengetahuan terstruktur. Sehingga, pengetahuan adalah gabungan antara kedua pengetahuan tersebut.

II. Pemindahan Pengetahuan

Nonaka dan Takeuchi (1995) menawarkan empat model pemindahan pengetahuan (*knowledge transfer*) sebagai model SECI (*Socialization, Externalization, Combination, Internalization*). Keempatnya adalah :



Sumber : Nonaka dan Takeuchi (1995)

Gambar 1. 1
SECI Model

- *Socialization* adalah proses berbagi pengetahuan dan membuat *tacit knowledge* sebagai model mental dan keterampilan teknis. *Tacit knowledge* dapat diperoleh melalui observasi, imitasi, dan praktek.
- *Externalization* adalah proses artikulasi *tacit knowledge* dalam bentuk konsep eksplisit berwujud metafora, analogis, hipotesis, atau model

- *Combination* adalah proses konsep sistemis ke dalam sistem pengetahuan dengan menggabungkan *explicit knowledge* yang berbeda. *Explicit knowledge* dipindah melalui media seperti dokumen, pertemuan, email atau percakapan telepon. Kategorisasi pengetahuan ini akan memunculkan pengetahuan baru.
- *Internalization* adalah proses mengubah *explicit knowledge* menjadi *tacit knowledge* dan dekat dengan konsep pengalaman karena mengerjakan atau dapat disebut sebagai *learning by doing*

Keempat proses tersebut memperlihatkan bahwa perpindahan pengetahuan bergantung pada pemahaman antara pemilik pengetahuan dan pengguna pengetahuan. Pemahaman umum terdiri atas konteks dan pengalaman. Konteks adalah cerita di balik pengetahuan, kondisi atau situasi yang membuat pengetahuan dapat dimengerti. Sedangkan pengalaman adalah aktivitas yang memproduksi model mental bagaimana pengetahuan digunakan.

III. Berbagai Pengetahuan

Gupta, Sharma, Hsu (2008) berpendapat kemampuan organisasi melakukan perpindahan informasi dan pengetahuan adalah faktor penentu bagi organisasi dalam mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Aliran informasi dan pengetahuan terjadi ketika *tacit knowledge* dan *explicit knowledge* dibedakan dalam proses pemindahannya. *Transfer knowledge* adalah aspek terpenting

dari manajemen pengetahuan (*knowledge management*) saat pengetahuan diambil atau didapatkan dari sebuah organisasi sehingga harus dapat dibagikan dari pribadi dan kelompok di dalam organisasi tersebut.

Definisi berbagai pengetahuan datang dari Dixon (2000). Menurutnya ada lima tipe utama berbagi pengetahuan yaitu *serial*, *near*, *far*, *strategic*, dan *expert transfer*. Masing-masing dibedakan menurut tujuan, metode, dan cara menggunakannya. Adapun lima tipe utama tersebut yaitu :

1. *Serial Transfer*: diterapkan ke sebuah tim yang mengerjakan satu tugas, kemudian tim yang sama mengulang tugas tersebut dalam konteks baru. Contohnya adalah tim pengganti generator uap di Bechtel (sebuah perusahaan konstruksi terkenal dari Amerika Serikat). Tim ini mengganti sebuah generator di sebuah lokasi spesifik, misalnya di perusahaan kimia, selama dua atau tiga bulan. Ketika tim menyelesaikan tugas tersebut, pekerjaan tim lantas berpindah ke kilang minyak untuk mengganti generator. Tim menggunakan kembali pengetahuan yang didapatkan dari mengerjakan perusahaan kimia. Pada *serial transfer*, tim sumber dan tim penerima adalah tim yang sama. Serial transfer menawarkan efisiensi dalam kecepatan dan kualitas.
2. *Near transfer*: melibatkan transfer pengetahuan dari tim sumber ke tim penerima yang mengerjakan pekerjaan serupa dalam konteks sama tetapi di lokasi berbeda. Syarat utamanya adalah pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan besar dan

terus menerus. Sebuah contoh adalah tim pekerja Ford di Chicago dan di Atlanta. Di Atlanta tim pekerja dapat memasang rem depan mobil baru 15 detik lebih cepat dibanding tim pekerja di Chicago. Kemudian, tim pekerja Ford di Chicago menggunakan pengetahuan tim pekerja di Atlanta untuk dapat memasang rem depan supaya mendapatkan waktu yang sama. *Near transfer* membawa *explicit knowledge* dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

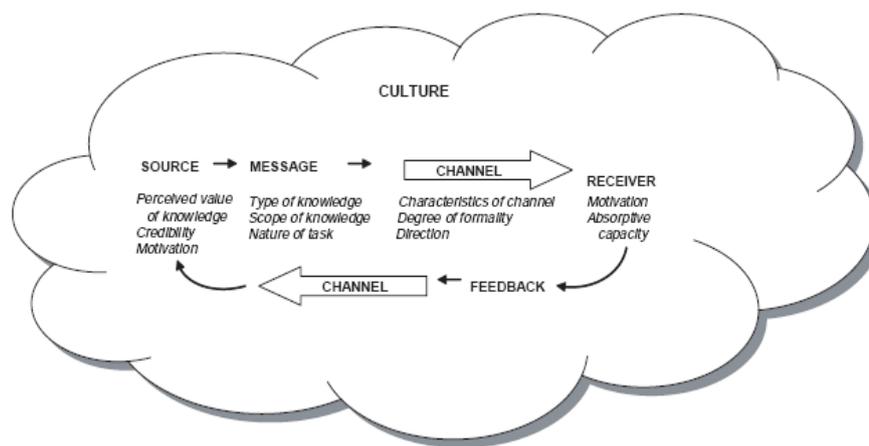
3. *Far transfer* : melibatkan pemindahan *tacit knowledge* dari tim sumber ke tim penerima ketika pengetahuan berkaitan dengan tugas non-rutin. Contohnya adalah tim eksplorasi minyak mengundang tim lain untuk membantu menginterpretasi data seismik dan geologi yang telah mereka kumpulkan. Pengetahuan ditransfer langsung ke masing-masing anggota tim terutama pada langkah dan prosedur yang tidak tertulis. Karena interpretasi dari data tersebut adalah tugas dengan beragam *variabel*, mereka harus menyajikan sesuai dengan pengetahuan mereka. *Far transfer* biasa digunakan untuk memungkinkan pemindahan pengetahuan yang sangat spesifik.
4. *Strategic transfer* melibatkan pemindahan pengetahuan yang sangat kompleks, seperti bagaimana merilis sebuah produk dari satu tim ke tim lain yang terpisah baik tempat *maupun* waktu. Transfer ini berbeda dari *far transfer* karena *strategic transfer* lebih terbatas lingkungannya seperti pada satu tim tertentu. Biasanya *strategic transfer* akan bermanfaat bagi perusahaan

berskala global ketika pengetahuan bisa dipindahkan ke lokasi cabang di belahan dunia lain dengan konteks lingkungan yang berbeda.

5. *Expert Transfer*, melibatkan pemindahan *explicit knowledge* mengenai tugas yang dikerjakan rutin. Contohnya adalah teknisi yang mengirim surat elektronik ke jaringan pertemanannya untuk bertanya bagaimana *meningkatkan* kecerahan monitor kuno dan mendapatkan jawaban dari ahli yang mendalami bidang tersebut.

Di dalam model transfer ini, kebutuhan keahlian dapat menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan.

Jacobson (2008) menekankan bahwa dalam memahami berbagi pengetahuan harus mengerti apa yang terjadi di level individu sebagai pusat dari proses tersebut. Jacobson menawarkan model *knowledge sharing* yang diadaptasi dari model proses komunikasi Shannon Weaver dan Barlo. Model yang ditawarkan oleh Jacobson adalah sebagai berikut:



Sumber : Jacobson (2008)

Gambar 1.2
Model *knowledge sharing* Jacobson

Ada enam faktor utama yang dapat dilihat dalam proses berbagi pengetahuan

1. Sumber pengetahuan yaitu individu yang memiliki pengetahuan dan memindahkan pengetahuan tersebut ke orang lain. Ada tiga karakteristik sumber pengetahuan yaitu :
 - a. Aliran pengetahuan antar individu diasosiasikan dengan biaya, maka pemilik pengetahuan dianggap lebih

bernilai dibanding yang tidak memiliki.

- b. Kredibilitas sumber pengetahuan, ini berhubungan dengan kompetensi seseorang untuk membagi pengetahuan yang dimilikinya.
- c. Motivasi dari sumber pengetahuan untuk bersedia berbagi karena yang memiliki pengetahuan biasanya

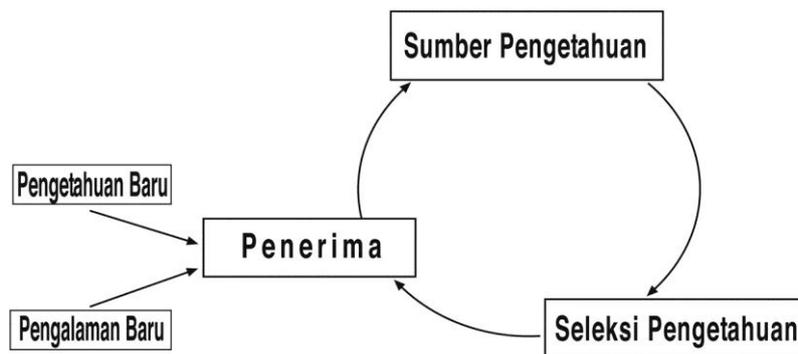
- memiliki status kekuasaan lebih besar di organisasi.
2. Pesan. Jacobson melihat bahwa jenis pengetahuan dan cakupan pengetahuan seperti apa yang akan dibagi dalam organisasi.
 3. Penerima pengetahuan. Pada proses berbagi pengetahuan, efektivitasnya bergantung pada motivasi dan kapasitas menyerap dari penerima pengetahuan. Motivasi lebih pada persoalan pemahaman menggunakan pengetahuan dari sumber lain. Sedangkan kapasitas menyerap pengetahuan baru adalah bagaimana pengetahuan tersebut dapat digabungkan dengan pengetahuan yang dimiliki.
 4. Kanal komunikasi atau bagaimana pengetahuan dikomunikasikan. Ada sejumlah kanal yang dapat digunakan untuk berbagi pengetahuan mulai dari pertemuan tatap muka langsung, hingga menggunakan jalur teknologi informasi (internet, email, forum diskusi, hingga portal berbagi pengetahuan). Kanal komunikasi ini bisa bersifat formal dan non-formal.
 5. Umpan balik. Berbagi pengetahuan dapat terlihat apabila ada respon verbal maupun non-verbal dari penerima pengetahuan yang menandakan penerima mengerti pesan yang diterima.
 6. Budaya organisasi. Budaya yang direfleksikan ke dalam nilai-nilai organisasi, norma-norma, dan dipraktikkan dalam kegiatan sehari-hari di

sebuah organisasi. Ada empat aspek yang dapat dilihat bagaimana budaya dapat memengaruhi *knowledge sharing*, yaitu :

- a. Ukuran asumsi budaya yang melihat pengetahuan sebagai sesuatu yang penting
- b. Budaya menjadi mediasi di antara pengetahuan individu, kelompok, dan organisasi
- c. Budaya menciptakan konteks organisasi dalam interaksi sosial
- d. Budaya berdampak pada penciptaan dan adopsi pengetahuan baru.

Satu nilai yang disebutkan oleh Jacobson sebagai bagian budaya berbagi pengetahuan adalah kepercayaan, yakni ada penghormatan kepada pemilik ide. Hal ini diharapkan agar dalam proses berbagi pengetahuan, orang yang memberi pengetahuan baru harus mendapat penghargaan dan balasan setara. Kepercayaan harus transparan atau dapat dilihat dimana-mana dan harus dimulai dari jajaran manajemen teratas. Secara khusus, manajemen teratas harus melakukan hal tersebut karena kegiatan mereka didefinisikan sebagai nilai-nilai dalam organisasi.

Untuk proses berbagi pengetahuan untuk staf pengajar di Program Vokasi UI sebagai alternatif penciptaan pengetahuan, model Jacobson dan Dixon dapat diadaptasi dalam pelaksanaan. Penulis menawarkan model pengembangan sebagai berikut :



Gambar 1.3
Model Berbagi Pengetahuan Untuk Staf Pengajar di Program Vokasi UI

Proses ini terbentuk dalam siklus yang berulang. Sumber pengetahuan dapat berupa pengetahuan staf pengajar Vokasi UI yang bersifat *tacit* dan *explicit*. Pada tingkatan rumpun program studi, pengetahuan tacit dan eksplisit dapat dialirkan kepada penerima menjadi pengetahuan baru bagi program studi lainnya di lingkungan Program Vokasi UI.

Pada tahapan seleksi pengetahuan perlu ada lembaga yang dapat memilah dan memilih pengetahuan apa saja yang dapat dialirkan ke dalam organisasi. Lembaga ini dapat berupa perorangan yang ditunjuk untuk mengelola aktivitas berbagi pengetahuan seperti manajer pengetahuan (*knowledge manager*). Lembaga ini juga dapat menjadi bagian dari organisasi dan diberi fungsi dan wewenang melakukan seleksi pengetahuan yang akan dialirkan. Lembaga penyeleksi ini berperan penting apakah nantinya pengetahuan tersebut dapat dipindahkan melalui metode yang tepat apakah menggunakan pendekatan *near*, *serial*, *far*, *strategic* ataupun *expert transfer* saat mengalirkan pengetahuan. Pemakaian media apa saja dalam membagi pengetahuan baru

juga menjadi tanggung jawab dari lembaga penyeleksi ini. Lembaga yang menjadi bagian dari struktur organisasi dapat berupa pusat pengetahuan (*knowledge center*) yang dikelola profesional.

Pada penerima pengetahuan, dapat diartikan sebagai staf pengajar sebagai profesional maupun lembaga yaitu berbagai program studi di Program Vokasi UI. Penerima akan menerima pengetahuan baru yang mengalir dari penyeleksi pengetahuan. Selanjutnya mereka akan memberi makna dan pengalaman baru pada pengetahuan tersebut. Setelah memberi makna dan pengalaman baru pada pengetahuan yang telah dialirkan oleh lembaga penyeleksi maka pengetahuan baru akan terbentuk. Proses ini berlaku terus menerus dan membentuk siklus yang tidak terhenti sehingga proses berbagi pengetahuan akan menjadi bagian tak terpisahkan dari jalannya organisasi.

KESIMPULAN

Berbagi pengetahuan adalah proses penting di dalam sebuah organisasi dalam mengelola dan menciptakan pengetahuan

baru. Pada organisasi baru seperti pada Program Vokasi UI, penting untuk mengelola pengetahuan sejak dini. Pelembagaan berbagi pengetahuan seperti melalui orang yang bertanggung jawab pada mengalirnya pengetahuan (*knowledge manager*) maupun yang berbentuk dalam struktur organisasi seperti pusat pengetahuan (*knowledge center*) menjadi demikian penting agar penciptaan pengetahuan baru dapat berlangsung mudah dan terus menerus. Penambahan pengetahuan dan pengalaman baru yang dimiliki oleh staf pengajar sebagai profesional maupun rumpun program studi nantinya akan membentuk

pengetahuan baru yang nanti akan terus dialirkan ke semua staf pengajar maupun rumpun program studi lainnya.

Proses berbagi pengetahuan adalah proses terus menerus dan berlangsung melekat dengan berlangsungnya organisasi. Organisasi dapat memanfaatkan pengetahuan yang berlimpah seperti pengetahuan di organisasi pendidikan. Setelah melalui proses siklus tersebut, organisasi pendidikan tentu akan memperoleh manfaat dari proses berbagi pengetahuan tersebut apabila prosesnya berjalan lancar dan terlembagakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Davenport, T. H. & Prusak, L. (1998). *Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know*. Boston : Harvard Business School Press.
- Dixon, N. M. (2000). *Common Knowledge: How Companies Thrive by Sharing What They Know*. Boston : Harvard Business School Press.
- Filos, Erastos (2008). Smart Organization in The Digital Age. In Jennex, Murray E. (Ed). *Knowledge Management : Concept, Methodologies, Tools, and Application*. (vol. 1, pp.48-72). Hershey : Information Science Reference.
- Gupta,J., Sharma,SK.,Hsu, J. (2008). An Overview of Knowledge Management. In Jennex, Murray E (Ed). *Knowledge Management : Concept, Methodologies, Tools, and Application*. (vol. 1, pp. 1-22). Hershey : Information Science Reference.
- Jacobson, Carolyn (2008) Knowledge Sharing Between Individual. In Jennex, Murray E. (Ed). *Knowledge Management : Concept, Methodologies, Tools, And Application*. (vol. 3. pp 1633-1641). Hershey : Information Science Reference
- Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge- Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics Innovation* New York: Oxford University Press.
- Saenz, J.,Aramburu,N.,Rivera,O. (2010) Exploring the Links between Structural Capital, Knowledge Sharing, Innovation Capability, and Business Competitiveness : An Empirical Study. In Harorimana, Deogratius (Ed). *Cultural Implications of Knowledge Sharing, Management and Transfer*.(pp.321-354). Pennsylvania : Information Science Reference.
- Setiarso, Bambang., et.al (2009). *Penerapan Knowledge Manajemen Pada Organisasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siakas, Kerstin dan Georgiadou, Elli (2008). Knowledge Sharing in Virtual and Networked Organisations in Different Organisational and National Cultures. In Bolisani, Ettore (Ed) *Building The Knowledge Society in The Internet. Sharing and Exchanging Knowledge in Networked Environments* (pp 45- 64).Hersey : Information Science Reference.

Tentang Program Vokasi.http://vokasi.ui.ac.id/web/?page_id=414 [15 November 2013]

PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA

Penulis diharapkan berpedoman kepada ketentuan yang dibuat ketika menyiapkan naskahnya. Semua naskah yang dikirim akan ditelaah oleh satu editor dan paling sedikit dua *reviewer*. Penulis bisa mengajukan nama-nama calon *reviewer*.

Jurnal Vokasi memegang prinsip *anonymous* (tanpa nama) ketika dilakukan *review* terhadap naskah dimana identitas baik penulis maupun *reviewer* akan dijaga kerahasiaannya.

I. BENTUK NASKAH

Jurnal Vokasi menerima naskah dalam bentuk hasil penelitian (*research article*), ulasan (*review*), baik dalam Bahasa Indonesia maupun dalam Bahasa Inggris.

1. **Hasil Penelitian (*Research Article*)**, ide penting dan asli (*original*) dalam ilmu sosial dan kesehatan yang memiliki ruang lingkup penelitian yang luas, serta pembahasan temuan yang mendalam, baik dalam bentuk *field research* maupun *desk research*.
2. **Ulasan (*Review*)** dapat berupa
 - Perkembangan keilmuan terkini,
 - Ringkasan hasil beberapa penelitian dengan penekanan pada

ide penelitian selanjutnya (*what next research idea*)

- Perkembangan kebijakan di tingkat nasional dan internasional,
- Pemikiran mendalam peneliti,
- Perkembangan telaah buku-buku yang menjadi pokok ilmu.

II. PENGIRIMAN NASKAH

Naskah dikirim ke

Kantor Redaksi Gedung Administrasi Dan Laboratorium Program Vokasi, Universitas Indonesia, Depok 16424. Atau kirim email ke: jurnal@vokasi.ui.ac.id, atau bisa hubungi telp: 021-29027481 ; Fax: 021-29027480.

Penulis diharap menyebutkan bentuk naskah yang dikirim:

Hasil penelitian (*Research Article*), atau **Ulasan (*Review*)** di POJOK KANAN ATAS HALAMAN JUDUL ARTIKEL. Naskah dikirim dalam tiga *hard copy*, satu *soft copy* dalam bentuk CD atau melalui email jurnal@vokasi.ui.ac.id

III. FORMAT NASKAH

1. Naskah dapat berupa hasil pemikiran maupun hasil penelitian.

Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan gaya naratif. Pembabakan dibuat sederhana sedapat mungkin menghindari pembabakan bertingkat. Tabel dan gambar harus mencantumkan sumber. Table dan gambar diberi nomor secara berurut sesuai dengan kemunculannya. Semua kutipan dan referensi dalam naskah harus tercantum dalam daftar pustaka dan sebaliknya, sumber bacaan yang tercantum dalam daftar pustaka harus ada dalam naskah.

2. Nomor halaman diletakkan di tengah halaman (center) bawah. Bagian pertama tulisan tidak perlu diberi halaman.
3. Nomor baris diletakkan di sebelah kiri tiap kalimat.
4. Halaman *cover* harus menunjukkan judul tulisan, nama penulis, institusinya, dan korespondensi berupa nomor telepon dan *e-mail* (diharapkan *e-mail* institusi)
5. Angka dilafalkan dari satu sampai sepuluh, kecuali jika digunakan dalam tabel atau daftar dan ketika digunakan dalam unit atau kuantitas matematika, statistic, atau teknis, misalnya *empat hari, 5*

kilometer, 25 tahun. Semua angka lainnya disajikan secara numerik.

6. Persentase dan decimal untuk penggunaan teknis dapat menggunakan symbol (%) dan (,)
7. Tabel dan gambar diletakkan pada halaman yang terpisah dan diletakkan pada akhir teks. Masing-masing tabel atau gambar diberi nomor dan judul lengkap yang menunjukkan isi table atau gambar.
8. Acuan ke masing-masing tabel atau gambar harus ada dalam teks.

IV. URUTAN NASKAH

Naskah disusun dengan urutan sebagai berikut:

1. **Judul** dalam Bahasa Indonesia dan Inggris untuk naskah Bahasa Indonesia, Judul dalam Bahasa Inggris untuk naskah bahasa Inggris (Judul maksimum 14 kata)
2. **Nama Lengkap** penulis tanpa gelar
3. **Asal Instansi penulis** untuk korespondensi.
4. **Abstrak** dalam bahasa Inggris (diutamakan di bawah 200 kata). Abstrak diharapkan mencakup latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan kontribusi penelitian.
5. **Kata kunci** (*keywords*) dalam Bahasa Inggris paling banyak 3-5

kata kunci yang akan memudahkan pemberian indeks. Kata pertama menjadi kata yang paling penting, dan diurut seterusnya.

6. Korespondensi penulis pada catatan kaki halaman pertama

7. Bentuk naskah terdiri dari 2 (dua) jebis, yaitu:

1) **Hasil Penelitian (*Research Article*)**. Naskah dibuat menggunakan *Microsoft Office Word*. Seluruh bagian dalam naskah diketik dengan huruf times new roman. Ukuran 12pt, spasi 1, ukuran kertas A4, dan margin 2 cm untuk semua sisi serta jumlah halaman tidak melebihi 25 halaman termasuk daftar pustaka. Untuk kepentingan penyuntingan naskah seluruh bagian naskah (termasuk tabel, gambar, dan persamaan matematika) dibuat dalam format yang dapat disunting oleh editor. Editor dapat meminta data yang digunakan dalam gambar untuk kepentingan penyuntingan.

Struktur artikel ini meliputi:

1. Judul
2. Nama penulis
3. Asal institusi
4. Abstrak dan *Keywords*

5. Pendahuluan (termasuk kerangka teori dan tujuan penelitian)

6. Metode Penelitian

7. Hasil dan Pembahasan

8. Kesimpulan

9. Daftar Pustaka, dengan mempertimbangkan

a. Derajat kemutakhiran bahan yang diacu dengan melihat proporsi, diharapkan mencakup minimal 60% terbitan sepuluh tahun terakhir,

b. Semakin tinggi pustaka primer yang diacu, semakin tulisan bermutu,

c. Keseringan pengarang mengacu pada diri sendiri (*self citation*) dapat mengurangi nilai jurnal.

10. Ucapan terima kasih jika ada

2) **Ulasan (*Review*)**. Naskah dibuat menggunakan *Microsoft Office Word*. Seluruh bagian dalam naskah diketik dengan huruf times new roman. Ukuran 12pt, spasi 1, ukuran kertas A4, dan margin 2 cm untuk semua sisi serta jumlah halaman tidak

melebihi 20 halaman termasuk daftar pustaka.

Struktur artikel meliputi

1. Abstrak dan *Keywords*
2. Pendahuluan (termasuk kerangka teori)
3. Pembahasan
4. Kesimpulan
5. Daftar Pustaka, dengan mempertimbangkan
 - a. Derajat kemutakhiran bahan yang diacu dengan melihat proporsi, diharapkan mencakup minimal 60% terbitan sepuluh tahun terakhir,
 - b. Keseringan pengarang mengacu pada diri sendiri (*self citation*) dapat mengurangi nilai jurnal.
6. Ucapan terima kasih jika ada

V. DOKUMENTASI

Acuan

Karya yang diacu harus menggunakan format penulis-tahun. Yang mengacu pada karya daftar acuan.

- Dalam teks, karya diacu dengan cara berikut: *nama akhir/ keluarga penulis dan tahun* dalam tanda kurung. Contoh

(Andi, 1984), dua penulis (Andi dan Clark, 1984), lebih dari dua penulis (Andi dkk., 1984), lebih dari dua sumber diacu bersamaan (Andi, 1984; Cipta, 1990), dua tulisan atau lebih oleh satu penulis (Andi, 1984; 1990).

- Acuan penulisan yang merupakan karya institusional sedapat mungkin harus menggunakan akronim atau singkatan sependek munggi. Contoh: Komite SAK-IAI, PSAK 28, 1984)

Catatan Kaki

Catatan kaki tidak digunakan untuk acuan. Catatan kaki digunakan hanya untuk perluasan informasi yang jika dimasukkan ke dalam teks bias mengganggu kontinuitas bacaan. Catatan kaki diketik dalam spasi 1 dan ditempatkan pada akhir teks.

Daftar Acuan (Daftar Pustaka)

Setiap naskah harus mencantumkan daftar Acuan (Daftar Pustaka) yang isinya hanya karya yang diacu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan daftar pustaka adalah

1. Nama penulis didahului dengan penulisan nama belakang atau nama keluarga,
2. Disusun secara urut berdasarkan abjad,
3. Tidak menyebutkan nomor halaman,

4. Penulisan dilakukan dengan system paragraph menggantung.

Contoh:

Buku:

Bromley, Daniel W. 1989. *Economic Interests and*

Institutions, The Conceptual Foundations of Public Policy. New York: Basil Blackwell.

Senge, Peter M. 1990. *The Fifth Discipline Fieldbook: the Art and Practice of the Learning Organization*.

New York: Currency-Doubleday.

_____. 1994. *The Fifth Discipline Fieldbook:*

Strategies and Tools for Building a Learning Organization. New York: Currency-Doubleday.

Keterangan: jika ada lebih dari satu buku yang dikarang oleh seorang penulis, tidak perlu menulis nama lagi, hanya membuat garis sepanjang empat ketukan.

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia. *Ketetapan MPR*

No.II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

_____. *Undang-Undang No.7 Tahun 2004*

tentang Sumber Daya Air. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32.

Jurnal:

Chotim, Erna E dan Yulia I. Sari. 1999. Krisis:

Peluang bagi Usaha Kecil?. *Jurnal Analisis Sosial*. Vol. 4 No. 1 (Januari).

Hardjosoekarto, Sudarsono. 1993. Perubahan

Kelembagaan: Teori, Implikasi, dan Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Volume 1, Nomor 11 (Januari)

Internet:

Depdiknas Libatkab Elemen Masyarakat Dalam

Berantas Buta Huruf. 2005. www.kompas.com. 27 Januari.

Kramadibrata, Ade Moetangad. 2004.

Pengelolaan Sampah Terpadu. www.detik.com. 13 Mei.

Sumber:

Keputusan Dirjen DIKTI No. 11/DIKTI/Kep./2006

tentang *Paduan Akreditasi Berkala Ilmiah*, Dirjen DIKTI, Depdiknas, 2006

HAYATI Journal of Biosciences, Penerbit: Perhimpunan Biologi Indonesia dan Departemen Biologi FMIPA IPB, ISSN 0854-8587